

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah ekonomi politik dan periode ke-Indonesiaan, kekuatan-kekuatan akumulasi kapital tidak terlepas dari integrasi seperti apa halnya terjadi pada masyarakat kolonial Belanda yang berlangsung selama 300 tahun sesuai dengan narasi publik, bahwa terjadi pembusukan dan proses kreatif revolusioner.

Sebagian karena relatif lemahnya poros kapitalisme kolonial Belanda, proses revolusi kapitalis di masa kolonial terbatas saja. Cara produksi pedesaan berlangsung terus seiring dengan sektor perkebunan modern, sedangkan elemen-elemen otoritas politik prakapitalis berdampingan dengan pemerintahan kolonial Belanda yang berlangsung sampai berakhirnya masa kolonialisme.

Pada akhir periode kolonial, borjuasi Indonesia relatif masih lemah perkembangannya dan berpusat pada sektor perdagangan. Kelemahan itu terbukti dari kenyataan bahwa elemen terpenting berupa para pedagang China, tidak mampu memegang posisi kepemimpinan resmi, umum, sosial maupun politik.<sup>1</sup> Fase itu kemudian menjelaskan perubahan secara mendasar pada level struktur ekonomi dan sosial pada masa kolonial Belanda dimana perdagangan, perkebunan modern telah memberikan

---

<sup>1</sup> Richard Robinson, Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Terj. Harsutejo, (Beji Timur, Depok ; Komunitas Bambu, 2013) Hal. 3

tanda bahwa proses produksi dan perputaran ekonomi di Indonesia telah terkonsolidasi ke dalam kelas-kelas ekonomi.

Kelas kapitalis domestik di Indonesia dapat dibagi dalam kategori yang tumpang tindih dalam ekonomi dan politik/dalam satu tingkat, sehingga bisa membedakan antara kaum kapitalis kecil yang terdiri dari para pedagang dan manufaktur yang tersebar luas serta sektor korporasi yang jumlahnya lebih kecil dan sering berkaitan dengan kapital internasional dan negara. Dalam tingkat lainnya, dapat dibedakan antara sejumlah elemen kapital yang berbeda; keuangan, manufaktur, perdagangan, agrarian.

Selain itu, terjadi juga kompetisi ekonomi dan politik antara tiap kelompok korporasi untuk mempengaruhi kebijakan politik, membangun perlindungan politik serta melakukan integrasi dengan kapital internasional dan negara. Akan tetapi, sepertinya faktor yang terbukti paling fundamental dalam perkembangan kelas kapitalis Indonesia ialah adanya pembagian politik dan sosial yang mendalam antara golongan Tionghoa dan penduduk lokal.

Keadaan itu yang menimbulkan konflik dan sering saling mengkotak-kotakkan.<sup>2</sup> Kronisme dan perkembangan konflik korupsi dan pengkotak-kotakkan itu seolah memberi bukti, penetrasi kunci lembaga politik, birokrasi dan ekonomi yang beragam di Indonesia dengan kehadiran korporasi dan kapitalisme Tionghoa dan penduduk lokal di Indonesia baik dalam institusi

---

<sup>2</sup> Richard Robinson, Hal. 215

kepresidenan, militer, perusahaan swasta sehingga mempunyai keterkaitan dengan kegagalan dan perkembangan dalam sejarah ekonomi Indonesia yang hingga hari ini masih terus bergulir dengan segala dampak, proses dan pengaruh yang juga turut mempengaruhi kebijakan ekonomi politik nasional maupun regional.

Sebelum 1965, kontradiksi pokok yang ada dalam kelas kapitalis domestik berupa elemen ekonomi yang dominan. Pada saat yang sama, mereka secara politik lemah dan secara sosial terancam, kaum kapitalis golongan Tionghoa tidak dapat melanjutkan dominasi mereka dalam keuangan sehingga produksi domestik menjadi dominasi kelas. Dalam keadaan mendapatkan tekanan dari borjuasi dagang penduduk lokal yang merosot, sejumlah pemerintahan berganti-ganti pada 1950-an.<sup>3</sup>

Mereka menerapkan berbagai pembatasan terhadap para importir dan pedagang kecil Tionghoa di pedalaman di bawah Program Benteng PP No. 10.<sup>4</sup> Pencetus sistem ekonomi Program Benteng atau Gerakan Benteng adalah Menteri Perdagangan era pemerintahan kabinet Natsir yaitu Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang juga merupakan ayah dari Bapak Prabowo Subianto, dimana salah satu tujuan dari Gerakan Ekonomi Benteng adalah menumbuhkan kelas pengusaha yang berasal dari

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Program Benteng adalah sebutan bagi kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1950 namun berhenti dan dianggap gagal sampai pada tahun 1957. Program Benteng ini adalah salah satu cara memperbaiki perubahan struktur prekonomian peninggalan Belanda menuju perekonomian nasional. Karena melihat ekonomi yang timpang, dan lebih menguntungkan perekonomian penduduk kolonial. Oleh karena itu Program Benteng ini diharapkan dapat mengubah nasib para pengusaha pribumi.

pengusaha lokal tersebut juga diberikan bantuan modal dan kredit diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Namun gerakan itu gagal lantaran para pengusaha lokal yang diberikan bantuan modal dan kredit tidak mampu mengelola usaha dagang mereka sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Meskipun ada upaya pemerintah guna mendorong kapital penduduk lokal, baik milik negara maupun swasta, dominasi bisnis dan perdagangan orang Tionghoa umumnya tetap berjalan. Hal tersebut terjadi karena luasnya struktur yang saling terkait kuat antara perusahaan keluarga yang terintegrasi ke dalam perkembangan sehat.

Keadaan itu disertai dengan jaringan perkreditan dan distribusi mereka, baik di Indonesia maupun seluruh Kawasan Asia Tenggara, terutama bagi kelompok bisnis yang lebih besar. Dengan terjadinya kontra revolusi tahun 1965 dan timbulnya kekuatan politik baru, selanjutnya memberikan tawaran kepada kaum kapitalis Tionghoa. Keadaan ini adalah suasana yang jauh lebih punya harapan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pemerintahan Orde Baru yang menyediakan kondisi bagi investasi kapital dan kegiatan korporasi yang berkembang. Masuknya kembali modal asing ke Indonesia merupakan keadaan yang baik bagi para kapitalis golongan Tionghoa yang dengan sigap mampu mengambil manfaat dalam bermacam usaha

patungan untuk mengembangkan kapital mereka sendiri dan basis korporasi.<sup>5</sup>

Segala bentuk kegiatan dari basis korporasi yang dimaksud dan menguntungkan kapitalis Tionghoa juga disebabkan karena adanya kekuatan seperti militer untuk melindungi para kapitalis tersebut yang dominan dan turut pula mengendalikan kekuatan ekonomi sehingga menjadi tempat berlindung bagi para kapitalis Tionghoa untuk mengembangkan dan melindungi korporasi dari basis kegiatan ekonominya.

Basis kegiatan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kerja politik kerangka kerja politik merupakan kecenderungan pada sebab akibat yang arahnya pada perubahan politik dan sosial yang diciptakan oleh pemerintah dalam alur kekiniannya sehingga dalam perkembangannya bisa jadi keabsahan pemerintahan dan hubungan kekuasaan yang terjadi terdapat penciptaan sejarah monumental yang akan berbicara tentang peristiwa besar seperti perang, orang-orang besar, tokoh-tokoh terpenting yang memang hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran nasional dan kesadaran kewarganegaraan.<sup>6</sup>

Kekuasaan dan politik merupakan narasi besar dalam paradigma politik. Fokus tersebut menjadi dasar bagi ilmu politik untuk menjadikan

---

<sup>5</sup> Ibid, Hal 215-216

<sup>6</sup> Lihat Edward L. Polinggomang dalam kata pengantar tentang sejarah dan politik masa lampau yang melahirkan hubungan dan percakapan, melahirkan ulasan, tafsiran dan penjelasan mengenai masa lampau dalam buku perubahan politik dan hubungan kekuasaan Makassar 1906-1942. Pada dasarnya sejarah monumental penuh dengan kecenderungan memuja akibat dan mengabaikan sebab, memuja hasil dan kurang menekankan proses yang dilalui.

negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum sampai dengan pembagian alokasi sumber daya adalah suatu bentuk paradigma yang menjadi kerangka berfikir kajian ilmu politik dalam proses perjalanannya sehingga menjadikan demokrasi sebagai sebuah bentuk sistem bernegara.

Sematan kata Cukong adalah diksi Orde Baru, sekarang diksi itu berubah menjadi Taipan karena terjalin komunikasi yang kuat antara pengusaha dan kelompok penguasa yang memberikan kesempatan dan perlindungan, sehingga terbentuk diksi yang namanya patron dan klien untuk membesarkan dan melebarkan jaringan bisnis, kekuatan militer dan keberlangsungan dalam pengelolaan bisnis dan korporasi.

Pada umumnya, negara dipandang memiliki kewenangan yang sah untuk mempertahankan sistem dominasi sosial. Dalam masyarakat kapitalis yang lebih bertumpu pada hubungan produksi atau struktur kelas, negara merupakan refleksi hubungan produksi yang ada, khususnya kelas yang dominan, sehingga ia tidak lebih sebagai aspek politik dari hubungan-hubungan sosial yang bersifat dominatif.<sup>7</sup> Negara memiliki dominasi yang memaksa untuk melakukan aturan kepada seluruh tata pengelolaan sumber daya yang ada. Mulai dengan sumber daya manusia, energi sampai dengan sumber daya alam yang kemudian diatur dengan baik.

Perkembangan kapitalisme industri modern sepanjang empat dekade terakhir ini berlangsung di bawah rezim politik dan ekonomi yang

---

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta; Kompas Gramedia, 2010) Hal. 61

bersifat intervensionis, otoritarian, dan predatoris. Umumnya, bagi kaum neoliberal maupun penganut teori Marxis, gejala yang tampaknya merupakan penyimpangan terhadap teori konvergensi liberal itu dipandang sebagai suatu periode transisi, di mana negara bertindak sebagai wakil dan pelindung dari *civil society*/kelas menengah/kaum borjuis yang masih dalam proses inkubasi.

Dengan kata lain, periode ini merupakan proses 'industrialisasi terlambat' yang membutuhkan perlindungan dan subsidi negara di bidang ekonomi.<sup>8</sup> Negara tentu memberikan jaminan terhadap kelompok kelas sosial sebagai bentuk wujud dimana negara-negara yang berkembang memfasilitasi pasar dan mengikuti trend pasar sesuai dengan narasi kapitalisme itu sendiri. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kapitalisme modern pada dasarnya dapat berlangsung di dalam berbagai kerangka institusional mengingat "kapitalisme Asia" bukan sekedar suatu tahap transisi, melainkan bentuk lain dari kapitalisme itu sendiri.

Pandangan ini tentu saja disukai oleh kebanyakan pemimpin negara-negara industri Asia yang berpendapat bahwa perekonomian dibangun melalui negara yang kuat, berdisiplin sosial, serta mengacu pada nilai-nilai kolektif, tidak saja merupakan hal yang mungkin dilakukan, tetapi juga merupakan sebuah pilihan yang justru lebih baik bagi pertumbuhan dan kekokohan negara, dibandingkan format masyarakat demokrasi liberal yang dianggap sedang mengalami kemerosotan.<sup>9</sup> Krisis dan

---

<sup>8</sup> Vedi R Hadis, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta; Pustidaka LP3ES Indonesia, 2005) Hal. 106

<sup>9</sup> Ibid.

perkembangan kapitalisme di Asia tentu saja merupakan takdir tersendiri dimana masyarakat kapitalis dan masyarakat industri itu berkembang sedemikian pesat sementara krisis ekonomi Asia juga merupakan suatu hal yang cukup berimbang dan menjadi suatu peristiwa keadaan yang membuktikan bahwa inefisiensi dan disfungsi dalam roda perekonomian telah melahirkan para koalisi predatoris dan para pemburu rente.

Koalisi predatoris dan para pemburu rente menjadi kajian menarik dan penting dalam masa kontemporer di Indonesia terlebih rezim pasca otoritarianisme. Koalisi itu bisa tetap bertahan ditengah gempuran krisis perekonomian dan gejolak nilai mata uang yang mempengaruhi berbagai lini sektor sumber daya dalam negara. Para pemburu rente bisa berada dan mengokohkan diri mereka untuk tetap bisa menyambung kehidupan korporasi mereka dalam pergulatan patron dan klientilisme untuk memperebutkan kekuasaan dengan segala bentuk dinamika perubahan politik yang terjadi diluar siklus daripada korporasi, kekuasaan dalam birokrasi beserta perhelatan elektoral juga sangat dipengaruhi oleh para kelompok predatoris pemburu rente yang bisa sampai menekan negara, mengintervensi bahkan mengontrol jalannya roda pemerintahan.

Bukan pertama kalinya krisis dan reformasi gagal untuk menghasilkan revolusi liberal. Tahun 1965, dilucutinya 'kapitalisme komando' era Soekarno dan dibukanya Indonesia bagi investasi dan bantuan asing secara ironi telah mengkonsolidasikan otoritarianisme politik dan kapitalisme negara. Demikian pula program-program reformasi di bidang keuangan dan rezim-rezim perdagangan serta integrasi yang lebih

mendalam dengan pasar keuangan global yang menyusul anjloknya harga minyak pada dekade 1980-an, tidak menghasilkan transformasi menuju sistem pasar liberal.

Keadaan tersebut justru menimbulkan pergeseran dari monopoli publik kepada monopoli swasta terhadap pengendalian kekuasaan negara oleh kepentingan koalisi-koalisi oligarki yang begitu kokoh seperti sangat berkuasa dan tanpa tanding: suatu bentuk kapitalisme raja rampok yang tidak dibatasi hukum.<sup>10</sup> Bentuk kapitalisme yang demikian merupakan suatu sistem tersendiri dalam wilayah masing-masing di Indonesia yang berkembang begitu sempurna dan masuk ke dalam wilayah politik dan kartel perekonomian sehingga hubungan dunia usaha dan kekuasaan politik saling menghidupkan satu sama lainnya.

Siklus itulah yang menyebabkan negara tersandera oleh permainan monopoli yang dilakukan oleh hampir institusi strategis dan partai politik yang dipenuhi saat rezim Soeharto yang kemudian berkembang terus, tradisi dan status quonya terjaga menjelang reformasi.

Menjelang reformasi di awal krisis keuangan Indonesia tidak sekadar disebabkan kemacetan bank, bukan pula merupakan akibat dari kehadiran negara intervensionis yang mencekik. Hal itu sesungguhnya merupakan metamorfosis kekuasaan yang bersifat mendasar pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang memperlihatkan bangkitnya suatu kondisi yang didasarkan kepada keluarga-keluarga bisnis dan politik serta perusahaan-

---

<sup>10</sup> Ibid, Hal 109.

perusahaan konglomerat besar yang muncul dari aparat negara itu sendiri, yang memiliki kemampuan merambah ke pasar modal global baru yang sangat cepat itu. Dengan mengambil alih kepemilikan negara, oligarki-oligarki publik dan swasta baru ini secara efektif menciptakan suatu sistem ekonomi yang dibebani pinjaman (*over borrowed*), investasi berlebihan (*over-invested*) dan tidak dibatasi hukum.<sup>11</sup>

Negara tanpa pengelolaan padahal ada Undang-Undang yang mengatur namun bisa dijadikan pasar investasi yang berlebihan pun tidak diawasi karena tidak dibatasi oleh hukum. Pengawasan terhadap negara menjadi lemah dan tatanan sosial negara menjadi tidak berimbang dan informasi kepada publik menjadi tidak terbendung dan tidak rasional yang menjadikan pergulatan politik publik melakukan protes diseluruh daerah-daerah.

Para teknokrat Indonesia berhasil memperkenalkan sederetan reformasi kebijakan yang penting. Dengan maksud untuk memacu sektor manufaktur ekspor yang sedang tumbuh, serangkaian monopoli impor dicabut, termasuk yang paling menguntungkan di bidang plastik dan baja, yang dipegang oleh tokoh-tokoh kuat seperti Bob Hasan dan Liem Sioe Liong. Pengurangan yang luas di bidang tarif dan kewajiban impor juga dilakukan.

Demikian pula di sektor perbankan, dimana reformasi tahun 1983 dan 1988 telah menghapuskan kontrol terhadap suku bunga domestik dan

---

<sup>11</sup> Ibid, Hal 112.

membuka pintu bagi banjirnya bank-bank swasta.<sup>12</sup> Monopoli-monopoli sektor publik dalam bidang pembangkit daya, pelabuhan dan jalan raya, serta telekomunikasi dan televisi, yang sejak lama dianggap sensitif, dihapuskan.<sup>13</sup> Monopoli tersebut menjadikan sistem perekonomian dan struktur investasi dikuasai oleh koalisi kapitalisme yang menunjukkan gejala dimana pemegang kekuasaan melakukan akumulasi modal tanpa persaingan lantaran investasi yang berlebihan dan tidak dibatasinya hukum sehingga akumulasi tersebut seperti yang terjadi pada kasus Filipina dengan menyebut “mafia pintu belakang” yang tentu menyuburkan praktik-praktik kartel perekonomian tanpa persaingan, dimana kasus Filipina disebut munculnya oligarki tradisional yang membentuk kapitalisme dinasti pada kekuasaan politik.

Secara substantif, sebetulnya Indonesia menghadapi dilema pilihan model pembangunan sejak awal tahun 1980-an. Sayangnya gemerlap pembangunan kawasan-kawasan perkotaan yang sekaligus menjadi pusat orientasi budaya sejak dimulainya program penyesuaian struktural, telah membuat hampir semua orang terhipnotis dan lupa melihat bahwa cita-cita pembangunan yang giat dipromosikan sejak tahun 1970-an, semakin dikesampingkan. Perlahan-lahan praktik pembangunan ekonomi sejak awal

---

<sup>12</sup> Lihat Djisman Simanjuntidak, *Surve of Recent Developmentalis*, BIES, 25, 1 (April 1989), Hal 21-4 dalam Vedi R Hadiz dalam *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Hal 122.

<sup>13</sup> Lihat World Bank, *Indonesia : Improving Efficiency and Equity-Changes in the Public Sector's Role*, (Jakarta; Country Development III, East Asia and Pacific Region, Juni 1995), Hal.40-2 dalam Vedi R Hadiz dalam *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Hal 122 menjelaskan bahwa terjadi monopoli dalam sektor publik, sektor perbankan yang dimonopoli oleh kelompok kapitalis china dalam hal ini, sehingga mengakibatkan perubahan dalam sturuktur kepemilikan dan investasi.

tahun 1980-an terus menumpuk persoalan baru di bidang pembangunan sosial.

Di satu sisi, kebijakan demi kebijakan deregulasi untuk melakukan penyesuaian struktural yang sekaligus ditujukan untuk meningkatkan laju investasi dan pembangunan sektor industri, tidak memberi hasil optimal. Di sisi lain, pembangunan sosial yang seharusnya makin mendapat perhatian dengan konsekuensi makin besarnya dana pemerintah untuk membangun sarana serta kualitas tenaga Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat daerah terbelakan makin dikorbankan.<sup>14</sup> Pembangunan yang dilema tersebut semakin menguatkan bahwa regulasi lemah dan tidak terawasi menjadi semakin lemahnya negara untuk menjadikan pembangunan adalah bisnis sehingga laju kesenjangan sosial dan ekonomi membawa negara pada krisis.

Persoalan pembangunan menjadi semakin bertumpuk akibat langkah hiperpragmatis yang diambil oleh pemerintah selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir Orde Baru. Fakta-fakta itu bisa dilihat dari peningkatan beban hidup mayoritas masyarakat yang berada di lapisan bawah, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang terjadi akibat dikalahkannya kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan publik semata-mata demi mengutamakan kinerja ekonomi pemerintah dan kepentingan segelintir pengusaha.

---

<sup>14</sup> Andrianov Chaniago, *Gagalnya Pembangunan Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. (Jakarta; LP3ES, 2012) Hal. 8

Dua kepentingan itulah yang membuat kepekaan pemerintah semakin rendah dalam melihat potensi konflik yang sewaktu-waktu akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai.<sup>15</sup> Pembangunan yang berorientasi bisnis tersebut membuktikan bahwa negara menyepelekan kebutuhan publik yang mendasar seperti pengadaan rumah murah, transportasi, pendidikan dan kesehatan serta upah buruh yang selama ini menjadi permintaan paling tinggi.

Skema pembangunan ekonomi politik Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan dan bisnis telah dimulai dan terbentuk sejak masa Orde baru. Periode Soeharto negara memusatkan kebijakan ekonominya pada stabilitas politik dan peningkatan investasi membangun infrastruktur besar dan memberikan kemudahan bagi para investor pun memperkuat perang konglomerat seperti Liem Sio Liong. Kedekatan Soeharto dengan konglomerat memang dinilai berhasil menumbuhkan perekonomian akan tetapi juga menciptakan ketimpangan yang luas antara kelas atas dan masyarakat pekerja.

Setelah reformasi, struktur ekonomi tidaklah berubah secara signifikan meskipun demokrasi membawa keterbukaan dan desentralisasi namun orientasi kebijakan masih berpusat pada investasi, sehingga terkesan negara lebih sering berperan sebagai fasilitator pasar daripada pelindung kepentingan publik. Akibatnya, masalah sosial seperti ketimpangan pendapatan, urbanisasi, kegagalan manajemen birokrasi dan

---

<sup>15</sup> Ibid. Hal. 10.

pemerintahan, korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi warisan panjang. Pemerintahan berganti namun paradigma pembangunan tetap sama yang selalu menilai kemajuan dari angka pertumbuhan bukan dari kesejahteraan publik.

Kebijakan pembangunan yang berorientasi bisnis, infrastruktur itulah yang membuat pemerintah sering abai terhadap kebutuhan publik yang paling mendasar, seperti kebutuhan akan rumah murah, transportasi terjangkau, Pendidikan yang merata serta kesehatan publik justru tertinggal di tengah laju pembangunan infrastruktur dan industri. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik merupakan faktor utama terhadap meningkatnya potensi konflik sosial yang juga menjadi sumber ketidakpuasan publik yang sewaktu-waktu mengancam integrasi.

Sampai sekarang meningkatnya harga rumah mencapai tiga kali lipat dari tahun ke tahun karena bisnis properti di kawasan perkotaan semakin menuntut perluasan lahan oleh para pengusaha-pengusaha lokal. Anggaran untuk periode sekarang bahkan untuk kelompok generasi milenial akan susah untuk mendapatkan fasilitas perumahan bagi dirinya sendiri. Ini jelas efek dari masa otoritarianisme yang belum bisa diperbaiki hingga saat ini.

Penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 201.092.238 jiwa. Jika dilihat menurut pluralitas kelompok etnis, hal itu menunjukkan bahwa jumlah kelompok etnis Tionghoa menjacai angka 2,1%. Angka itu jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia menurut hasil sensus tahun 2000 akan mencapai jumlah 4.222.936 juta jiwa. Mereka itu dari sebelum

kemerdekaan hingga era kemerdekaan Indonesia dewasa ini disebut non pribumi. Angka itu menunjukkan dia substansi, pertama kelompok etnis Tionghoa yang berjumlah 2,1% termasuk kualifikasi minoritas jika berhadapan dengan penduduk lokal yang berjumlah 97,9%.

Kedua, walaupun kelompok etnis Tionghoa masuk kategori warga negara Indonesia yang berjumlah minoritas di Indonesia, tetapi mereka adalah kelompok etnis penguasa ekonomi nasional. Jadi, posisi mereka sangat kuat.<sup>16</sup> Dengan data sensus penduduk tersebut memperlihatkan bagaimana kekuatan dari 10 kelompok besar etnis yang ada di Indonesia.

Selain bahwa kelompok lokal yang dimaksud adalah untuk memberi gambaran sejauh mana kekuatan dan wilayah geografis penduduk memperlihatkan kedudukan dan porsi yang ada dalam geografis Indonesia untuk digunakan dalam melihat semua kebutuhan baik secara ekonomi, budaya juga sejarah.

Sampai dengan kekuatan kapitalisasi mereka sebagai kelompok etnis yang bertumbuh, bertambah dan berkembang sesuai dengan persentasi angka kebutuhan hidup yang ada di Indonesia mulai dari rezim Orde Lama sampai dengan pasca otoritarianisme yang ada sekarang ini untuk mengukur kriteria dan kehendak politik mereka sebagai sistem keragaman etnis atau pluralitas yang ada di Indonesia. Kehendak politik mereka tentu menjadi ukuran dan kapasitas untuk merumuskan dan

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 3

menjelaskan bagaimana posisi etnis dan kapitalisasi yang terjadi selama proses politik. Selanjutnya, hal itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

**Tabel 1.1.1**  
Jumlah 10 Besar Kelompok Etnis di Indonesia

Nomer	Nama Kelompok Etnis	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Etnis Jawa	83.752.853 jiwa	41,64
2.	Etnis Sunda	30.978.404 jiwa	15,49
3.	Etnis Madura	6.771.727 jiwa	3,35
4.	Etnis Minangkabau	5.475.145 jiwa	2,71
5.	Etnis Betawi	5.041.688 jiwa	2,50
6.	Etnis Bugis	5.010.423 jiwa	2,49
7.	Etnis Tionghoa	4.222.936 jiwa	2,1
8.	Etnis Banten	4.113.162 jiwa	2,04
9.	Etnis Banjar	3.496.273 jiwa	1,73
10.	Etnis Lainnya	56.452.563 jiwa	25,95
	Jumlah Total	201.092.238 jiwa	100 %

Sumber Data ; diolah dari BPS, Sensus Penduduk tahun 2000<sup>17</sup>

Dari tabel di atas bisa kita lihat bagaimana 10 komposisi penduduk etnis yang besar di Indonesia, jika kita melihat perbandingan antara etnis

<sup>17</sup> Sumber data diambil dari M.D. Laode, *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik; Politik Etnis Cina Pontianak dan Sngkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Yayasan Pustidaka Obor Indonesia, 2012, Hal.1, yang diolah dari BPS sensus penduduk tahun 2000. Pada data ini peneliti menggunakan hasil sensus penduduk tahun 2000 dikarenakan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik per 10 tahun yang artinya setelah tahun 2000 dilaksanakan sensus tahun 2010 dan 2020, peneliti belum menemukan Kembali hasil olah data komposisi penduduk berdasarkan etnis oleh BPS. Jadi dengan memudahkan dan mencoba memberi perbandingan sensus peneliti kemudian mengimbangi dengan hasil sensus penduduk 2020 yang dimana tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 201.092.238 dan sensus penduduk tahun 2023 berjumlah 275.770.000 juta jiwa. Peningkatan sebanyak 74 juta jiwa, sehingga peneliti memberi gambaran atau proyeksi peningkatan dari masing-masing persentase yang ada pada tahun 2000 kemudian dikalikan dengan peningkatan 74 juta jiwa untuk mencari proyeksi yang paling mendekati dan menggambarkan proses penambahan penduduk berdasarkan komposisi etnis.

Tionghoa yang berjumlah 4.222.936 jiwa dengan mengalahkan etnis lokal lain seperti etnis Banten dan Banjar bahkan hampir setara dengan etnis Bugis, Madura, Betawi dan Minangkabau dan kita sama sama tahu bahwasanya etnis Tionghoa merupakan etnis yang menguasai perekonomian secara nasional di Indonesia.

Bahkan etnis Bugis, Madura, Betawi dan Minangkabau tidak dan atau belum sejajar dengan usaha perekonomian yang dimiliki oleh kelompok etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Dengan proyeksi sensus penduduk etnis Tionghoa di tahun 2023 semisal dari 75 juta jiwa dari 2,1% adalah 1.575.000. Jumlah ini adalah proyeksi dari peneliti sendiri berdasarkan persentasen BPS sejak tahun 2000 dimana proyeksi ini menurut hemat peneliti tidak berubah jauh dari persentase sensus tahun 2000. Jika ditambahkan dengan jumlah sensus tahun 2000 sebesar 4.222.936 dengan proyeksi peneliti 1.575.000 adalah sebesar 5.797.936 juta jiwa.

Proses identifikasi diri yang bersifat politik telah membawa perubahan identitas orang Tionghoa di Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh aspek sosiologis, yaitu bahwa keturunan imigran Tionghoa telah mengalami transisi identitas dari orang Tionghoa menjadi etnis Tionghoa walaupun jiwa dan raganya atau tipologisnya masih sama dengan tipologis Tionghoa daratan sebagai negeri leluhurnya (orientasi leluhur). Namun, secara yuridis tentang kewarganegaraan Indonesia, etnis Tionghoa merupakan warga negara Indonesia yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan (bagian integral) dari aspek politik dalam sistem keanekaragaman

kebangsaan Indonesia.<sup>18</sup> Proses identifikasi tersebut menjadikan etnis Tionghoa kemudian mengalami pembauran dalam sistem sosiologis masyarakat Indonesia walau tidak jarang penduduk lokal masih memandang sebelah mata lantaran etnis Tionghoa menjadi penguasa ekonomi nasional sejak lama bahkan sejak bangsa ini berdiri, terlebih sejak awal kemerdekaan Indonesia dan era Orde Lama (Orla), banyak warga kelompok etnis Tionghoa yang terlibat dalam politik kelembagaan dengan menjadi anggota kabinet seperti komposisi di bawah ini:

**Tabel 1.1.2**

Warga Kelompok Etnis Tionghoa Indonesia yang Terlibat dalam Politik Pada Era Awal Kemerdekaan hingga Era Orde Lama 1946-1966

No.	Nama Menteri	Nama Jabatan	Masa Pemerintahan	Masa Kabinet
1.	dr. Darma Setiawan	Menteri Kesehatan	Kabinet Syahrir Kedua	12 Maret 1946 s.d. 2 oktober 1946
2.	dr. Darma Setiawan	Menteri Kesehatan	Kabinet Syahrir Ketiga	2 oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947
3.	Mr. Tan Po Gwan	Menteri Negara	Kabinet Syahrir Ketiga	2 Oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947
4.	Siauw Giok Tjhan	Menteri Negara	Kabinet Amir Syarifuddin Kedua	3 Juli 1947 s.d. 11 November 1947
5.	dr. Ong Eng Die	Menteri Muda Keuangan	Kabinet Amir Syarifuddin Kedua	11 November 1947 s.d. 29 Januari 1948
6.	Siauw Giok Tjhan	Menteri Urusan Peternakan	Kabinet Amir Syarifuddin Kedua	11 November 1947 s.d. 29 Januari 1948
7.	dr. Ong Eng Die	Menteri Keuangan	Kabinet Ali Sastro Amidjojo Kesatu	1 Agustus 1953 s.d. 12 Agustus 1955
8.	dr. Mohammad Ali alias dr. Lie Kiap Peng	Menteri Kesehatan	Kabinet Ali Sastro Amidjojo Kesatu	9 Oktober 1953 s.d. 12 Agustus 1955
9.	Oei Tjoe Tat, S.H	Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja	Kabinet Kerja <i>regrouping</i> Kedua	13 November 1963 s.d. 27 Juni 1964
10.	Oei Tjoe Tat, S.H	Menteri Negara diperbantukan	Kabinet Dwikora	27 Agustus 1964 s.d. 21 Februari 1966

<sup>18</sup> Ibid, Hal. 12

		pada Presidium Kabinet Kerja		
11.	David Gie Cheng	Menteri Cipta Karya dan Konstruksi	Kabinet Dwikora	27 Agustus 1964 s.d. 21 Februari 1966
12.	David Gie Cheng	Menteri Cipta Karya dan Konstruksi	Kabinet Dwikora disempurnakan	21 Februari 1966 s.d. 27 Maret 1966

Sumber data : Satiarso T. Taruna, Susunan Kabinet Republik Indonesia dari Tahun 1945-1973, diterbitkan oleh Yayasan Penelitian Masalah-masalah Asia (Institute of Asian Studies), Jakarta, 1973.<sup>19</sup>

Dari gambaran tabel di atas, menjelaskan bahwa etnis Tionghoa yang pernah terlibat dalam politik baik berlatar belakang perseorangan, profesional, organisasi kemasyarakatan maupun dari partai politik mereka diberikan peran dalam pemerintahan era Orde Lama yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno.

Anggapan bahwa kedekatan Presiden Soekarno dengan etnis Tionghoa di era Orde Lama atau awal kemerdekaan bahkan Presiden Soekarno pernah memberikan izin pada etnis Tionghoa untuk merayakan hari besar keagamaan seperti tahun baru Imlek, tahun baru Tionghoa dan menerapkannya sebagai hari libur resmi. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa difasilitasinya warga etnis Tionghoa di era Orde Lama juga menegaskan bahwa mereka juga mempunyai kualifikasi dan mampu diberi peran politik pada era Presiden Soekarno.

Selama era Orde Baru, yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, kelompok etnis Tionghoa terkekang keras pada aspek politik dan aspek budaya. Pada aspek politik, pemerintah Orde Baru mengeluarkan

---

<sup>19</sup> Yayasan Penelitian Masalah-masalah Asia saat itu diketuai oleh W.D Sukisman dan Tb. Ganjar Angka Wijaya sebagai sekretaris ; dalam M.D. Laode, *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik; Politik Etnis Cina Pontianak dan Sngkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Yayasan Pustidaka Obor Indonesia, 2012, Hal.12-13.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan Komunisme dan Marxisme Leninisme karena dianggap sebagai bahaya laten bagi ketahanan nasional. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia yang disingkat Baperki yang diketuai oleh Siauw Giok Thjan, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara era Presiden Soekarno selama dua periode pada kabinet Amir Syafruddin, organisasi kemasyarakatan milik kelompok etnis Tionghoa dianggap berhaluan Komunisme RRC (Republik Rakyat Tionghoa), langsung menghentikan kreatifitas politiknya.

Meskipun masih terdapat warga kelompok etnis Tionghoa yang terlibat dalam politik, keterlibatan mereka tidak menonjol melalui sikap atau perbuatan. Mereka itu, antara lain, adalah Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, dari kelompok *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), Kwik Kian Gie dari PDI, serta Anton Priyatno dan Djoko Sudjatmiko dari Golkar.<sup>20</sup> Haluan Komunisme yang ditengarai oleh Baperki tersebut merupakan perwakilan dari organisasi Tionghoa yang tujuannya antara lain adalah untuk menggalang kekuatan dan kesatuan kelompok etnis Tionghoa di seluruh Indonesia.

Kelanjutan pengaruh efektif Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 langsung “menghancurkan” simpul kekuatan massa Komunisme-Marxisme-Leninisme dalam komunitas kelompok etnis Tionghoa di Seluruh Indonesia. Ketetapan MPRS itu berlaku di seluruh

---

<sup>20</sup> Ibid, Hal. 13

wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga saat ini karena ideologi Komunisme-Marxisme-Leninisme tidak pernah mati.

Dengan kata lain, sewaktu-waktu ideologi tersebut dapat muncul kembali di Indonesia. Hal itu mengingat bahwa dewasa ini yang runtuh adalah organisasi Komunisme-Marxisme-Leninisme, bukan ideologi Komunisme-Marxisme-Leninisme, sedangkan ideologi Komunisme-Marxisme masih aktif dengan menggunakan strategi adaptif ke dalam ideologi Liberalisme-Kapitalisme.

Jadi, Komunisme-Marxisme-Leninisme tampil bermuka demokrasi dan berjiwa Komunisme-Marxisme-Leninisme.<sup>21</sup> Pengaruh tersebut membawa dampak yang sangat signifikan sehingga perubahan politik pada saat itu memberikan peringatan keras pada etnis Tionghoa di seluruh Indonesia dimana hal tersebut menjadikan stabilitas politik menjadi tidak tentu dikarenakan stabilitas negara yang telah kacau karena kudeta komunis melalui Gerakan 30 September 1965 yang bahkan sampai saat ini menjadi isu yang selalu muncul dalam praktek-praktek perpolitikan seperti pemilu, pilkada maupun pilpres.

Menarik untuk dicatat, bahwa para konglomerasi yang menguasai kepentingan ekonomi nasional di Indonesia sejak lama terlihat dominasinya, bahwasanya etnis Tionghoa yang juga merupakan kelas 2 di

---

<sup>21</sup> Ibid.

Indonesia sejak dulu bahkan sampai sekarang memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi sistem perekonomian nasional hari ini.

Terlihat sampai hari ini kepemilikan dari berkembangnya konglomerasi dari kelompok bisnis, elite yang mereka kuasai baik elite lokal maupun elite Tionghoa seperti TV nasional, daerah, dominasi terhadap siaran Radio, percetakan seperti surat kabar dan majalah atau tabloid sampai dengan informasi digital seperti media online dan kepunyaan dari bisnis lain seperti bisnis teknologi informasi, distribusi, otomotif, properti, rumah sakit, pendidikan, perbankan dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1.3**  
Konglomerasi Elit Lokal dan Tionghoa di Indonesia

Media Group	Group Leader	TV Stations		Radio stations	Print		Online Media	Other Busines
		National	Other		News papers	Magazines/ Tabloids		
<b>Media Nusantara Citra (MNC) Group</b>	Hary Tanoesoedibjo	RCTI, Global TV, MNCTV (ex TPI)	Indovision, Sky Vision, SINDOtv network	Sindo Radio (Trijaya FM), Radio Dangdut, ARH Global Radio	<i>Seputar Indonesia</i> (Koran Sindo)	<i>High End magz, Genie, Mom &amp; Kiddie</i> tabloids	Okezone.com seputarindonesia.com, sindonews.com	IT, content production and distributions, talent management, automobil
<b>Mahaka Media Group</b>	Erick Tohir	—	Jak TV, Alif TV	JakFM, Prambors FM, Delta FM, Female, Gen FM	<i>Republika, Harian Indonesia</i> (in Mandarin)	<i>Parents Indonesia, A+, Golf Digest, Area</i> , magazines	Republika Online, rileks.com, rajakarcis.com	Entertainment, outdoor advertisement
<b>Kompas Gramedia Group</b>	Jakob Oetama, Agung Adiprasetyo	—	Kompas TV network	Sonora Radio network, Otomotion Radio, Motion FM, Eltira FM	<i>Kompas, Jakarta Post, Warta Kota</i> , + other 11 local papers	<i>Intisari</i> + 43 magazines & tabloids, 5 book publishers	Kompas CyberMedia	Hotels, public relation agencies, university & telecommunication tower (in plan)
<b>Jawa Pos Group</b>	Dahlan Iskan	—	JPMC network	Fajar FM (Makassar)	<i>Jawa Pos, Indo Pos Rakyat Merdeka, Radar</i> + others (total: 151)	<i>Mentari, Liberty</i> magazines + 11 tabloids	Jawa Pos Digital Edition	Travel bureau, powerplant
<b>Media Bali Post Group (KMB)</b>	Satria Narada	—	Bali TV network, Jogja TV, Semarang TV, Sriwijaya TV, + others (total: 9)	Global Kini Jani, Genta FM, Global FM, Lombok FM, Fajar FM, Suara Besakih, Singaraja FM, Nagara FM	<i>Bali Post, Bisnis Bali, Suluh Indonesia, Harian Denpasar, &amp; Suara NTB</i>	<i>Tokoh, Lintang, &amp; Wiyata Mandala</i> tabloids	Bali Post, Bisnis Bali	—
<b>Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Group</b>	Eddy Kusnadi Sariaatmadja	SCTV, Indosiar	O'Channel, ElShinta TV	Elshinta FM	—	<i>Elshinta, Gaul, Story, Kort, Mamamia</i>	—	Wireless broadband, pay TV, telecommunications, banking, IT solutions, production house
<b>Lippo Group</b>	James Riady	—	First Media, Berita Satu TV	—	<i>Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan</i>	<i>Investor, Globe Asia, &amp; Campus Asia</i> magazines	Jakarta Globe Online	Property, hospital, education, insurance

<b>Bakrie &amp; Brothers(Visi Media Asia)</b>	Anindya Bakrie	Antv, TVOne	Channel [V]	—	—	—	VIVA news	Telecommunication s, property, metal, oil & gas agribusiness, coal, physical infrastructure
<b>Femina Group</b>	PiaAlisyabana, MirtaKartohadiprodjo	—	—	U-FM Jakarta & Bandung	—	<i>Femina, Gadis, Dewi, Ayahbunda + others (total:15)</i>	Femina, GitaCinta, Ayahbunda, Gadis, Parenting Online	Production house, eventmanagement, boutique, education, printing
<b>Media Group</b>	Surya Paloh	Metro TV	—	—	<i>Media Indonesia, Lampung Post, BorneoNews</i>	—	Media Indonesia Online	—
<b>Mugi Reka Abadi (MRA) Group</b>	Dian Muljani Soedarjo	—	O'Channel	Cosmopolitan FM, Hard Rock FM, I-Radio, Trax FM	—	<i>Cosmopolitan, Cosmogirl, Fitness + others (total: 16)</i>	—	Holder of several international boutique brands
<b>Trans Corporat(Para Group)</b>	Chairul Tanjung	Trans TV, Trans7	—	—	—	—	Detik Online	Banking, venture capital, insurance, theme parks, resort, retail, cinema

Sumber data : Merlyna Lym, Participatory Media Lab Arizona State University Tempe, Arizona United States & The Ford Foundation<sup>22</sup>

Tabel di atas untuk memberi gambaran bagaimana kekuatan para kelompok etnis tergambar jelas dalam hasil penelitian Merlyna Lim dengan memberi julukan sebagai “*The League of Thirteen*” atau liga tiga belas bagaimana media di Indonesia terkonsentrasi oleh kelompok atau liga mereka sehingga bagaimana mengidentifikasi mereka sebagai elite lokal atau Tionghoa baik mereka yang muncul sesudah bangkitnya Orde Baru dengan menjalin kerja sama dengan elite lokal sehingga perkembangan bisnis mereka berkembang menjadi Perusahaan Multinasional atau yang sering kita baca dengan sebutan *Multinational Corporations* (MNCs) dengan pengaruh yang melampaui sektor media.

Penjelasan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kepemilikan media terkonsentrasi pada beberapa orang atau kelompok yang tidak hanya menguasai satu jenis media, akan tetapi mereka membangun

<sup>22</sup> Lim, M. 2012. *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Research report. Tempe, AZ: Participatory Media Lab at Arizona State University. Available online at: [http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim\\_IndoMediaOwnership\\_2012.pdf](http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim_IndoMediaOwnership_2012.pdf).

jaringan kepemilikan lintas proyek seperti televisi, radio, media cetak hingga media jaringan yang tentunya berkaitan dengan kepentingan bisnis di luar sektor media seperti bisnis perbankan, properti, energi, pendidikan dan infrastruktur. Skema konglomerasi seperti ini menunjukkan bahwa arus informasi berada di bawah kendali ekonomi dan politik sekelompok elite sehingga media atau saluran komunikasi tidak hanya bermain pada publik tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan modal dan kekuasaan.

Tokoh-tokoh seperti Harry Tanoesoedibjo, Surya Paloh, James Riady, Chairul Tanjung dan Eric Thohir menegaskan bahwa adanya hubungan erat antara bisnis media dan arena politik nasional bahkan mereka adalah actor sekaligus tokoh nasional yang juga membentuk partai politik dan sekaligus menduduki jabatan publik, hal tersebut inilah yang merupakan fenomena dari praktik kapitalisme semu Yoshihara Kunio di mana perkembangan kapitalisme tidak tumbuh dari dinamika borjuasi nasional saja melainkan kolaborasi antara pengusaha yang saling menopang dalam sistem patronase politik.

Pada konteks penelitian ini, tabel tersebut di atas menjadi landasan dan cerminan pola relasi ekonomi politik yang juga ditemukan di tingkat lokal seperti di Kota Makassar. Hubungan antara elite Tionghoa dan elit lokal di daerah memainkan peran penting dalam menentukan arah distribusi modal, aliansi politik sampai dengan strategi pembangunan. Maka daripada itu struktur konglomerasi media nasional ini bukan hanya fenomena

ekonomi tetapi juga mencerminkan konfigurasi kekuasaan yang membentuk wajah kapitalisme baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dari konteks penelitian ini menjadi penting secara akademik karena memberikan tawaran dan memeriksa konfigurasi elite yang sering kali luput dari perhatian seperti peran elite lokal dan Tionghoa dalam kapitalisme lokal di kota Makassar yang belum banyak disentuh secara mendalam, padahal interaksi keduanya berperan besar dalam menentukan pola distribusi modal, pertalian politik dan arah pembangunan. Dengan fokus pada dua kelompok elite ini, penelitian ini membuka ruang baru dalam hubungan etnisitas, ekonomi dan politik.

Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran tentang demokrasi lokal pascarezim otoritarianisme tidak serta merta membebaskan ruang politik dari cengkeraman oligarki, justru demokrasi elektoral yang berbiaya besar sehingga mendorong munculnya patronase baru dan memperkuat kapitalisme rente. Hal ini menyebabkan penelitian ini akan menjelaskan kenapa proses demokratisasi di Indonesia berjalan berdampingan dengan menguatnya praktik rente dan konsentrasi kekayaan di sekelompok elite yang mempunyai hubungan dari pusat ke lokal.

Relevansi penelitian ini menjadi fakta empiris ketika memberikan perbandingan antara rezim Syahrul Yasin Limpo (2008-2018) dan rezim keluarga Amran Sulaiman (2018-2023). Dua rezim ini memperlihatkan kesinambungan pola kapitalisme, meski dengan figur elite yang berbeda. Peralihan rezim dan kecenderungannya ternyata tidak mengubah praktik

dasar kapitalisme lokal, melainkan menggeser aliansi elite dan mengokohkan hegemoni oligarki dengan wajah yang baru.

Dalam pemetaannya kapitalisme dan praktiknya di bawah dua rezim keluarga tersebut, penelitian ini memberikan bukti bahwa demokrasi elektoral di Sulawesi Selatan terkhusus kota Makassar sering kali memberikan penguatan jaringan kepada oligarki sehingga terkesan berfungsi sebagai media baru untuk akumulasi modal. Dalam perkembangannya bukan hanya untuk memahami konteks lokal namun juga untuk menambahkan wacana dan kajian tentang bagaimana demokrasi pascarezim otoritarianisme Indonesia bekerja dalam praktik dan perlakuannya.

Sebagai kota yang menempati posisi yang strategis dalam perekonomian Kawasan Timur Indonesia, dengan Pelabuhan besar, bandara internasional serta akses darat dan laut yang baik, Makassar tumbuh sebagai pusat perdagangan jasa dan logistik yang besar. Namun ketimpangan sosial antar wilayah dan tekanan terhadap ruang kota akibat pesatnya Pembangunan juga terlihat.

Makassar mencerminkan pola ekonomi perkotaan yang dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah daerah dan kelompok pebisnis lokal. Sejak masa desentralisasi, otonomi daerah memberikan ruang bagi kelas elite politik untuk memainkan peran besar dalam menentukan arah investasi dan tata ruang kota seperti misalnya banyak proyek Pembangunan mulai dari Kawasan bisnis, hotel hingga perumahan elite terjadi melalui hubungan Kerjasama antara pemerintah dan pengusaha. Di satu sisi, hal ini

mempercepat pertumbuhan kota namun di sisi lain memperkuat munculnya koalisi kekuasaan lokal yang menggabungkan kepentingan ekonomi dan politik. Akibatnya, kebijakan publik pada pengambilan keputusannya lebih sering berpihak pada kepentingan investor, pengusaha ketimbang kebutuhan publik yang prioritas.

Fenomena ini terlihat jelas dalam keseharian masyarakat kota Makassar, mereka melihat pertumbuhan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan dan perumahan mewah perkotaan yang terus meningkat sementara ruang terbuka hijau dan permukiman rakyat justru terdesak ke pinggiran kota. Harga tanah terlalu tinggi di semua kawasan strategis seperti kecamatan Tamalanrea, Panakkukang, Tallo dan lain-lain. Pembangunan berskala besar ini menciptakan kesenjangan antara kelompok menengah atas dan masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak warga yang bekerja di sektor informal terpaksa menjauh dan tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota karena tidak mampu menanggung biaya hidup di daerah urban. Situasi dan fenomena ini merupakan dampak dari kapitalisme perkotaan yang dijalankan dengan logika pasar dan bukan dengan orientasi kesejahteraan sosial.

Dinamika politik lokal di Makassar cukup terbilang dinamis, lantaran kontestasi antara kelompok birokrat, pengusaha dan tokoh masyarakat mencerminkan perubahan wajah politik pascareformasi. Berjalan beriringan antara pemilihan kepala daerah secara langsung juga keterlibatan politik uang dan patronase yang banyak membuat pengusaha terjun ke politik dan membiayai calon kepala daerah dengan keuntungan mendapatkan izin

proyek dan kelangsungan izin usaha. Keuntungan ekonomi politik seperti ini seringkali ditentukan oleh kedekatan dengan sirkulasi kekuasaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menjelaskan lebih lanjut tentang kebijakan publik dan pembangunan daerah yang sering kali lebih mengutamakan kepentingan aliansi elite daripada kebutuhan masyarakat luas. Aliansi bisnis dan politik mempengaruhi dalam pemberian izin, ekspansi properti dan distribusi program sosial yang pada ujungnya menggeser ruang publik menjadi ruang komersial. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi di kota Makassar tetap tinggi meskipun demokrasi telah berjalan lebih dari dua dekade.

Urgensi dalam penelitian ini jika dihubungkan dengan konteks kota Makassar sebagai pintu Kawasan Timur Indonesia, memperlihatkan pola bahwa wacana ini bukan sekedar persoalan lokal yang biasa namun menjadi cerminan kapitalisme di wilayah Indonesia yang lain sehingga peneliti menjadikan bahan refleksi yang serius terhadap dinamika kapitalisme pascarezim otoritarianisme.

Dalam penelitian ini, memberikan peta jaringan sosial, ekonomi dan politik di Kota Makassar sehingga dapat memungkinkan digunakan oleh peneliti lain, pengambil kebijakan maupun organisasi masyarakat sipil untuk membaca relasi kuasa yang bekerja. Pada akhirnya penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan dalam literatur dan memberi sumbangan teoritis dengan menghubungkan kapitalisme ersatz dan rentier sekaligus memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana elite lokal dalam membentuk konfigurasi kapitalisme di Kota Makassar dengan

menekankan dimensi historis, kontemporer dan praktis sehingga tidak hanya relevan bagi dunia akademik tetapi juga kepada masyarakat luas tentang demokrasi elektoral yang belum sepenuhnya menjawab persoalan tentang ekonomi dan politik kekuasaan di Indonesia khususnya di Kota Makassar.

## **1.2. Pokok Masalah**

Kapitalisme selalu berkaitan dengan politik. Sejarawan Belanda Leonard Blusse mengatakan “hanya individu-individu yang menggantungkan nasibnya kepada VOC atau mereka yang merampok dari dalam yang mampu mengumpulkan kekayaan. Keadaan seperti itu terdapat di semua negara dalam sejarah Indonesia, baik sejarah kolonial, tradisional maupun nasional. Orang Belanda sadar bahwa mereka dan orang Tionghoa tidak mempunyai kepentingan yang sama, tetapi hanya “kepentingan yang serupa”.

Karena itu kadang-kadang orang Belanda menganggap orang Tionghoa sebagai saingan, seperti yang dilakukan oleh penguasa tradisional kalau mereka ingin mendominasi ekonomi dengan kekuatan politik.<sup>23</sup> Ragam kapitalisme sejak era kolonial tersebut memberikan perhatian bahwasanya kapitalisme dan masalah politik merupakan imajinatif dan inovatif sehingga menjadi spekulasi tersendiri dalam perkembangan mata rantai perekonomian Indonesia. Tentu segala macam

---

<sup>23</sup> Onghokham, *Migrasi Cina, Kapitalisme Cina dan Anti Cina*. (Depok; Komunitas Bambu, 2017) Hal. 85

kontrak yang menguntungkan menjadikan para kapitalis sejak era kolonial turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional hingga saat ini.

Karir bisnis, konglomerasi sampai sekarang sehingga elite bisnis tersebut juga mendapat perlakuan atau perhatian oleh pemerintah sehingga kita melihat ada kuasa patron dan klien dalam memperluas atau mengamankan organisasi dan kepentingan bisnisnya sehingga rasionalisasi bisnis mereka semakin besar dan kuat dalam menopang perekonomian dan terutama dominasi kapital terhadap posisi rezim yang berkuasa tentu juga sangat berpengaruh dalam kekuatan dan masalah politik seperti kecurigaan Soekarno pada masa Orde Lama perusahaan mereka diambil alih dengan dalih perusahaan mereka melakukan kejahatan ekonomi.

Hanya di Hindia Belanda inilah orang Tionghoa dipandang dengan penuh curiga. Di Koloni Inggris dan Prancis, sebaliknya kecurigaan terhadap pedagang Tionghoa relatif kecil sekali. Juga dalam masa setelah perang, kecurigaan ini tidak menurun, bahkan kadang-kadang makin memburuk pada masa Indonesia Merdeka. Di dalam masyarakat tradisional petani Jawa, para pedagang Tionghoa masih dianggap rendah.<sup>24</sup>

Kecenderungan terhadap etnis tertentu di Kota Makassar termasuk kepada etnis Tionghoa bahkan sampai sekarang pandangan kecurigaan tersebut masih berlaku lantaran dominasi ekonomi oleh etnis tersebut telah menjadi alasan bagi penduduk lokal untuk curiga dengan hak kepemilikan

---

<sup>24</sup> Ibid.

sumber daya material yang dimiliki oleh etnis Tionghoa sejak dulu, bahkan menjadi elite dalam wilayah pasar kontemporer publik terhadap keseharian misalnya dominasi wilayah geografis dan wilayah strategis dengan menguasai produksi, perdagangan, dan industri lainnya dimana penduduk lokal yang terlihat menjadi pekerja terhadap proses produksi etnis Tionghoa.

Dampak sosial dan politik terhadap modal dan kepemilikan antara etnis Tionghoa dan elit lokal sendiri menjadi pembeda dimana kepemilikan kapitalisasi oleh etnis Tionghoa merupakan bagian dari sejarah kapitalisme tersendiri di Kota Makassar dan mempengaruhi Kabupaten Kota lainnya sehingga melalui transformasi ekonomi yang dimana kepemilikan material tersebut menjadi investasi domestik, hal itu yang kemudian memberi mereka kekuatan terhadap simbolisasi perekonomian dan praktik perekonomian lokal. Perbedaan terhadap penduduk lokal dalam hal ini sangat timpang karena umumnya mereka tidak dapat mengembangkan pola perekonomian semisal keinginan menjadikan perdagangan sebagai kualitas kehidupan dan investasi berikut produktivitas komoditas.

Transformasi politik perekonomian seperti ini pun memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan politik di pusat sampai di kota Makassar. Dikarenakan segala macam bentuk aktifitas ekonomi tersebut mengarah kepada distribusi barang dan jasa yang memungkinkan hal tersebut menjadi pola komunikasi antara pimpinan daerah dan para pengusaha politik menjadi dekat.

Penelitian tentang transfigurasi kapitalisme di Kota Makassar masih sangat minim untuk dijadikan referensi karena kajian tentang kapitalisme di dominasi oleh kajian dalam skala nasional, padahal menurut peneliti dinamika di daerah lain seperti dalam fokus penelitian ini di kota Makassar juga menyimpan fakta empiris dan juga merupakan pusat dari kajian kapitalisme yang berkembang dan tidak kalah penting.

Kota Makassar telah lama menjadi pusat perdagangan dan basis kekuasaan nasional sehingga menjadi laboratorium politik dan kekuasaan di Kawasan Timur Indonesia. Dengan meneliti di kota Makassar, hal yang paling mendasar adalah untuk melihat sepak terjang kapitalisme lokal yang dalam konfigurasinya diwakili dari elit lokal dan elit Tionghoa berdasarkan perkembangan kota Makassar pascarezim otoritarianisme yang memunculkan kelompok kaya maupun oligarki lokal pada tataran bisnis dan politik.

Oligarki lokal terbentuk melalui pertalian elite bisnis, institusi dan birokrasi menjadi sangat kuat untuk meneliti dan membaca ulang politik lokal di Kota Makassar. Dikarenakan pada level teoritis, oligarki tidak pernah berdiri sendiri sebagai kelompok kaya yang berkuasa melainkan kemunculan mereka adalah dari hubungan yang berulang dan saling menguntungkan antara pemilik modal, Lembaga-lembaga kunci seperti partai politik, organisasi massa, lembaga pendidikan, asosiasi pengusaha dan juga media serta birokrasi dalam pemerintahan. Di Kota Makassar, relasi seperti ini tampak dalam pola praktik pengusaha besar membutuhkan akses regulasi, proyek dan perizinan sementara birokrat dan politisi

membutuhkan dukungan finansial, jaringan dan legitimasi sosial. Pertemuan kepentingan inilah yang peneliti maksud sebagai lingkaran kekuasaan yang makin sempit, mengecil dan tertutup pada relasi itu.

Makassar sebagai kota jasa, perdagangan, industri membuat peran elite bisnis sangat menonjol, terutama di sektor properti, infrastruktur, pusat perbelanjaan dan jasa logistik dikarenakan Makassar juga mempunyai pelabuhan dan bandara penerbangan internasional. Beberapa kebijakan tata ruang, proyek jalan, reklamasi yang bermasalah hingga kini, pengembangan Kawasan komersial tidak bisa dilepaskan dari kepentingan pemilik modal yang mempunyai kedekatan dengan pembuat kebijakan. Padahal di sisi lain, institusi seperti partai politik dan DPRD menjadi arena penting untuk mengalokasikan regulasi yang lebih pro kepada investasi dan dalam banyak kasus malah membuka celah dan peluang rente bagi kelompok tertentu.

Sejalan dengan praktik tersebut, birokrasi kemudian berperan sebagai pelaksana yang memastikan kebijakan tersebut berjalan, tetapi pada saat yang sama sering terikat pada jaringan loyalitas dan patronase. Pada titik inilah, pertalian antara bisnis-institusi-birokrasi di Kota Makassar bukan hanya sebagai hubungan biasa, namun menjadi infrastruktur politik dari oligarki lokal.

Pembangunan di Kota Makassar tidak hanya sebatas slogan politik para aktor pada saat kampanye dengan menyebutnya sebagai “kota dunia”, atau “megapolitan” akan tetapi hal tersebut menjadi bagian daripada hasil dari kompromi politik di dalam lingkaran atau sirkulasi oligarki tersebut.

Peneliti dalam hal ini juga akan mengurai dan menyoal pertalian para actor dan elit yang terbentuk melalui kekerabatan, etnisitas, jaringan ormas, aliansi dan juga sejarah dagang perkotaan yang turut mempengaruhi pada level pengambilan kebijakan yang lebih sering menguntungkan investor dibandingkan kebutuhan warga perkotaan seperti akses tanah pada Lokasi strategis dikuasai kelompok tertentu yang punya hubungan dekat dengan investor sehingga Kota Makassar yang terbaca bukan hanya sebagai ruang fisik perkotaan namun sebagai ruang kuasa yang dikontrol dan dikendalikan oleh segelintir aktor yang bergerak pada sirkulasi bisnis, institusi dan birokrasi.

Untuk literatur yang peneliti gunakan sebagai dasar ekonomi politik ada dua konsep besar yang peneliti gunakan untuk membaca perihal kapitalisme yaitu kapitalisme ersatz (Yoshihara Kunio) dan kapitalisme rentier (Thomas Piketty). Namun, sangat jarang peneliti menemukan ada penelitian yang mencoba menghubungkan kedua konsep ini secara simultan ke dalam konteks lokal Indonesia khususnya di kota Makassar. Penelitian ini penting karena memberikan jembatan teoritik baru tentang bagaimana transisi dari kapitalisme semu/ersatz ke kapitalisme rentier yang dapat dipetakan pada level provinsi dan kabupaten dengan kota Makassar sebagai kasus utama.

Dari uraian di atas, maka masalah pokok dalam studi ini adalah apakah elit Tionghoa dan Elit Lokal membentuk kapitalisme lokal melalui pertukaran antara elit bisnis dan institusi politik serta pertukaran kepentingan diantara keduanya. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti

melalui pokok masalah tersebut memberikan batasan dan penegasan untuk mengembangkan rumusan masalah dengan konten konfigurasi dan praktik kapitalisme yang mendukung pola ekonomi politik di kota Makassar yang berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan dan pergantian kekuasaan sehingga memperlihatkan dinamika relasi kuasa antara kelompok elite, baik dalam persaingan maupun dalam bentuk aliansi strategis.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dari gambaran latar belakang di atas, peneliti mencoba untuk memberikan cakupan dan pembahasan tentang kuasa elite lokal dan kapitalis yang membawa pengaruh signifikan dan sangat besar bagi berkembangnya studi tentang ekonomi politik dan sistem politik yang ada di Indonesia, khususnya yang terjadi di kota Makassar sebagai kota metropolitan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai kota terbesar ke empat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Kota Makassar juga adalah sebagai kota dengan pusat perdagangan, jasa, pusat kegiatan industri, pusat pemerintahan maupun pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Selatan di mana semua itu adalah proses terjadinya relasi kuasa, praktik kekuasaan, pengelolaan kepentingan yang kemudian mejadi operasi kapitalis dan kegiatan politik aktif berpengaruh pada sumber daya materil dalam pusran ekonomi politik.

Transfigurasi politik atau perubahan politik pada saat ini peneliti tandai sebagai sebuah aktivitas politik yang bersistem dan terpengaruhi oleh berbagai macam bentuk dan model spekulasi, kelompok, komunitas bahkan sistem politik itu sendiri yang berada dalam kekuasaan partai politik dan atau mereka yang berada pada lingkaran spekulasi dan mempunyai pengaruh yang besar untuk merubah beberapa hal dasar dalam penentuan dan ketetapan di dalam merumuskan undang-undang dan sejenisnya seperti yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Peneliti kemudian memberi konsentrasi pada rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana elite Tionghoa dan elite lokal membentuk konfigurasi kapitalisme lokal pasca Otoritarian di Kota Makassar.
2. Bagaimana oligarki lokal terbentuk melalui pertalian antara elite bisnis dengan institusi politik dan birokrasi.
3. Bagaimana pertukaran kepentingan antara kapitalisme elite Tionghoa dengan elite lokal memproduksi kekuasaan.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang relevan dan bisa dipertimbangkan adalah:

- 1.4.1 Mengidentifikasi dan menganalisis dinamika elite Tionghoa dan elite lokal membentuk konfigurasi kapitalisme lokal pasca Otoritarian di Kota Makassar.

- 1.4.2 Menganalisis oligarki lokal terbentuk melalui pertalian antara elite bisnis dengan institusi politik dan birokrasi.
- 1.4.3 Menganalisis pertukaran kepentingan antara kapitalisme elite Tionghoa dengan elite lokal memproduksi kekuasaan di Kota Makassar.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.5.1 Memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan tentang perkembangan dan fenomena fakta bagaimana kapitalisme perkotaan bekerja yang kemudian memiliki struktur sosial dan perlakuan etnis yang begitu kompleks sehingga mengalami bentuk pertukaran atau substitusi yang silih berganti terjadi berdasarkan momen politik, budaya atau ekonomi politik.
- 1.5.2 Disertasi ini memberikan dan membuat pemetaan jaringan sosial, ekonomi dan politik yang dibentuk oleh kelompok elite sebagaimana kelompok elite tersebut mempengaruhi akses terhadap sumber daya material dan segala perlakuan politik seperti kepentingan dan pengambilan keputusan.
- 1.5.3 Penelitian ini dapat membantu kesadaran publik mengenai kompleksitas hubungan ekonomi politik dan etnisitas tersaji dalam waktu yang cukup lama sehingga melahirkan stereotype dan prasangka masa lalu sebagai bagian dari sejarah kota yang mengalami konflik identitas.

1.5.4 Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman publik secara praktis tentang bagaimana memitigasi dampak dari kapitalisme seperti adanya konsentrasi kekayaan yang berlebihan dari kelompok, etnis, grup, keluarga dalam skop ekonomi politik perkotaan.

## **1.6. Kerangka Teoritik**

Adapun kerangka teoritik dari penelitian disertasi ini sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

### **1.6.1 Paradigma Ekonomi Politik**

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan paradigma ekonomi politik sebagai payung besar untuk memperkuat analisis mengenai studi kapitalisme di kota Makassar seperti interaksi antara kekuasaan politik, struktur ekonomi dan proses perubahan sosial yang melibatkan dua entitas besar kelompok elite strategis yaitu elite lokal dan Elite Tionghoa dalam melihat distribusi kekayaan dan akumulasi modal dalam praktik ekonomi politik dan jaringan kekuasaan yang juga turut mempengaruhi dan membentuk kecenderungan publik terhadap dominasi mereka yang turut dalam sirkulasi dan dinamika demokrasi elektoral sampai kekuasaan.

Paradigma ekonomi politik yang peneliti gunakan juga diperkuat dengan pendekatan regulasi atau kebijakan publik bagaimana negara berperan melalui sistem institusionalisasi yang juga turut membentuk kekuatan ekonomi lokal yang juga melahirkan kapitalisme lokal yang di

mana kelompok ini terbantu dengan adanya interaksi institusi dalam regulasi, perizinan dan regulasi lainnya untuk kepentingan jaringan usaha dan proyek investasi sehingga jaringan bisnis dan politik tersebut digunakan untuk mendapatkan konsesi usaha-bisnis yang bisa saja menguntungkan pasar atau lingkungan investasinya.

Relevansi penelitian disertasi ini juga menggunakan paradigma historis di mana kecenderungan atau evolusi dari waktu ke waktu atau peristiwa masa lalu membentuk kondisi yang peneliti fokuskan yaitu pasca rezim otoritarian, sehingga peneliti juga mengumpulkan wacana, kajian dan studi historis untuk membandingkan genealogi, kolonialisme dalam peristiwa sejarah Indonesia yang melibatkan kultur dan etnisitas yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam menyusun draf penelitian ini sehingga memberikan sentuhan dalam melacak perubahan, migrasi sektor ekonomi yang didominasi interaksi antar elite dari masa ke masa bagaimana warisan peristiwa, warisan sejarah, warisan kebijakan mempengaruhi distribusi kekayaan dan menciptakan kelompok baru membentuk koalisi modal atau aliansi sampai tercipta *finance capitalism* antara elite lokal dengan elite Tionghoa dalam geografi politik lokal di kota Makassar.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan untuk mendukung perspektif atau paradigma ekonomi politik sebagai payung besar adalah kualitatif dengan jenis studi kasus yang mempelajari secara mendalam satu kasus atau beberapa kasus baik itu individu, kelompok atau organisasi yang lebih berfokus pada eksplorasi fenomena fakta melalui wawancara dan analisis dokumen yang memungkinkan peneliti mengumpulkan semua data

data di lapangan untuk mendapatkan informasi relevan dari narasumber utama.

Responden kunci yang peneliti temui merupakan tokoh strategis dalam perkembangan kapitalisme di Kota Makassar, berharap bahwa responden yang peneliti temui memberikan sumber informasi yang paling penting, berharga dan pengetahuan mendalam dalam penelitian seperti elite strategis yang mewakili kelompok ilmuan, cendekiawan dan budayawan, dan kelompok elite penguasa yang mewakili para konglomerat, borjuis, oligark dan anggota parlemen dan kepala daerah.

#### **1.6.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai rujukan untuk membahas ekonomi politik di level nasional atau studi etnis Tionghoa secara umum, juga relatif sedikit yang secara spesifik mengulas tentang bentuk perubahan, transformasi atau transfigurasi kapitalisme di kota Makassar pascareformasi atau pascarezim otoritarianisme. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong itu dengan fokus penelitian di kota Makassar serta menekankan pada konfigurasi kuasa, praktik kapitalisme dan bentuk hegemoni yang dihasilkan oleh aliansi elite lokal dan Tionghoa dalam struktur ekonomi politik lokal. Adapun peta penelitian terdahulu yang peneliti coba kumpulkan untuk membandingkan temuan dan ruang kosong adalah sebagai berikut;

**Tabel 1.6.2.1**

**Peta Penelitian Terdahulu tentang Kapitalisme dan Oligarki**

Peneliti/ Peneliti, Tahun	Judul	Temuan
Airlangga Pribadi, 2015	<i>The Politics of Good Governance in Post Authoritarian East Java: Intellectuals and Local Power in Indonesia</i>	Konsolidasi kekuasaan Orde Baru melibatkan kontrol atas kehidupan intelektual melalui de-politisasi, dan deideologisasi adalah bagian dari strategi negara untuk menekan perlawanan dari bawah. Ini menciptakan hubungan antara intelektual dan negara di mana yang pertama menjadi sangat bergantung pada peralatan yang terakhir, dan umumnya terisolasi dari banyak dari sisa masyarakat. Memang, intervensi negara tingkat dalam dalam intelektual dan sosial kehidupan menciptakan proses spesifik inklusi dan eksklusif jenis pengetahuan, yang berkontribusi pada produksi suatu bentuk ideologi arus utama yang melayani kepentingan pemegang kekuasaan negara.
Thomas B. Pepinsky, 2014	Pluralisme dan Perseteruan Politik Indonesia	Bahwa elite penguasa bisa bertahan dalam era demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia dengan memanfaatkan tata kelembagaan baru yang dapat melindungi kepentingan mereka. Sebaliknya, pluralisme kritis justru menggugat kapasitas eksplanatoris kerangka itu. Ketika menelaah beberapa isu utama yang dihadapi para sarjana yang meneliti kekayaan material dan perseteruan politik di Indonesia kontemporer krisis keuangan 1997-1998 diikuti tumbanganya Orde Baru, merebaknya politik uang dan kontinuitas elite disetiap pemilu lokal, eksploitasi sumber daya alam, dan sebagainya saya menunjukkan beberapa keterbatasan pendekatan oligarki sebagai kerangka analisis dan kegunaan pendekatan pluralis kritis.
Robert Van Niel, 2009	Munculnya Elite Modern Indonesia	Yang menjadi tekanan disini adalah mengenai perubahan sosial dalam kurun waktu khususnya perubahan sosial yang terjadi di kalangan kelompok pemimpin dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada kurun itu merupakan suatu bagian dari apa yang disebut masyarakat Hindia Timur. Kedalam masyarakat ini termasuklah semua orang yang tinggal di Kepulauan Indonesia dan, disamping orang Indonesia yang jumlahnya terbanyak, juga orang-orang Eropa (kebanyakan Belanda), Cina dan Arab. Oleh karena bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan politik pada tahun 1949 dan mendirikan negara merdeka, studi ini pun akan dipusatkan pada perkembangan sosial dan politik mereka.

Abdur Rozaki, 2016	Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial	Disertasi ini mengkaji berbagai topik penting, yakni memuat lima persoalan terkait dengan agama, orang kuat lokal, dan oligarki politik, serta upaya perlawanan sosial dalam konteks masyarakat Madura. Lewat tulisannya, Rozaki berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana konstruksi sosial keagamaan Madura dan oligarki politik yang mengakar kuat. Dalam beberapa topik yang dibahas dalam buku ini memuat berbagai topik menarik tentang persinggungan antara budaya keagamaan dengan oligarki politik lokal. Rozaki berupaya melacak dan mendiskusikan tentang persoalan antara agama, budaya, dan orang kuat lokal. Pada bab ini, Rozaki menyebutkan bahwa kondisi alam masyarakat Madura dan konstruksi sosial-budaya orang kuat lokal melahirkan para oligark yang menguasai berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan politik. Dalam hal ini, sosok kiai menempati posisi penting dalam struktur masyarakat Madura.
Burhanuddin Muhtadi, 2020	Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru	Fokus penelitian ini adalah praktik politik uang yang melibatkan politisi dan pemilih dalam pemilu legislatif. Jika menggunakan estimasi paling tinggi, lebih dari sepertiga pemilih pada Pemilu 2019 lalu terpapar praktik jual-beli suara, sehingga menempatkan Indonesia berada di peringkat tiga besar negara yang paling banyak melakukan politik uang di dunia. Politik uang bukan lagi sesuatu yang tabu dalam pemilu dan telah menjadi normalitas baru ( <i>new normal</i> ) dalam pemilu paska-Orde Baru. Desain institusi, terutama sistem proporsional terbuka, terbukti menyumbang maraknya insiden politik uang. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem proporsional terbuka agar praktik politik uang tidak lagi menjadi rutinitas biasa dalam pemilu di Indonesia ke depan
Richard Robinson, 2012	Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia	Studi ini mencakup periode kolonial karena warisan sosial, politik dan ekonomi kolonialisme cukup penting bagi perkembangan kapitalisme pascakolonial. Bagaimana berbedanya kapitalisme Indonesia dewasa ini jika yang menjajah Indonesia adalah Spanyol dan bukan Belanda. Belanda membentuk ekonomi colonial di Indonesia berdasarkan perkebunan luas seperti di Amerika Latin yang secara nasional didominasi oleh kelas tuan tanah yang sangat kuat dan terkonsolidasi. Periode 1949-1965 kebijakan ini juga mendapatkan perhatian karena negara yang kemudian berada di bawah dominasi kaum militer, membangun dirinya sebagai aktor terpenting dalam proses revolusi kapitalis yang muncul dari

		kekosongan pascakolonial, secara politik mereka bebas dari partai-partai yang didasarkan pada kelas.
Charlotte Setiajadi, 2016	<i>Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification</i>	Dalam perdagangan, pengusaha dan bisnis Tionghoa Indonesia merupakan pemain penting dalam hubungan perdagangan Tiongkok-Indonesia, khususnya dalam menjalin hubungan bisnis-ke-bisnis (B2B). Menyadari pentingnya koneksi dan referensi pribadi dalam menjalankan bisnis dengan China, banyak pengusaha Indonesia Tionghoa bergabung dengan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia atau PERPIT), Komunitas Pengusaha Tionghoa Indonesia (Perkumpulan Masyarakat dan Pengusaha Tionghoa Indonesia atau PERMIT), dan Indonesia-China Business Council (ICBC) untuk mendapatkan akses ke jaringan asosiasi ini dengan investor dan/atau mitra bisnis China saat ini dan yang potensial.

Sumber: Olah data peneliti

Gambaran peta penelitian terdahulu di atas menjelaskan tentang posisi antara kapitalisme dan oligarki yang menurut peneliti memberikan gambaran sampai hubungan terkait dari metode untuk memberikan batasan serta temuan yang digunakan peneliti dalam menggambarkan perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian peneliti berdasarkan temuan temuan, fenomena untuk dikerucutkan menjadi basis masalah sampai dengan penelusuran literatur dan fakta lapangan.

### 1.6.3. Konseptual

Pada bagian landasan konseptual, beberapa konsep dalam disertasi atau penelitian ini yang menjadi kunci untuk digunakan selaras dan konsisten untuk tema penelitian “**Transfigurasi Kapitalisme; Evolusi dari Ersatz ke Rentier Studi Ekonomi Politik di Kota Makassar Pascarezim Otoritarianisme Tahun 2007-2017**”, beberapa konsep yang perlu

dijabarkan untuk membingkai dan menjelaskan konseptual sebagai konstruksi berpikir untuk mengarahkan cara pandang peneliti yang sejalan dengan paradigma penelitian dan perspektif adalah:

#### **1.6.3.1. Transfigurasi**

Diksi transfigurasi peneliti masukkan dalam fokus utama dalam kajian penelitian ini disebabkan karena sedari awal peneliti melihat sebagai kata yang sangat jarang digunakan bahkan saat menemukan genealogi dari teori perubahan politik, transfigurasi menjadi salah satu turunan dari teori perubahan politik yang berdefinisi harfiah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perubahan bentuk yang dari Bahasa latin dieja *transfigurare*.

Karena mendapatkan sentuhan dari mashab sosiologis, post-strukturalis, teologi sampai dengan politik akhirnya peneliti menemukan kata transfigurasi digunakan oleh Jean Boudrillard yang berhaluan Post Strukturalis atau Post Modernisme, ia mendefinisikan transfigurasi sebagai sesuatu yang tadinya konkret misalnya tubuh, kekuasaan, realitas sosial ditransformasikan menjadi ikon, citra atau image.

Dalam transfigurasi versi Boudrillard realitas politik tidak lagi tentang keputusan nyata tapi tentang pertunjukan citra seperti pemimpin adalah simbol, merk ataupun tontonan. Sehingga transfigurasi menyebabkan munculnya *hyperreality*: dunia dimana citra dianggap lebih nyata dari kenyataan itu sendiri sehingga muncullah penghambaan, pengkultusan dan pemujaan pada tokoh tertentu dalam struktur sosial masyarakat kita hari ini.

Dalam kajian Boudrillard tentang transfigurasi menyebut hal ini sebagai “pembawa pesan” dalam peristiwa bahasa di mana pemikiran harus bekerja tanpa mempedulikan bagaimana mempergunakan bahasa dalam harfiahnya, di mana si pembawa pesan keliru dengan pesannya sehingga ia harus dikorbankan.<sup>25</sup> Peristiwa politik kita hari ini banyak yang berposisi sebagai “pembawa pesan” yang dikorbankan seperti presiden, raja, anggota parlemen, tokoh masyarakat dan pengusaha yang dia adalah tokoh nyata akan tetapi ditransfigurasi dari tokoh nyata menjadi tokoh visual yang hanya eksis di media, mereka menjadi media darling dan kehidupannya adalah simulakra (simulasi) dan ilusi. Tak jarang menjadi korban keputusan politik, kontroversi yang paling kasar dalam bahasa kebudayaan politik Indonesia adalah boneka.

Pengelolaan aset negara seperti lapangan, stadion, atau taman kota bukan lagi menjadi ruang sosial, ruang pertemuan tetapi oleh media, simulakra ditransfigurasi menjadi ruang komersial yang penuh iklan, kamera dan pencitraan, dampak dan efeknya menjadi eksploitasi berkepanjangan semisal ruang sosial ruang perkotaan, ruang wisata oleh karena pengaruh elite kapitalis ruang tersebut dijadikan objek komersil, ditransfigurasi menjadi milik privasi, milik swasta yang kemudian dampak dan implikasinya adalah hilangnya akses publik lantaran juga harus ikut menyewa jika akan mengakses ruang sosial tersebut.

---

<sup>25</sup> M. Imam Aziz (ed.), *Galaksi Simulacra Esa-Esai Jean Boudrillard*. (Yogyakarta; LKIS, 2001) Hal.101

Penimbunan pantai, reklamasi pantai losari, tol perkotaan, proyek CPI adalah awal mula bagaimana ruang hidup, ruang sosial, ruang kebudayaan dirubah, ditransfigurasi menjadi ruang komersial, ruang privasi yang dikuasai oleh individu atau konglomerasi dalam perjalanannya atas nama pembangunan.

Diksi transfigurasi yang di jelaskan oleh Boudrillard cenderung berbeda dari perspektif pemikir postmodernisme yang lain seperti Nietzsche yang mengambil jalan tengah untuk mendefinisikan arti dari spiritual dan religius di tengah pandangan agama yang bermasalah (problematis). Nietzsche menggunakan kata transfigurasi dalam filsafat eksistensialisme yang mengandung arti perubahan spiritual dan eksistensial manusia dari tunduk pada nilai lama menjadi pencipta nilai baru. Hal ini bisa diartikan kodrat lama manusia melalui penderitaan yang melahirkan penciptaan diri yang baru.

Bagi Nietzsche, sebelum mengemukakan transfigurasi dia menyebut istilah ini sebagai transposisi yang dimaknai sebagai reiterasi atau pengulangan tubuh ke dalam spirit yang mengekspresikan dalam metode dan bentuknya sebagai suatu rekonseptualisasi hubungan antara raga dan sprit. Nietzsche menjelaskan hal ini dalam episode transfigurasi dalam kitab Perjanjian Baru, dijelaskan Yesus mendaki Gunung, berbicara dengan Musa dan Elia dan bertransfigurasi sehingga wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya seterang Cahaya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Tyler T. Roberts, Spritualitas Posreligius; Eksplorasi Hermeneutis Transfigurasi Agama dalam Praksis Filsafat Nietzsche. (Yogyakarta; Qalam, 2002) Hal. 115

Secara teologis episode ini mengacu pada die Verklarung yang berarti pemujaan, dan sebagai sebuah kata kerja (*verklaren*) berarti naik ke langit atau muncul dalam cahaya terang. Kata ini umumnya dihubungkan dengan fenomena religius, tetapi Nietzsche lebih sering menggunakannya dalam konteks pembahasannya tentang seni atau dengan menafsirkannya sebagai manifestasi kerahmatan.<sup>27</sup> Ada persamaan dalam eksplorasi transfigurasi menurut Boudrillard dan Nietzsche dalam mendefinisikan transfigurasi, peneliti menangkapnya sebagai bentuk “pemujaan” terhadap manifestasi seseorang yang dianggap dewa-dewa Yunani, Presiden, Raja atau Tuhan dalam Ajaran Kristen yang perlu dipuja dan disembah.

Namun yang membuat catatan penting jika masa kontemporer saat ini Presiden, Raja, Tokoh dan individu populer juga mengalami suatu fenomena transfigurasi oleh manusia lainnya yaitu ikut dipuja, “disembah” lantaran dirinya yang berbeda dari tampilannya yang nyata, seorang raja/presiden juga adalah seorang individu lantaran perkembangan kebudayaan semakin menegasikan seseorang dengan gelar yang melekat pada dirinya.

Dalam ajaran Islam, konsep seperti transfigurasi tidak secara langsung disebut lateral dan bukan sebagai ajaran dogma, akan tetapi lebih kepada simbolik dan alegoris, semisal dalam Quran Surah Al Baqarah ayat 65 yang berbunyi:

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَالَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

---

<sup>27</sup> Ibid

Artinya : *Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina!"*<sup>28</sup>

Untuk penjelasan QS. Al Baqarah menurut hemat peneliti adalah bentuk transfigurasi terbalik atau transformasi fisik sebagai hukuman, dari manusia menjadi makhluk yang direndahkan, jika glorifikasi adalah memuliakan maka sebaliknya makna ayat diatas adalah tindakan sebaliknya seperti merendahkan atau mencela.

Dalam ayat lain juga ada tentang perjalanan spritual Rasulullah melalui episode Isra' dan Mi'raj, dalam tradisi filsafat Nietzsche bisa saja disebut sebagai transfigurasi tubuh, namun dalam ajaran Islam episode Isra' dan Mi'raj disebut sebagai pengalaman spritualisme paling agung dan mulia yang dipercayai dan diyakini oleh umat Islam.

Keterangan ini peneliti jelaskan untuk membedakan batas mana makna dogmatis dan mana transfigurasi perspektif sains atau akademis yang akan peneliti gunakan untuk kepentingan keberlanjutan penelitian disertasi. Boudrillard mendefinisikan transfigurasi melalui perspektif postmo, Nietzsche melalui teologi filsafat yang peneliti sengaja untuk mencari garis merah dan batas toleransi yang peneliti bisa gunakan sesuai dengan perspektif.

Lain halnya dalam kajian Ben Anderson, seorang sejarawan dan pakar politik untuk kajian Asia Tenggara, Ben tidak langsung menyebutkan kata transfigurasi namun penjelasan dalam buku *Imagined Communities*,

---

<sup>28</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah#64>

bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang berdaulat lantaran konsep itu lahir dalam kurun waktu di mana Pencerahan dan Revolusi memporak-porandakan keabsahan ranah dinasti berjenjang berkat pentahbisan oleh Tuhan sendiri.<sup>29</sup> Peneliti mendapatkan koneksi dalam konsep transfigurasi versi Ben Anderson misalnya perubahan komunitas dari masyarakat lokal ke bangsa sehingga membentuk transfigurasi identitas kolektif berupa kesadaran bersama yang dibentuk melalui *imagined* (imajinasi). Legitimasi Tuhan/Raja berubah menjadi kehendak rakyat, bahasa lokal/daerah berubah menjadi bahasa nasional, individu/etnis berubah menjadi warga negara.

Penjelasan tersebut sangat kental dalam narasi komunitas terbayang Ben Anderson karena terjadi proses transformasi simbolik dari agama, sistem monarki sebelum menjadi republik, bahasa lokal yang kental kedalam identitas nasional modern merupakan bentuk transfigurasi besar masyarakat modern yang terbangun di Indonesia yang kesemuanya terletak di akar-akar budaya nasionalisme. Termasuk bagaimana perubahan mendasar dari budaya politik feodalisme berubah menjadi demokrasi partisipatif.

Definisi transfigurasi yang peneliti gambarkan di atas memberikan penanda dari kajian postmodernisme, teologi filsafat dan kemudian sampai pada pembahasan kebangsaan yang merujuk pada hadirnya partisipasi

---

<sup>29</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities; Komunitas-Komunitas Terbayang*. (Yogyakarta; INSIST, 2008) Hal. 10-11

dan demokrasi dalam perkara republik hari ini lantaran sistem politik menjadi pusat gravitasi dari diskursus politik.

Untuk penjelasan yang lebih lanjut, peneliti juga menggunakan deskripsi dari Vedi R Hadis walau tidak secara eksplisit menulis tentang transfigurasi namun karya-karyanya seperti “Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pasca Otoritarianisme” menurut hemat peneliti tergambar dalam fenomena transfigurasi kekuasaan seperti bagaimana kekuasaan Orde Baru dan elite ekonomi politik lama tidak sepenuhnya hilang setelah reformasi 1998, tetapi mengalami transformasi kelembagaan, berbaur dengan institusi demokrasi, mengakumulasi legitimasi melalui pendirian partai baru hasil dari pecahan partai lama lantas mengkonsolidasi kekuatan dalam pemilukada dan pemilihan umum.

Vedi R Hadis melihat Indonesia, Thailand dan Filipina merupakan tiga negara Asia Tenggara pascaotoriter utama, tempat munculnya fenomena lokalisasi kekuasaan yang menjadi perhatian penting dalam perdebatan tentang demokratisasi dan pemerintahan. Dalam ketiga kasus tersebut, kebijakan desentralisasi telah dilembagakan sebagai pilar utama reformasi, meskipun hasilnya kontroversial dan ambivalen.

Di satu sisi, kasus-kasus ini banyak dibahas dalam literatur “transisi demokrasi” dan reformasi teknokratik tentang “tata pemerintahan yang baik”.<sup>30</sup> Konsep ini dalam kajian Vedi R Hadis, dipahami sebagai bentuk transformasi oligarki di mana institusi demokrasi menjadi wadah baru bagi

---

<sup>30</sup> Vedi R Hadis, Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022) Hal. 65.

kekuasaan lama untuk bereproduksi dengan menggunakan modal kekuatan lama, demokrasi pascaotoritarianisme menurut peneliti ditrasfigurasi menjadi kekuatan oligarki lama.

Perubahan-perubahan yang morat-marit dan sering tak menentu dalam politik dan masyarakat Indonesia tidak terlihat sebagai ciri dari suatu tahap transisi menuju bentuk demokrasi yang ideal. Mengikuti Robinson dan Hadiz (2004; lihat juga Hadis, 2003), pola dan dinamika esensial dari bagaimana kekuasaan sosial, ekonomi dan politik dijalankan sedikit banyak telah cukup mapan, dan secara relatif tiak akan banyak berubah di masa mendatang, ini adalah produk langsung dari fakta bahwa kepentingan-kepentingan lama oligarki dan predator tidak lenyap oleh adanya reformasi, tetapi justru berhasil mereorganisasi diri sebagai demokrat dan reformis yang kemudian memimpin lembaga pemerintahan yang baru dibangun.<sup>31</sup>

Aktor lama yang sejak dahulu menjadi aktor dominan di mana mereka juga adalah elite bisnis Orde Baru seperti pengusaha lokal, kepala daerah dan patron politik lama setelah reformasi mereka menyesuaikan diri tidak tergantikan dan membungkus wadah mereka dengan demokrasi, republik tetap mendapat akumulasi eksploitatif sampai sekarang.

#### **1.6.3.2. Pribumi dan Tionghoa**

Pembahasan mengenai pribumi, peneliti memilih terma ini untuk menjelaskan konseptual dan digunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan antara kelompok elite lokal dan pengusaha tionghoa yang

---

<sup>31</sup> Ibid, Hal 69

menguasai sumber daya politik formal dan informal. Kata ini memang begitu melekat dari perspektif Orde Baru bahkan pada sejarah kolonialisme kata pribumi digunakan dengan harfiah afirmasi negative sampai muncul Instruksi Presiden (INPRES) no. 26 tahun 1998 tentang “Menghentikan Penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi”.<sup>32</sup> Dalam inpres ini disebutkan dalam ayat pertama;

“Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan”.

Untuk penggunaan akademik dan kepentingan pengetahuan maka boleh-boleh saja disebutkan dalam kerangka konseptual dan penjelasan secara naratif, yang dilarang adalah pada penyebutan tugas administrasi, pelayanan publik dan maupun kebijakan pemerintahan. Peneliti menggunakan istilah pribumi dengan melatar belakangi buku dari kumpulan tulisan makalah seri Dialog Nasional: Pri-nonpri dalam perspektif Integrasi Sosial dan Pemerataan Pembangunan yang diselenggarakan atas kerjasama CIDES dan Republika yang membahas tentang pemerataan aset ekonomi Pri-Nonpri, nasionalisme dan ancaman disintegrasi bangsa, nonpri dan peran politik, kerusuhan dan polemik Pri-nonpri dan reformasi dan format baru pembauran.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Inpres No. 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Inpres ini muncul dikeluarkan oleh BJ. Habibi sebagai bagian dari reformasi politik dan administrative pasca jatuhnya Orde Baru, istilah tersebut dihentikan penggunaannya dalam tugas pemerintahan. Artinya semua elemen suku, identitas, etnik dalam pelayanan kebijakan administrasi tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan dengan sebutan pribumi dan non-pribumi, ini dimaksudkan agar pemerintahan transisi presiden Bj. Habibi menegaskan pemerintahannya berjalan dengan baik dan setara.

<sup>33</sup> Moch. Sa'Dun M, Pri-nonPri Mencari Format Baru Pembaruan, (Jakarta;CIDES, 1999) Hal. vii

Sejarawan Dr. Ong Hok Ham salah satu peneliti dalam buku ini menjelaskan bahwa baik orang Cina maupun orang Belanda datang ke kepulauan Indonesia ini sebagai pedagang dan mencari kekayaan. Sejak hari pertama terbentuknya VOC (kumpeni-Belanda), kedua golongan ini menjadi mitra dagang dan sejak itu orang Cina menduduki pedagang perantara dan distribusi barang-barang impor serta pembeli hasil bumi pedesaan untuk dijual kepada VOC. Kedudukan pedagang perantara dan pedagang eceran ini tidak pernah terlepas dari tangannya. Hingga kini kedudukan pedagang dan pengusaha kuat.<sup>34</sup> Kemakmuran dan sentimen adalah dua sisi mata uang yang berjalan beriringan dalam sejarah nasional Indonesia yang sampai hari ini mengundang konflik dalam sistem politik kebangsaan.

Sampai kini mereka merupakan suatu elemen kuat dari golongan kelas menengah Indonesia sekalipun masih banyak orang Indonesia-Cina yang miskin, namun sebaliknya, juga benar bahwa di antara konglomerat Indonesia yang paling kaya, tujuh atau delapan adalah keturunan Cina dan dari 200 orang terkaya di Indonesia 50% adalah keturunan Cina.<sup>35</sup> Secara resmi pemerintah Hindia Belanda (sejak permulaan abad ke-19) membagi penduduk Hindia Belanda dalam tiga golongan, Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, dan lain-lain) dan elit loka lainnya.

Kebijakan kolonial yang dituangkan dalam pembagian penduduk dan kebijakan pembatasan gerak fisik merupakan kebijaksanaan apartheid

---

<sup>34</sup> Ibid. hal. 34

<sup>35</sup> Ibid.

dalam embrio yang kemudian di Afrika Selatan (juga koloni Belanda asalnya) akan menjadi ideologi resmi yang fasis dan kini sudah dibubarkan.<sup>36</sup> Sentimen anti Cina sejak era kolonial Belanda sudah sangat terkenal garis konflik kedua kelompok ini, namun konflik tersebut juga tetap membuat kelompok Cina tetap mampu mengelola kemakmuran mereka karena juga mampu menjaga kemitraan dagang dengan Belanda disatu sisi sehingga milik pribadi mereka langgeng karena dilindungi secara hukum.

Dalam studi tentang priyayi dan petani dalam zaman kolonial Belanda, Ong Hok Ham melihat lemahnya “hak pribadi atas tanah” dari golongan pribumi khususnya di Jawa. Dengan singkat tanah di Jawa dimiliki oleh raja/negara, apapun bentuknya Hindia Belanda atau RI, dan bukan oleh masyarakat. Hal ini berlainan dengan masyarakat yang berstruktur marga (klan) seperti Minangkabau, Tapanuli. Disana perkembangan perkembunan dapat melahirkan perkebunan rakyat yang dikenal sebagai karet-rakyat, tembakau rakyat, gula rakyat. Di Jawa dimana tidak dikenal sistem marga maka tanah dijadikan milik negara.

Prinsip ini juga mau dipraktekkan di luar Jawa dan akan mengundang tantangan hebat.<sup>37</sup> Akibatnya bagi perkembangan struktur masyarakat Jawa dan kemampuannya dalam menghadapi kapitalisme adalah fatal atau bermalapetaka. Kedudukan pribumi di Jawa adalah seperti “Indian” di Amerika atau “Aborigin” di Australia, penduduk setempat tanpa hak milik tanah yang jelas. Ia dapat digusur dan disita tanahnya karena pemilikan

---

<sup>36</sup> Ibid. hal. 35

<sup>37</sup> Ibid. Hal. 43.

tidak jelas.<sup>38</sup> Fenomena seperti ini juga terjadi hampir di seluruh bagian ada di Indonesia utamanya di kota Makassar dan Kab/Kota yang lain begitu mudahnya warga kehilangan hak atas tanahnya, anggaplah golongan yang berkuasa di Makassar dahulu adalah orang Makassar dengan simbol kerajaan Gowa dan Tallo akan tetapi apa nasib mereka. Mereka menjadi terpinggirkan, tersubstitusi, transposisi dan meninggalkan kedudukan. Yang datang pribumi lain dan non pribumi yang saat ini berkuasa di tanah Makassar.

Sementara pada penggunaan kata Tionghoa, Cina kerap menjadi perdebatan, saat ini kita tidak dianjurkan menggunakan kata Cina akan tetapi menggunakan kata atau diksi Tionghoa. Perdebatan panjang mewarnai penyebutan istilah untuk etnis keturunan Tionghoa di Indonesia. Karena dianggap menjadi masalah serius dan berkaitan dengan SARA, pada 2011 kemudian diadakan diskusi bahasa. Diskusi ini membahas tentang istilah Cina dan Tionghoa. Adapun pembicara dalam diskusi tersebut di antaranya wakil dari Kedutaan Besar Tiongkok, wakil dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, wakil dari Badan Bahasa, serta budayawan Remy Silado.<sup>39</sup>

Akan tetapi, pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, penggunaan istilah Tiongkok atau Tionghoa dilarang. Alasannya, istilah itu dinilai merugikan Indonesia. Imbasnya, disahkanlah Presidium

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Widi Hermawan, Mengapa menyebut Tionghoa, bukan Cina, 27 Mei 2019, <https://bentangpustaka.com/mengapa-menyebut-tionghoa-bukan-cina/> (diakses 18 Oktober 2025)

Kabinet Ampera pada 25 Juli 1967, istilah yang boleh dipakai adalah Cina karena dinilai lebih disenangi rakyat Indonesia.<sup>40</sup>

Perdebatan itu berujung pada diterbitkannya Keputusan Presiden No. 12 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keppres tersebut berisi tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967, dalam surat edaran tersebut istilah resmi yang digunakan adalah “Tjina”, bukan Tionghoa. Namun sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Kepres tersebut, sebenarnya Presiden Abdurrahman Wahid sudah terlebih dulu memakai istilah Tionghoa ataupun Tiongkok. Hal tersebut bisa dilihat dari laporan kerja pemerintahannya pada Agustus 2000, saat Abdurrahman Wahid sudah menggunakan sebutan Republik Rakyat Tiongkok. Tidak hanya itu, Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh yang sangat plural itu juga telah mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang dinilai sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan norma-norma reformasi.<sup>41</sup>

Dengan kata lain, penggunaan istilah Tionghoa dan Tiongkok adalah istilah resmi setelah keluarnya Keputusan Presiden di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono No. 12 tahun 2014. Sehingga hal tersebut bisa digunakan dalam level akademik dan kepentingan ilmu pengetahuan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan sektor pemerintahan yang

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

dilarang adalah istilah penggunaan China atau Cina baik dalam penyebutan istilah media karena narasinya bisa memuat kesenjangan rasial.

## **1.7. Teori**

Pada bagian ini akan diuraikan landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan transfigurasi kapitalisme. Pertama, teori ekonomi politik. Kedua, semangat dan ikatan kapitalisme berkesadaran. Ketiga, distribusi kekayaan dan ketimpangan. Keempat, Teori Oligarki. Kelima, Teori Elite, Keenam, Teori Pertukaran. Ketujuh, Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Teori tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

### **1.7.1. Ekonomi Politik Marxian**

Konsep ekonomi politik dimunculkan pada Abad ke 18 dengan tujuan untuk membantu orang dalam memahami dan mengatasi perubahan-perubahan dramatis dalam sistem pemuasan kebutuhan manusia, baik dengan memahami sifat dari kebutuhan manusia, baik dengan memahami sifat dari kebutuhan/keinginan itu sendiri dan cara memproduksi serta mendistribusikan barang (good) untuk memuaskannya.

Pergeseran dari istilah lama yaitu “ekonomi” menjadi “ekonomi politik” menunjukkan pergeseran pemahaman yang terjadi. Istilah “ekonomi” diambil dari sebuah konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga (oikos = rumah, nomos = aturan/ hukum/ cara/ pengaturan). Ekonomi memiliki relevansi bagi sebuah masyarakat yang memiliki kebutuhan Dimana hal-hal yang dapat memuaskan kebutuhan itu diproduksi di dalam rumah tangga itu sendiri. Sementara ekonomi politik Adalah manajemen

terhadap urusan ekonomu dalam sebuah negara.<sup>42</sup> Ekonomi politik bukanlah sekedar pemenuhan kebutuhan akan tetapi menggambarkan bagaimana relasi antara kekuasaan, pasar dan masyarakat dalam mengatur sumber daya, bagaimana merefleksikan perubahan skala dan ruang lingkup analisis dari yang domestik ke yang bersifat publik maupun yang politis.

Di dalam Marxisme ada banyak sudut pandang yang bisa digunakan untuk membahas ekonomi politik. Para penganut marxisme ada yang memandang politik sebagai pemisahan antara masyarakat sipil dari wilayah publik (di mana hak dan kesetaraan dianggap hanya ada dalam wilayah publik), politik sebagai proses kelas di mana nilai surplus “dirampas” lewat kapitalisme, politik sebagai peran negara dalam mengelola kepentingan dan urusan kapital, jaminan politik (yaitu jaminan dari negara) terhadap hak kepemilikan, politik sebagai kegiatan revolusioner untuk mengubah institusi-institusi politik dari kapitalisme, dan politik sebagai proses tawar menawar antara kaum pekerja dengan kaum kapitalis untuk mengendalikan surplus ekonomi.<sup>43</sup>

Politik tidaklah pernah berposisi netral, melainkan terhubung dengan relasi produksi dan distribusi kekuasaan dalam kapitalisme dan juga menjadi arena perebutan kepentingan ekonomi di mana negara, kelas pekerja, kelas kapitalis saling berhadapan maupun saling berkompromi. Inti

---

<sup>42</sup> James A. Caporaso&David P Levine. Teori-Teori Ekonomi Politik. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2015) Hal. v

<sup>43</sup> Ibid. Hal, 123

kritik daripada Marxisme bertumpu pada bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan nilai dan surplus perekonomian.

Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam teori Marxian tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berfikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir-pemikir ekonomi klasik, terutama Adam Smith dan David Ricardo.

Metode ini menekankan pada ide bahwa perekonomian pasar bekerja menurut prinsip-prinsip yang reproduksi dan ekspansi sistem kesalingtergantungan material antar orang, atau dengan kata lain pembagian kerja sosial. Proses ini terjadi menurut pola-pola perkembangan yang dalam pandangan ekonomi klasik tidak dipengaruhi oleh kehendak atau keinginan dari tiap-tiap orang. Memang individu-individu dalam perekonomian pasar bisa bertindak secara independent sesuai dengan keinginan mereka sendiri.<sup>44</sup>

Matriks yang terdiri dari kebutuhan banyak individu akan memengaruhi secara langsung apa yang terjadi di pasar. Namun kebutuhan-kebutuhan pribadi ini sebenarnya berdiri di atas sebuah struktur reproduksi yang objektif di mana struktur reproduksi ini memiliki tuntutan-tuntutan sendiri yang akan mengendalikan individu di dalam menentukan apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Karena struktur objektif ini lebih dominan sifatnya maka teori Marxian lebih memfokuskan pada proses-

---

<sup>44</sup> Ibid.124

proses reproduksi yang bersifat objektif ini dan tidak memfokuskan telaaahnya pada proses subjektif yaitu penentuan peringkat peluang atau pembuatan pilihan oleh individu.<sup>45</sup> Ekonomi politik Marxian berangkat dari warisan pemikir klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, jika ekonomi klasik menekankan mekanisme pasar sebagai hasil interaksi bebas antar individu,

Marx justru melihat bagaimana struktur objektif yang membentuk dan membatasi ruang gerak individu itu sendiri. Kebutuhan dan pilihan pribadi tidak pernah berdiri sendiri melainkan selalu dibentuk oleh reproduksi sosial yang lebih dinamis seperti pembagian kerja dan relasi produksi. Teori Marxian dalam hal ini tidak menempatkan kehendak individu sebagai pusat analisis melainkan memandang kapitalisme sebagai sistem yang secara objektif memproduksi dirinya sendiri melalui pola-pola material yang mengikat setiap pelaku di dalamnya.

Dalam teori neoklasik, individu memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka di mana kesejahteraan ini didefinisikan berdasarkan peringkat keinginan mereka. Perekonomian tidak hanya sekadar berfungsi untuk memfasilitasi proses maksimalisasi kesejahteraan ini tapi idealnya dibuat pada awalnya hanya untuk tujuan itu saja.

Maka hubungan sebab akibatnya Adalah kepentingan individu sebagai penyebab, di mana kepentingan individu ini bersifat subjektif,

---

<sup>45</sup> Ibid.125

struktur ekonomi menjadi akibat. Bagi Marx, hubungan sebab akibatnya terbalik, sehingga konsep kepentingan individu menjadi sedikit lebih kompleks, yaitu di satu sisi kepentingan individu merujuk pada individu orangnya, yaitu bahwa tidak ada orang lain yang bisa memaksa seseorang untuk menginginkan sesuatu atau untuk mengambil cara tertentu untuk mencapai tujuan mereka.<sup>46</sup> Kepentingan individu yang dianggap sebagai penyebab utama yang menggerakkan perekonomian suatu wilayah, negara atau state merupakan pandangan dari teori neoklasik, di mana setiap orang dianggap bebas menentukan pilihan demi maksimalnya kesejahteraannya, struktur ekonomi hanya diposisikan sebagai akibat dari akumulasi pilihan itu.

Marx mengkritik pandangan neoklasik yang menempatkan subjek sebagai pusat yang seolah-olah sistem ekonomi merupakan cerminan dari keinginan personal yang bersifat rasional, padahal kritik Marx ini adalah posisi atau hubungan sebab akibat, di mana struktur ekonomi lebih dominan karena relasi produksi dan pembagian kerja secara objektif membatasi serta membentuk kepentingan individu. Dengan kata lain, individu atau orang per orang memang memiliki kehendak, tetapi kehendak itu tidak pernah benar-benar otonom karena kita semua selalu diarahkan kepada sistem yang lebih besar.

Menghubungkan praktik kapitalisme di kota Makassar, dalam teori Marxian ini terlihat jelas dalam pola kapitalisme ersatz yang berkembang.

---

<sup>46</sup> Ibid, Hal. 126

Para elite lokal dan Tionghoa, tampak membuat keputusan ekonomi secara bebas, tetapi sebenarnya pilihan mereka ditentukan oleh jaringan kekuasaan dan perlindungan negara. Kapitalisme semu yang bergantung pada proteksi politik, akses birokrasi dan sumber daya masa colonial Adalah contoh bagaimana Keputusan individu elite lebih menyerupai penyesuaian terhadap struktur daripada ekspresi murni dari kehendak pribadi. Praktik seperti ini memperlihatkan tahapan yang sejak masa kolonial hingga saat ini kepentingan ekonomi tidak lahir dari kebebasan subjektif namun lahir dari kerangka objektif yang sebenarnya sudah disediakan oleh struktur kapitalisme ersatz melalui negara.

Berbeda dengan fenomena dalam praktik kapitalisme rentier Dimana akumulasi kekayaan lebih banyak bersumber dari kepemilikan asset, rente atau relasi kuasa dibandingkan dari kerja-kerja produktif. Elite yang menguasai tanah, properti, jaringan politik di kota Makassar cenderung memperoleh surplus ekonomi bukan karena kreativitas atau inovasi melainkan karena posisi mereka dalam struktur yang memberi akses pada rente.

Dalam konsep kelas teori Marxian, kelas terbentuk secara politik tidaklah muncul begitu saja di dalam kondisi kapitalisme, pada awalnya individu-individu yang ada dalam sebuah perekonomian memandang dirinya secara sempit, yaitu sebagai agen-agen yang berdiri sendiri dan mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Kepentingan orang yang lain dan bahkan bisa membuat individu yang satu bermusuhan dengan individu yang lain.

Tapi tetap saja kepentingan-kepentingan ini tidaklah murni independent atau terisolasi dengan yang lain. Perekonomian kapitalis berjalan dengan sedemikian rupa sehingga terbentuk kesamaan kepentingan antara beberapa golongan orang tertentu. Penafsiran Marxian terhadap hubungan antara ekonomi dengan politik dilandaskan pada ide kepentingan ekonomi dan peranan dari kepentingan ekonomi itu di dalam mendefinisikan agenda politik.<sup>47</sup> Awalnya individu memang bergerak dengan kepentingan masing-masing bahkan bisa saja saling berlawanan. Akan tetapi kondisi perekonomian kapitalis uang berjalan dalam pola relasi produksi yang sama maka akan lambat laun muncul bagaimana kesadaran akan kesamaan kepentingan di antara kelompok tertentu.

Dari sinilah muncul kelas secara politik, di mana peneliti juga memberikan penafsiran yang di mana ada kelas ersatz dan ada kelas rentier berdasarkan pola dan genealogi yang berbeda berikut kecenderungannya masing-masing di mana mereka menyadari posisi dalam struktur produksi dan bertindak berdasarkan kesadaran itu.

Kelas dalam kapitalisme ersatz dan rentier dalam hemat peneliti jika merujuk dalam teori ekonomi politik terlihat bahwa kelas elite lokal dan Tionghoa juga terbentuk bukan karena semata pilihan individu melainkan karena kepentingan ekonomi uang sama-sama diarahkan oleh struktur kapitalisme lokal.

---

<sup>47</sup> Ibid. Hal.128

Dalam praktik ersatz, kepentingan bersama mereka terbangun melalui akses pada proteksi negara dan patronase birokrasi sehingga muncul aliansi politik-ekonomi yang menopang keberlanjutan sistem. Sementara dalam praktik rentier kepentingan bersama terbentuk di antara pemilik asset baik tanah, properti maupun konsesi yang sama-sama menikmati keuntungan dari rente. Kedua pola dan kelas ini memperlihatkan bagaimana kelas elite lahir secara politik melalui kesadaran akan posisi mereka dalam struktur objektif kapitalisme lokal.

Penafsiran Marxian dalam hubungan ekonomi dan politik memberi landasan untuk membaca konfigurasi kuasa di Kota Makassar. Ekonomi bukan sekedar aktivitas individu melainkan arena yang membentuk kepentingan kolektif yang kemudian mereka hadir dalam aliansi politik. Artinya, agenda politik yang terbentuk muaranya pada kepentingan ekonomi yang menjadi penggerak dari praktik kapitalisme seperti distribusi proyek, akses tanah, dan pengelolaan sumber daya hingga pada ranah konflik perebutan akses tersebut.

Pendekatan Marxis mengajukan beberapa pendapat mengenai kepentingan, yaitu:

1. Bahwa kepentingan muncul karena adanya struktur dari produksi. Apa yang menjadi kebutuhan dari individu akan ditentukan oleh di mana posisi individu itu di dalam proses produksi sosial. Individu memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan material untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dalam masyarakat sipil, posisi dari individu dalam pembagian kerja akan menentukan apa

kebutuhannya dan selanjutnya kebutuhan ini akan mendefinisikan apa yang menjadi kepentingannya.

2. Kepentingan pribadi dari seorang individu dapat diketahui dengan melihat pada kelas mana individu itu berada. Maksudnya, di kelompok mana dalam masyarakat sipil individu itu berada dari individu dari kelas lain sehingga membuat individu-individu terkotak-kotak menjadi beberapa kelas. Maka kepentingan-kepentingan yang muncul dalam masyarakat sipil adalah selalu merupakan kepentingan kelas, biarpun secara implisit.
3. Kepentingan kelas yang satu akan bertentangan dengan kepentingan kelas yang lain. Tingkat sejauh mana sebuah kelas tertentu berhasil mencapai kepentingannya akan sekaligus menentukan seberapa besar kelas yang lain mengalami kegagalan dalam mencapai kepentingannya.
4. Kepentingan kelas yang terbentuk dalam sistem produksi akan menjadi kepentingan politik, yaitu pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan negara.

Keempat pokok pikiran ini telah menunjukkan aspek-aspek penting dari perubahan dari kepentingan material pribadi menjadi tindakan politik, namun pokok pikiran tersebut jangan ditafsirkan secara mekanis (jangan ditafsirkan sebagai hal-hal yang pasti akan terjadi dan pasti akan terjadi secara beruntun). Tidak ada yang namanya hubungan mutlak antara Lokasi ekonomi dengan politik.

Bahkan perdebatan-perdebatan terbesar dalam ilmu politik (seperti kaum Leninis versus kaum Trotskyis) justru mempermasalahkan tentang bagaimana persisnya perubahan kepentingan pribadi menjadi kepentingan politik bisa terjadi.<sup>48</sup> Dalam analisis Marx, relasi yang tidak boleh dipahami secara mekanis bahwa transformasi dari kepentingan material ke tindakan politik selalui melewati proses yang kompleks dan penuh dinamika bahkan seringkali diluar dugaan. Pada faktanya, kesadaran kelas tidak serta merta muncul hanya karena orang berada dalam posisi tertentu dalam struktur produksi. Ia dipengaruhi oleh kondisi historis, organisasi politik, ideologi. Perdebatan yang selalu ada misalnya bagaimana peran partai sebagai penggerak kesadaran politik kelas pekerja yang merupakan doktrin kelompok Lenin dan bagaimana perjuangan massa yang selalu bergerak dari kelompok Trotskys.

Mengaitkan hal tersebut dengan teori ekonomi politik dari perspektik kapitalisme ersatz dan rentier di Kota Makassar, peneliti melihat keterkaitan antara kepentingan material elite ekonomi baik elit lokal maupun Tionghoa yang bertransformasi menjadi kepentingan politik. Mereka dekat dengan negara dan kontrol atas aset tanah atau distribusi barang menjadikan kepentingan ekonomi langsung melebur ke dalam arena kekuasaan politik.

Hubungan seperti ini juga tidak boleh dianggap otomatis tersambung atau *connected* maka daripada itu peneliti menyebutkan ada negosiasi, aliansi bahkan konflik antar elite yang memperlihatkan bahwa perubahan

---

<sup>48</sup> Ibid. 130

kepentingan ekonomi ke kepentingan politik selalu bersifat historis, kontekstual dan dipengaruhi oleh dinamika kuasa lokal.

### **1.7.2. Kapitalisme Berkesadaran John Mackey & Raj Sisodia**

Dalam beberapa pandangan mengenai kapitalisme, buku *Bourgeoisie Dignity*, Deirdre McCloskey, seorang ekonom di University of Illinois di Chicago mengajukan pendapat yang meyakinkan bahwa faktor terpenting dalam kesuksesan kapitalisme niaga bebas adalah kewirausahaan dan inovasi, yang berpadu dengan kebebasan dan martabat bagi pebisnis.

Penemuan-penemuan yang mengubah dunia seperti mobil, telepon, bensin, internet, antibiotik, komputer, pesawat terbang tidak terjadi secara otomatis atau melalui ketetapan pemerintah; penemuan-penemuan itu membutuhkan banyak inovasi. Kreativitas manusia, yang sebagian bersifat individual tapi kebanyakan kolaboratif dan kumulatif, adalah akar segala kemajuan ekonomi.<sup>49</sup> Kapitalisme niaga bebas dalam hal ini merupakan sistem inovasi dan kerja sama sosial dengan menanggapi bahwa bisnis mampu merubah kehidupan sosial dunia secara kolektif dengan memberikan kesejahteraan.

Melalui pasar bebas dan masyarakat bebas dengan memberikan perbandingan bahwa Amerika Serikat jauh lebih dinamis secara ekonomi berkembang secara sosial dibandingkan dengan Uni Soviet yang berlatar belakang ideologi komunisme yang dianggapnya diktator dengan kontrol ekonomi yang ketat dari pemerintahan. Perbandingan serupa juga bisa

---

<sup>49</sup> John Mackey dan Raj Sisodia, *Conscious Capitalism; Membebaskan Semangat Heroik Bisnis*, Terj. Y.D. Anugrahbayu, (Jakarta; Kepustidakaan Populer Gramedia, 2022) Hal. 15

dilihat dari negara seperti Jerman Barat versus Jerman Timur; Korea Selatan versus Korea Utara; Taiwan versus Hongkong dan Singapura versus Cina; Malaysia versus Indonesia.

Dengan runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, negara demi negara mulai beralih ke kebebasan politik dan ekonomi yang lebih besar pada tahun 1990-an dan 2000-an, lantaran suramnya hasil ekonomi dan sosial dari berbagai eksperimen sosialis yang dilakukan pada abad kedua puluh menjadi makin dikenal. Seiring transisi menuju kebebasan yang lebih besar ini mengakar, banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan ratusan juta orang miskin mampu keluar dari kemiskinan yang parah.<sup>50</sup>

Pemahaman ini berangkat dari tinjauan fakta sosial di negara Barat yang merasakan mendapat keuntungan dari buah kapitalisme niaga bebas yang menurut mereka keberhasilan dan kesuksesan dari kapitalisme ini menjadikan negaranya keluar dari kemiskinan parah sebagai tolak ukur dan peningkatan kualitas standar hidup dengan menjadikan pendapatan domestik bruto yang naik pesat seperti di Amerika, Jepang, Korea Selatan mengklaim sebagai negara kaya dan paling maju.

Pada hari ini klaim inovasi teknologi dinikmati oleh negara Asia contohnya Indonesia, mulai dari telepon genggam, laptop, mobil, sepeda motor, obat-obatan sampai dengan masuknya konflik transportasi pengadaan jenis kereta cepat yang sampai hari ini menjadi rebutan negara-

---

<sup>50</sup> Ibid. Hal. 13.

negara maju dari Barat sampai Timur yang diwakili oleh Cina, sehingga menjadikan trend pasar adalah perang dagang.

Pandangan John Mackey dan Raj Sisodia ini memberikan penekanan bahwa dalam kapitalisme berkesadaran atau kapitalisme niaga bebas mereka menganggap bahwa para wirausahawan atau pengusaha adalah pahlawan dalam kapitalisme. Pengusaha adalah pahlawan sejati dikarenakan mampu menggerakkan kemajuan dalam bisnis, masyarakat dan dunia.

Pengusaha dianggap mampu memecahkan masalah lantaran perekonomian pasar bebas menciptakan perubahan besar yang luas dalam dunia global dengan inovasinya yang cepat dan menciptakan teknologi yang banyak membantu umat manusia yang dengan kemajuannya bisa mengembangkan teknologi dengan tingkat kematangan yang tinggi. Sehingga para pengusaha tersebut dianggap sebagai pencetus zaman baru, bahkan dalam narasi Weber yaitu sebuah etos kerja yang berorientasi pada usaha mengejar akumulasi profit dan investasi keuntungan yang dia sebut sebagai doktrin protestan.

Kapitalisme sekarang, yang telah mendominasi kehidupan perekonomian, mendidik dan memilih insan-insan ekonomi yang dibutuhkannya melalui suatu proses "*survival of the fittest*" dalam bidang ekonomi. Tetapi di sini seseorang akan dapat dengan mudah melihat batas-batas konsep seleksi sebagai suatu sarana penjelasan historis. Agar suatu cara hidup yang demikian baik beradaptasi dengan kekhususan-kekhususan kapitalisme dapat terpilih, yaitu, dapat mendominasi yang

lainnya, cara hidup itu harus berasal usul, bukan saja dalam individu-individu terpisah, tetapi sebagai cara hidup yang diikuti keseluruhan kelompok manusia.<sup>51</sup> Dominasi kehidupan ekonomi tersebut, tentu saja menjelaskan kondisi kapitalisme dimana menunjukkan kekuatan individu dan juga kekuatan dari kepemilikan harta benda.

Dalam maksud tersebut kapitalisme mengarah pada perlakuan utilitarianisme, atau bagaimana segala kebermanfaatan, kegunaan untuk mendukung kesejahteraan, kebahagiaan, keuntungan, kesenangan sehingga dalam masyarakat ekonomi hal-hal yang dapat membuahkan resiko seperti kejahatan, kerugian, rasa sakit dan tidak senang mampu diminimalisir karakter perlakuannya, yang kemudian agen yang bertindak untuk mengatur agar bagaimana asas kebermanfaatan tetap stabil dalam porsi dan kedudukannya.

Makanya kenapa dalam kapitalisme modern, kejujuran dalam suatu akad atau jual beli sangat diperhitungkan untuk memberi manfaat jika menjamin suatu kredit. Salah satu ciri bagaimana perbankan menyukai kejujuran, tepat waktu, sikap rajin dan hemat dalam menjalankan kredit dari akad perjanjian jual beli atau utang piutang tersebut, kerja-kerja dari asas utilitas atau kebermanfaatan dengan meminimalisir resiko dan rasa sakit ataupun rugi.

Pro kontra terhadap kapitalisme yang dianggap sebagai sebuah sistem ekonomi dimana pasar dan perdagangan, alat industri dan

---

<sup>51</sup> Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Terj. Yusup Priyasudiarja, (Jogjakarta; Pustidaka Prometheus, 2003) Hal. 83

produksinya dikembangkan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam perekonomian tanpa adanya peran negara, pemerintah dianggap tidak berhak untuk mengintervensi pasar. Konflik terhadap definisi peran negara, monopoli sampai dengan dominasi tersebut telah berlangsung sejak abad ke-16.

Penerapan sistem komersial tersebut oleh pihak swasta menjadikan kapitalisme selalu disandingkan dengan sosialisme sebagai sistem ekonomi pembandingan sampai hari ini, dimana sosialisme merupakan sistem ekonomi yang juga memberikan kebebasan kepada individu namun tetap dalam pengawasan dan intervensi negara atau campur tangan pemerintah. Terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi tanpa campur tangan negara dan sistem ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau negara.

Konflik integral antara kapitalisme dan sosialisme membuat penekanan tersendiri sehingga para kelompok cendekia dan intelektual juga ikut berpengaruh dalam menempatkan seperti apa kapitalisme bekerja. Katidakanlah para pemikir Marxis yang menganggap dan menyerang kapitalisme sebagai sistem yang secara inheren mengeksploitasi para pekerja.

Dalam kisah kapitalisme dan bisnis terlalu sering difitnah sebagai pihak jahat dan disalahkan atas hampir semua hal yang tidak disukai para kritikus postmodern tentang dunia dan perkembangan globalnya. Kapitalisme digambarkan sebagai yang mengeksploitasi pekerja, menipu konsumen, menyebabkan ketimpangan dengan menguntungkan si kaya

tapi tidak bagi si miskin, menyeragamkan masyarakat, memecah belah masyarakat, dan merusak lingkungan hidup.

Pengusaha dan pebisnis lain dituduh sebagai kaum yang terutama digerakkan oleh keegoisan dan keserakahan. Sementara itu, pembela kapitalisme sering berbicara dengan jargon yang bukan hanya gagal menginspirasi orang, tetapi juga kerap meneguhkan kritik etis bahwa kaum kapitalis hanya memikirkan uang dan laba, dan bahwa bisnis hanya dapat menebus diri sendiri melalui “perbuatan baik”.<sup>52</sup>

Sampai saat inipun kisah kapitalisme dan bisnis masih dianggap sebagai biang dari kehancuran ekonomi dan timpangnya dunia sosial budaya dikarenakan para penggerak kapitalis yaitu kelompok pebisnis turut menguasai negara dengan menjadi tokoh sentral dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ikut serta mempengaruhi segala bentuk aturan perundang-undangan demi kepentingan bisnis dan korporasi mereka.

Beberapa alasan mengapa kapitalisme diserang dan dianggap tidak baik dan tidak menguntungkan dari beberapa kritikus diantaranya adalah ;

1. Para pebisnis telah membiarkan landasan etis kapitalisme niaga bebas dibajak secara intelektual oleh para ekonom dan kritikus yang menyelipkan ke dalamnya suatu unsur yang picik, yang mementingkan diri sendiri, dan tidak tepat, yang sama sekali tanpa justifikasi etis yang melekat pada hakikatnya. Kapitalisme membutuhkan suatu narasi baru dan landasan etis baru yang secara tepat mencerminkan kebaikan dan keutamaan intrinsiknya.

---

<sup>52</sup> John Mackey dan Raj Sisodia. *Op.Cit.*. Hal. 16

2. Terlalu banyak bisnis beroperasi dengan tingkat kesadaran rendah dalam hal tujuan sejatinya dan dampaknya pada dunia secara keseluruhan. Kecenderungan mereka untuk berpikir dalam kerangka menang-kalah telah memunculkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan membahayakan bagi rakyat, masyarakat, dan dunia. Tidak mengherankan bahwa kenyataan itu memicu serangan balasan.
3. Pada tahun-tahun terakhir, mitos bahwa bisnis merupakan dan haruslah perkara memaksimalkan laba telah begitu mengakar di kalangan para pemimpin bisnis. Kenyataan ini telah menguras habis kemampuan kebanyakan bisnis untuk terlibat dan terhubung dengan masyarakat yang terdalam.
4. Regulasi dan ruang lingkup pemerintah telah menggelembung begitu besar, sekaligus menjadi lahan subur bagi berkembangnya kapitalisme kroni, dan dengan demikian membatasi persaingan yang akhirnya menguntungkan bisnis-bisnis yang punya koneksi politik yang kuat. Kapitalisme kroni sama sekali bukan kapitalisme, melainkan dipandang demikian oleh banyak orang karena ia melibatkan para pebisnis.<sup>53</sup>

Kapitalisme kemudian menjadi patokan dasar dalam memahami bahwa perekonomian dalam suatu negara dikemudikan oleh para pebisnis yang dimana secara keseluruhan operasi pasar menjadikan laba dan keuntungan korporasi yang besar yang melibatkan publik sebagai subjek dan objek untuk membesarkan keuntungan tanpa melibatkan aturan dari negara sehingga seringkali terjadi harga produk di pasaran menjadi tidak

---

<sup>53</sup> Ibid. Hal. 17

terkontrol karena dikuasai oleh kartel dan permainan pasar para pebisnis, sehingga dampak kapitalisme yang dimaksud memicu ketidakstabilan perekonomian.

Dominasi dalam perekonomian tersebut tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari sekutu yang berkuasa. Etika paling dasar dalam kapitalisme adalah berlakunya suatu norma yang mengikat dan terikat dari sekutu yang berkuasa, apakah negara, grup korporasi sampai dengan kelompok wirausahawan.

Jika tidak mematuhi etika dasar atau norma yang telah ditentukan tentu mereka akan tertinggal karena telah bertindak berlawanan bahkan akan lenyap dan terlempar dari dunia pasar. Kapitalisme dalam pandangan Weber juga tidak serta merta sedemikian percaya dengan doktrin *liberum arbitrium* atau kehendak bebas, dalam penerapannya para kapitalis borjuis terikat oleh norma-norma sekutu yang berkuasa.

Perolehan kapitalistis sebagai suatu bentuk petualangan telah merasuk dalam keluarga-keluarga dalam setiap jenis masyarakat ekonomi yang telah mengenal perdagangan dengan menggunakan uang dan yang telah menawarkan banyak kesempatan, melalui *commenda* (pedagang luar/asing yang menguasai perdagangan), pajak pertanian, pinjaman negara, pembiayaan perang, pengadilan di mahkamah bangsawan dan para pejabat-pejabat.<sup>54</sup> Di mana saja, peran kapitalisme kemudian mendapatkan pengaruh untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan

---

<sup>54</sup> Max Weber, *Op.Cit.* Hal. 87

manusia namun di sisi lain juga mendapatkan perlawanan keras seperti efektivitas upah dan penerapan angkatan kerja yang melakukan tuntutan dari upah mereka yang dihitung dari besaran atau banyaknya produksi dengan istilah upah sedikit dengan keuntungan perusahaan yang besar.

Bagi kelompok kapitalis, pertentangan terhadap etika dasar dan norma dari sekutu yang berkuasa adalah bagian dari sikap tradisionalisme, bahwasanya penghasilan yang besar tentu juga berbanding lurus dengan tingkat kontrol dan pengetatan ekonomi untuk meningkatkan penampilan kerja. Pada awal kemunculannya, kapitalisme abad 16, industri yang muncul pada waktu itu kebanyakan diciptakan oleh para *parvenus* (orang kaya baru).

Sehingga ada perbedaan antara kepuasan akan pemenuhan kebutuhan dengan perolehan keuntungan sebagai dua prinsip paling utama dalam sejarah perekonomian. Dalam kasus yang pertama tadi, hasil karya barang-barang perlu untuk memenuhi kebutuhan personal. Sedang dalam kasus yang kedua, suatu perjuangan untuk memperoleh keuntungan yang bebas dari batasan-batasan yang ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan telah menjadi tujuan yang mengontrol bentuk dan arah dari kegiatan ekonomi.<sup>55</sup>

Ada kesan bahwa dalam memenuhi kebutuhan personal dianggap sebagai kategori perekonomian yang bersifat serakah sehingga usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusaha swasta dalam hal ini dengan

---

<sup>55</sup> Max Weber, *Op.Cit.* Hal. 96

menggunakan kapital seperti uang, barang untuk mendapatkan keuntungan, membeli alat produksi dan menjual produk sebagai bagian daripada perekonomian yang ingin memenuhi kebutuhan personal.

Usaha dan semangat kapitalisme ini pun menjadi titik balik bagaimana saling ketergantungan tersebut menggambarkan pencarian keuntungan secara rasional dan sistematis di mana kesemuanya untuk memenuhi kebutuhan personal. Kapitalisme mampu bertahan hidup sedemikian lama melewati berbagai krisis dan reorganisasi serta lolos dari prediksi-prediksi suram dari kalangan kiri maupun kanan yang meramalkan bahwa kapitalisme akan runtuh tidak lama lagi.

Daya tahan hidup dari kapitalisme ini sungguh merupakan suatu misteri yang menuntut penjelasan dalam anggapan Henry Lefebvre, bahwa kapitalisme bisa bertahan hidup lewat penciptaan perluasan ruang (*production of space*).<sup>56</sup> Logika kapitalistik ini kemudian harus diporsikan pada bagaimana bisa mempertahankan hubungan dialektis antara politik negara dan kapital sebagai dominasi imperium di satu sisi sehingga akumulasi kapital tersebut beroperasi.

Akumulasi kapital lewat pertukaran pasar akan berkembang paling baik ketika dipayungi oleh struktur institusional hukum, hak milik pribadi, kontrak, dan keterjaminan nilai uang yang tertentu. Suatu negara kuat (*a strong state*) yang memiliki kekuatan polisional dan monopoli atas alat-alat kekerasan bisa menjamin terciptanya kerangka institusional semacam itu

---

<sup>56</sup> David Harvey, *Imperialisme Baru; Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*, Terj. Eko PD, (Jakarta; Resist Book, 2010) Hal. 97

dan mendukung keberadaan semua itu dengan tatanan-tatanan konstitusional tertentu.

Karena itulah, formasi negara, dibarengi dengan keberadaan konstitusi berwatidak borjuis, merupakan fitur-fitur krusial di dalam geografi historis yang panjang dari kapitalisme.<sup>57</sup> Segala macam pertukaran pasar kemudian memiliki etika dan norma pasar yang harus disepakati oleh para konstitusi sehingga maksud bersekutu tersebut sehingga memberikan dampak seperti watidak yang borjuis untuk melindungi diri dari etika, norma dan aturan yang mereka sepakti agar tetap berada pada lingkaran sekutu yang berkuasa.

Kaum kapitalis memang tidak secara absolut membutuhkan kerangka institusional untuk berfungsi, namun tanpa kerangka institusional mereka akan berhadapan dengan resiko-resiko yang lebih besar. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri dalam lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak mengakui atau tidak menerima aturan-aturan mereka dan cara-cara mereka menjalankan bisnis. Para pedagang dan *dealer* hanya bisa bertahan hidup jika mereka bisa menciptidakan kode etik dan kode bertindak mereka sendiri (sebagaimana halnya para pedagang uang jalanan di banyak negara Timur Tengah).

Mereka harus mengembangkan jaringan kepercayaan di antara mereka sendiri (dengan kadangkala bergantung pada jaringan keluarga sebagaimana yang pernah dilakukan Rothschilds pada abad kesembilan

---

<sup>57</sup> Ibid, Hal. 100

belas dan pada jaringan kekerabatan).<sup>58</sup> Hal tersebut telah menjadi siklus dalam perjalanan jaringan keluarga dan kekerabatan untuk menjalankan dan mengamankan usaha dan hak milik dari ancaman-ancaman kekuatan berlawanan atau kekuatan dalam negara itu sendiri, seperti kekuatan besar mafia di Italia.

### **1.7.3. Distribusi Kekayaan dan Ketimpangan Thomas Piketty**

Distribusi kekayaan adalah isu yang paling kontroversial dan banyak didiskusikan hari ini. Tetapi apakah kita benar-benar mengetahui evolusinya dalam jangka Panjang? Apakah dinamika akumulasi modal swasta menjadi tidak terhindarkan sehingga mengarah para konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang, sebagaimana Karl Marx yakini pada abad ke-19? Atau kekuatan penyeimbang dari pertumbuhan, persaingan dan progress teknologis mengarahkan pada tahap pembangunan selanjutnya sehingga mengurangi ketimpangan dan menciptakan hubungan antar kelas yang lebih harmonis.<sup>59</sup>

Abad 21 merupakan perjalanan Panjang dari kapitalisme. Distribusi kekayaan dan ketimpangan adalah hal yang paling utama dalam narasi kapital Thomas Piketty untuk menjelaskan bagaimana efek dari ketimpangan yang realistis mempengaruhi kebijakan ekonomi politik di suatu negara sehingga mampu melemahkan nilai-nilai meritokrasi sebagai point utama dalam masyarakat dan negara demokrasi.

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Thomas Piketty, *Kapital Pada Abad ke-21*, Terj. Enda Ara, (Kota Manado; CV. Global Indo Kreatif, 2021) Hal. 7

Distribusi kekayaan merupakan isu yang penting dan menarik bagi siapapun, kongkretnya, realitas fisik ketimpangan terlihat dengan mata telanjang dan secara natural mengilhami penilaian politik yang tajam tetapi kontradiktif. Petani dan bangsawan, pekerja dan pemilik pabrik, pelayan dan bankir; masing-masing memiliki pendapat unik tersendiri dan melihat aspek penting mengenai bagaimana orang lain hidup dan hubungan kekuasaan dan dominasi yang ada di antara kelompok sosial, dan pengamatan ini membentuk penilaian setiap orang mengenai apa yang adil dan tidak adil.<sup>60</sup>

Realitas fisik ketimpangan tersebut mempunyai dimensi psikologis yang tentu sangat subjektif dan bagaimanapun juga ketimpangan dan distribusi kekayaan juga harus mempunyai dimensi sistematis dan metodologis untuk melihat bagaimana dunia berkembang dalam siklus global yang tidak adil dan bagaimana seharusnya menjadi adil.

Segala macam bentuk distribusi kekayaan tentu juga memuat ketimpangan yang terjadi dimana-mana, sebagai akibatnya ada dimensi bagaimana para kelompok pemodal mempertahankan kekayaannya, tentu seperti pembahasan diatas bagaimana kelompok tersebut bersekutu dengan yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kekayaan seperti menghindarkan diri dan kelompok dari berbagai sumber ancaman, pemaksaan, segala klaim hak milik yang dilakukan oleh kelompok lain, pribadi, mafia sampai kolektif.

---

<sup>60</sup> Ibid. Hal. 9

Segala macam bentuk pertahanan kekayaan itu merupakan permainan kekuasaan dalam rangka memperkuat pertahanan dan mereka juga turut mempengaruhi alam demokrasi karena bersekutu dengan pemilik kekuasaan. Mafia dan kelompok keluarga-keluarga tersebut adalah juga merupakan elite yang merangkap penguasa sehingga pertanyaan penting tersebut, bagaimana demokrasi mampu melenyapkan sumber-sumber tersebut.

Dinamika rasio modal/pendapatan nasional antara modal dengan tenaga kerja tanpa melihat ketimpangan pendapatan atau kekayaan juga berpengaruh pada sejarah guncangan ekonomi pada tahun 1914-1945 bagaimana memahami perubahan rasio/modal pendapatan dan pemisaan modal-tenaga kerja selama abad ke-21.

Fakta bahwa guncangan ekonomi kemudian melahirkan bentuk lain dari kapitalisme, seperti kapitalisme patrimonial yang berkembang pada tahun-tahun awal abad ke-21, adalah sesuatu yang baru yang mana hal tersebut dianggap sebagai bagian besar dari pengulangan masa lalu dan karakter dari lingkungan pertumbuhan rendah sebagaimana pada abad ke-19.<sup>61</sup> Sejarah ketimpangan ekonomi sejak abad ke-19 dianggap paling mengerikan lantaran ketimpangan tersebut menjadikan 1% orang kaya memiliki hampir setengah atau lebih dari kekayaan dunia.

Distribusi kekayaan di tingkat global berkembang pada beberapa dekade mendatang. Akankah abad ke-21 menjadi lebih timpang

---

<sup>61</sup> Thomas Piketty, *Op.Cit.* Hal. 359

dibandingkan dengan abad ke 19. Bagaimana struktur ketimpangan dunia hari ini sangat berbeda dibanding era Revolusi Industri atau masyarakat pedesaan tradisional.

Di dalam semua masyarakat, ketimpangan pendapatan dibagi menjadi tiga; ketimpangan pendapatan tenaga kerja; ketimpangan dalam kepemilikan modal dan pendapatan yang menyertainya dan interaksi antar keduanya.<sup>62</sup> Ketimpangan tersebut memang menjadi persoalan dalam masyarakat seperti ketimpangan pendapatan yang sangat mencolok sehingga pendapatan yang diterima dari penduduk perkotaan lebih banyak lantaran dimotivasi oleh bergeraknya roda perekonomian yang besar, sementara pendapatan di desa hanya menggantungkan pada roda perekonomian agraris dan sejenisnya.

Begitupula dengan ketimpangan modal dan interaksi keduanya yang membedakan dari segi geografis sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan, peningkatan pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Banyak model ekonomi yang berangkat dari asumsi bahwa pengembalian modal nilainya sama untuk semua pemilik, tidak peduli seberapa besar atau kecil kekayaan mereka. Namun, ini jauh dari pasti: sangat mungkin bahwa orang yang lebih kaya memperoleh pengembalian rata-rata yang lebih tinggi daripada orang yang kurang kaya.

---

<sup>62</sup> Ibid

Yang paling jelas adalah bahwa seseorang dengan modal yang besar dibandingkan dengan modal yang kurang atau sedikit, memiliki sarana lebih besar untuk mempekerjakan konsultan manajemen kekayaan dan penasihat keuangan.<sup>63</sup> Ketimpangan antara mereka yang kaya dan tidak kaya juga salah satunya karena perbedaan kepemilikan modal, sehingga ketika melihat dan mengidentifikasi investasi dalam skala ekonomi jelas terlihat bagaimana dan siapa pemilik modal yang ada dalam wilayah sosial kita pada hari ini.

Seberapa lebih kaya lagi dana investasi negara dalam beberapa dekade mendatang? Menurut perkiraan yang tersedia, dana investasi negara pada tahun 2013 memiliki total investasi bernilai sedikit di atas \$5,3 triliun, di mana sekitar \$3,2 triliun adalah milik negara pengespor minyak seperti Dubai, Libya, Kazakhtan, Aljazair, Iran, Azerbaijan, Brunei, Oman dan banyak lainnya, dan sekitar \$2,1 triliun untuk dana negara-negara non-perminyakan terutama Cina, Hongkong, Singapura dan banyak dana kecil lainnya.

Sebagai referensi, perhatikan bahwa ini hampir persis sama dengan total kekayaan yang diwakili oleh miliuner *Forbes*, sekitar \$5,4 triliun pada tahun 2013. Dengan kata lain, miliuner saat ini memiliki sekitar 1,5% dari total kekayaan swasta dunia, dan dana investasi negara memiliki 1,5% lagi. Mungkin meyakinkan untuk dicatat bahwa ini menyisakan 97% dari modal global.<sup>64</sup> Proyeksi kekayaan global seperti ini berpengaruh pada indeks

---

<sup>63</sup> Ibid. Hal. 662

<sup>64</sup> Thomas Piketty, Hal. 702-703. Dalam pembahasan ini Piketty memberikan penekanan bahwa seseorang juga harus mempertimbangkan asset non finansial public seperti

kekayaan yang dikeluarkan oleh majalah *Forbes* sebagai bentuk dinamika distribusi modal global yang bersifat ekonomi dan politik.

Modal global dan politik tersebut yang dikelola oleh para miliuner katakanlah sehari-harinya kita menyaksikan bagaimana mereka kemudian mengambil alih perusahaan yang bangkrut, membeli tim sepak bola atau berinvestasi dalam kebutuhan global yang semata-mata untuk kepentingan mengembangkan keuntungan. Katakanlah yang kita kenal dari Indonesia bagaimana miliuner seperti Erick Tohir pernah membeli klub bola dan menjadi presiden club *Internazionale Milan* dengan membeli 70% saham *Inter Milan* dengan harga USD 480 juta dan mengakuisisi saham mayoritas Massimo Moratti dan beberapa club besar di Eropa lainnya.

Akankah miliuner dengan dana investasi tersebut bisa menguasai negara dan segala macam aktivitas dan pelayanan publiknya jika modal yang digunakan untuk mengambil alih perusahaan yang bangkrut, mengakuisisi saham mayoritas dalam suatu negara sehingga mempengaruhi akses pemerintah yang seperti kekurangan untuk mengelola hal tersebut jika diambil alih oleh individu seperti miliuner.

Erick Tohir adalah salah satu contoh miliuner dari Indonesia yang kemudian melakukan investasi tersebut, di Indonesia beberapa Miliuner yang masuk 10 besar orang terkaya versi Forbes juga berasal dari negara lain, katakanlah dominasi kelompok Tionghoa dan India yang berada pada

---

kepemilikan gedung publik, sekolah, rumah sakit dan lain lain. Serta asset finansial yang tidak secara formal dimasukkan dalam dana kekayaan negara, dan kemudian mengurangi utang pemerintah. Kekayaan publik bersih saat ini rata-rata kurang dari 3% kekayaan pribadi di negara-negara kaya.

posisi pertama dan 5 besar yang kemudian mengelola aspek seperti pertambangan, properti, tekstil, ekspor impor, perbankan dan lain-lain seperti Hartono bersaudara dan dari Kelompok India yaitu Sri Prakash Lokia yang juga berbisnis dibidang tekstil sampai distribusi pupuk.

Dalam tataran ekonomi global permintaan dan penawaran terhadap negara-negara pengeksport minyak mampu mempengaruhi investasi global dalam kurun waktu 2020-2030 jika bagian yang cukup besar dari yang diinvestasikan dalam dana investasi negara setiap tahun, dapat dibayangkan sebuah skenario di mana kekayaan negara akan memiliki 10-20% atau lebih modal global pada tahun 2030-2040 yang tergantung pada penawaran dan permintaan sehingga deposit minyak baru dan atau sumber energi ditemukan atau tidak dan seberapa cepat orang belajar hidup tanpa minyak bumi. Bagaimanapun, hampir tidak terhindarkan bahwa bagian mereka atas asset global pada tahun 2030-2040 akan setidaknya dua hingga tiga kali lebih besar saat ini berupa peningkatan yang signifikan.

Dana investasi negara-negara non-pengexport minyak menimbulkan masalah yang berbeda. Mengapa negara yang tidak memiliki sumber daya alam tertentu memutuskan untuk menguasai negara lain? Salah satu kemungkinannya tentu saja ambisi neokolonial, keinginan murni untuk berkuasa, seperti di era kolonialisme Eropa.

Namun yang membedakan adalah pada masa itu negara-negara Eropa menikmati keunggulan teknologi yang memastikan dominasi mereka. Cina dan negara-negara non minyak baru lainnya tumbuh dengan sangat cepat, tentu saja, tetapi bukti menunjukkan bahwa pertumbuhan

yang cepat ini akan berakhir begitu mereka mengejar ketertinggalan dengan para pemimpin dalam hal produktivitas dan standar hidup. Difusi pengetahuan dan teknologi produktif adalah proses penyamaan yang mendasar: begitu Negara yang kurang maju menyusul yang lebih maju, mereka berhenti tumbuh lebih cepat.<sup>65</sup>

Antara negara Eropa dan Cina kini menjelaskan posisi mereka dengan persaingan dagang atau yang kita kenal dengan perang dagang sehingga negara dunia ke tiga menjadi pasar terhadap distribusi kekayaan dan produksi utama mereka mulai dari teknologi, properti, tekstil, alat komunikasi dan transportasi sampai bisnis senjata.

Pun bagian yang sangat besar hari ini dari persediaan modal dunia tentu saja akan diakumulasikan di Asia dan terutama negara non minyak seperti Cina dan proyeksi ini sesuai dengan pengaruh yang terjadi di masa depan seperti hari ini dimana kelompok negara Cina menguasai dan mampu mengimbangi segala bentuk produksi ekonomi dari negara Eropa dan kemudian menjadi salah satu negara yang menjadi pengecualian dalam skenario utama ekonomi global dunia sebagaimana diprediksi sepanjang abad ke-21 dengan alasan proses mengejar ketertinggalan ekonomi dan proses transisi yang kita lihat bersama.

ekonomi global sangat mempengaruhi penjelasan mengenai transfigurasi kapitalisme itu sendiri sehingga peneliti memberikan catatan pada konsep kapitalisme yang menaruh perhatian pada analisis ekonomi

---

<sup>65</sup> Ibid.

politik. Walau pada dasarnya peneliti tidak langsung mengambil alih pada perhatian utama Karl Marx sebagai proyek intelektual selaku pengkaji kapitalisme dalam buku babon Das Kapital 1 tentang proses produksi kapitalis, Das Kapital 2 tentang proses sirkulasi kapital dan Das Kapital 3 tentang proses produksi kapitalis secara menyeluruh.

Perhatian utama Marx di dalam karyanya senantiasa adalah dinamika masyarakat borjuis: sasaran utama dari *Capital* adalah untuk mengungkapkan “hukum ekonomi mengenai gerak”, masyarakat tersebut melalui suatu pengkajian terhadap dinamika dasar produksi, di mana masyarakat ini berlandaskan kapitalisme sebagaimana ditekankan Marx di halaman pertama dari *Capital*, adalah suatu sistem produksi komoditi. Di dalam sistem kapitalis para pemroduksi tidak sekedar menghasilkan bagi kebutuhannya sendiri, atau untuk kebutuhan individu-individu yang mempunyai kontak pribadi dengan mereka; kapitalisme melibatkan pertukaran (*exchange market*) yang menyangkut nasional maupun dunia internasional.<sup>66</sup> Dalam analisis kapitalisme lokal-nasional memungkinkan melihat dari dua arah seperti struktur yang membentuk tindakan sosial namun tindakan sosial ini juga bisa membentuk dan merubah struktur.

Menurut pandangan Marx, pengejaran keuntungan merupakan hal yang hakiki dalam kapitalisme: “tujuan dari modal bukan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu, akan tetapi untuk menghasilkan keuntungan, namun pada saat bersamaan, di dalam ekonomi kapitalis

---

<sup>66</sup> Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis karya-tulis Marx, Durkheim dan Max Weber. (Jakarta; UI Press, 1985) Hal.57.

terdapat suatu kecenderungan struktural untuk menurunnya tingkat keuntungan. Jumlah keuntungan keseluruhan dalam ekonomi kapitalis bergantung pada nilai surplus yang tercipta dalam ekonomi itu adalah rasio dari modal konstan terhadap modal variable di dalam perekonomian sebagai keseluruhan, menguntungkan tingkat keuntungan rata-rata.<sup>67</sup>

Logika kapital seperti ini bisa kita gunakan untuk melihat konsesi Makassar sebagai kota yang sedang dibangun oleh aliansi modal dan negara, terlihat bahwa Makassar sebagai kota dibentuk oleh logika kapital namun tidak dengan logika kebutuhan warga kota Makassar. Seperti contoh, proyek reklamasi pantai Losari, CPI logika Pembangunan ini didorong oleh motif akumulasi bukan karena faktor ekologi dan lingkungan yang akan dilestarikan malah merusak kadar lestari ekologi sekitar seperti daerah Galesong Kabupaten Takalar yang imbas abrasi sampai berefek pada 11 desa lantaran penambangan pasir laut untuk reklamasi.

Secara khusus dinamika kapitalisme abad 21 yang dijelaskan oleh Thomas Piketty memberi penafsiran bahwa kapitalisme kembali menunjukkan ciri-ciri zaman dahulu yang terjadi pada abad ke 19, di mana kapitalisme saat itu berwajah patrimonial (*patrimonial capitalism*) di dalam sistem ini, kekayaan berputar dalam lingkaran keluarga besar dan diwariskan antar generasi.

Bagaimana pada tahun 1914-1945 guncangan ekonomi mengalami perubahan rasio modal/pendapatan dan pemisahan modal-tenaga kerja

---

<sup>67</sup> Ibid, Hal. 65

selama abad ke 21.<sup>68</sup> Jika kekayaan diwariskan dan terus tumbuh lebih cepat dari ekonomi produktif, maka masyarakat akan terbagi antara kelas pekerja yang hidup dari upah, inovatif dan kelas rentier yang hidup dari modal dan warisan kekayaan seperti tanah, saham dan properti.

Musuh negara dan republik kita hari ini adalah kelas rentier, para mereka yang mampu mendanai partai politik, mendanai kampanye, media bahkan membeli kebijakan lewat lobi dan patronase ini semua merupakan preseden buruk untuk melemahkan demokrasi substansial. Mereka menciptakan pewarisan kekuasaan sama seperti mereka mewariskan kekayaan dan modal bagi generasi keluarganya, demokrasi substansial semakin jauh dan demokrasi prosedural adalah formalitasan semakin tidak mencerminkan keadilan sosial, namun terlihat sah dan harus dilaksanakan, ujungnya adalah mempertaruhkan etika republik.

Thomas Piketty membedakan kelas rentier dan kelas pekerja, antara yang membahayakan demokrasi dan yang menyeimbangkan demokrasi dari ekonomi politik karena roda yang berputar, lain halnya dengan kelompok elite yang menjadi landasan konseptual pada penelitian ini. Elite dalam pengertian harfiahnya mengandung makna bahwa anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan yang melekat pada dirinya yang tentu mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat pada umumnya.

Terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh para pemikir yang tergolong elitee theorists, seperti Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca dan

---

<sup>68</sup> Thomas Piketty, Kapital Pada Abad ke-21. (Manado; Globalindo Publisher, 2021) Hal. 359.

Suzanne Keller menunjuk pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok golongan lainnya. Bahkan Pareto melukiskan pengertian elite dengan mengajak untuk mengamati kehidupan masyarakat dengan segala macam aktivitas yang ada di dalamnya. Dia menawarkan angka indeks sebagai penunjuk kemampuan individu dalam setiap cabang kehidupan yang ada di masyarakat.<sup>69</sup> Pareto dalam hal ini mengembangkan gagasan tentang elite yang melihat kekuasaan dalam masyarakat tidak pernah benar-benar berada di tangan massa, namun ada di tangan kelompok elite yang mengendalikan.

Ada perbedaan mendasar dari teori Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca dianggap sebagai pencetus teori elite klasik dari teori klasik sirkulasi elite sampai ke teori kelas penguasa dan juga sesaman dengan Robert Michels yang menjelaskan tentang hukum besi oligarki di mana pemimpin lebih sering dikultuskan dan disakralkan lantaran kharismanya lebih didahulukan sebagai aspek dominasi maka dari itu pemimpin mesti menggunakan hukum besi.

“Janganlah menjadi penghalang antara saya dan matahari”, kalimat ini dianggap sebagai tugas suci dari prosa Jerman dari Max Stirner seorang individualisme radikal dan filsuf Jerman bahwa hendaknya orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dalam perubahan politik prihatin dengan diri mereka baik sekarang maupun di masa yang akan datang

---

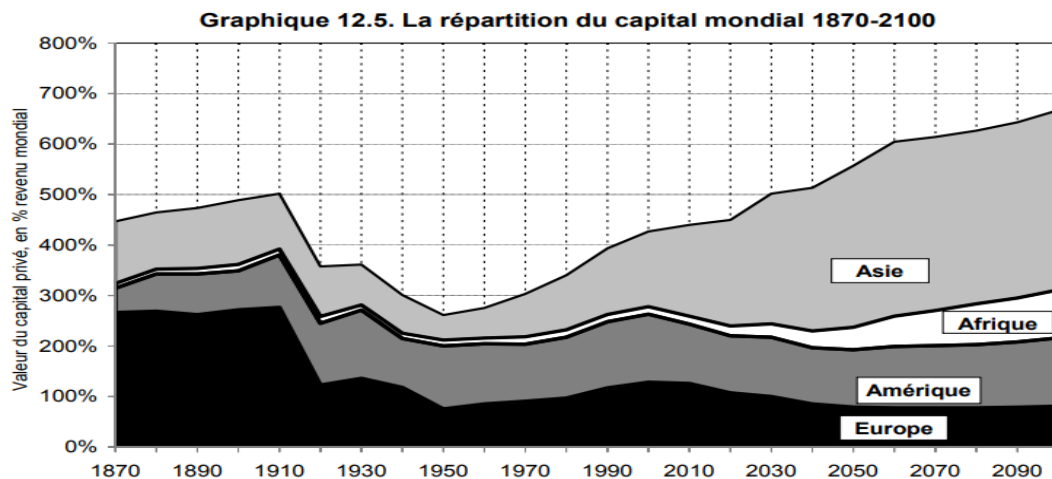
<sup>69</sup> Haryanto, Elite, Massa dan Kekuasaan suatu Pengantar. (Yogyakarta; PolGov, 2017) Hal.3.

“tugas suci” tersebut tidak akan mendorong rakyat untuk memikirkan negara.<sup>70</sup> Michels sangat skeptis terhadap demokrasi langsung terutama dalam organisasi besar bahkan menurutnya organisasi sosialis maupun proletar pun akan jatuh pada struktur oligarki.

Dalam republik, organisasi atau negara demokrasi bisa menjadi topeng bagi kekuasaan elite yang bisa mendominasi dan mengkonsolidasikan kekuatan dengan mengakumulasi struktur dan aturan main dalam organisasi tersebut, terlalu deterministik dan menganggap semua yang ada dalam organisasi tersebut dipastikan berpihak pada hukum besi oligarki tanpa adanya perubahan, reformasi atau inovasi yang berarti untuk perkembangan sehingga struktur yang semakin kompleks yang mendorong sentralisasi kewenangan.

**Gambar 1.7.3.1**

**Distribusi Modal Dunia**



Sumber: Menurut skenario sentral, negara-negara Asia seharusnya memiliki sekitar setengah dari modal dunia pada akhir abad kedua puluh satu. Sumber dan seri: lihat [www.piketty.pse.ens.fr/capital21c](http://www.piketty.pse.ens.fr/capital21c)

<sup>70</sup> Robert Michels, Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi. (Jakarta; CV. Rajawali, 1984) Hal. 57.

Dalam skenario utama, evolusi rasio modal/pendapatan global asumsinya adalah bahwa tingkat tabungan akan stabil di sekitar 10% dari pendapatan nasional karena proses konvergensi internasional ini mendekati distribusi tertinggi. Dalam hal ini, akumulasi modal akan mencapai proporsi yang sebanding di mana pun. Bagian yang sangat besar dari persediaan modal dunia tentu saja akan diakumulasikan di Asia, terutama Cina, sesuai dengan bagian produksi global Kawasan ini pada masa depan.

Namun menurut skenario utama, rasio modal/pendapatan akan sama di semua benua, sehingga tidak akan ada ketidakeimbangan yang besar antara tabungan dan investasi di wilayah mana pun. Afrika akan menjadi satu-satunya pengecualian: dalam skenario utama yang digambarkan dalam gambar di atas, rasio modal/pendapatan diharapkan lebih rendah di Afrika daripada di benua lain sepanjang abad ke 21, karena pada dasarnya proses mengejar ketertinggalan ekonomi oleh Afrika berjalan jauh lebih lambat dan transisi demografinya tertunda.<sup>71</sup>

Bagaimanapun, ancaman divergensi internasional yang disebabkan oleh akuisisi bertahap negara-negara kaya oleh Cina (atau oleh dana investasi negara eksportir minyak) tampaknya kurang dapat dipercaya dan berbahaya dibandingkan jenis divergensi oligarki, yaitu, proses di mana negara-negara kaya akan menjadi miliuner mereka sendiri atau, lebih umum lagi, di mana semua negara, termasuk Cina dan eksportir minyak

---

<sup>71</sup> Ibid.

bumi, akan semakin dimiliki oleh miliuner dan multijutawan.<sup>72</sup> Segala bentuk prosesnya telah berjalan dengan semestinya walaupun pertumbuhan global melambat dan persaingan internasional untuk mendapatkan modal bersaing ada banyak alasan bahwa ketimpangan akan jauh lebih besar daripada distribusi modal yang beredar sampai hari ini. Fenomena seperti ini antara ketimpangan dan distribusi modal akan memperlihatkan divergensi oligarki akan terjadi dan dampak dari divergensi internasional akan jauh lebih besar.

Secara khusus, penting untuk ditekankan bahwa ketakutan akan meningkatnya kepemilikan orang Cina yang meluas saat ini adalah murni ilusi. Negara-negara kaya yang ternyata jauh lebih kaya dari yang mereka kira. Total *real estate* dan asset keuangan setelah dikurangi utang rumah tangga Eropa saat ini berjumlah 70 triliun euro. Sebagai perbandingan, total asset dari berbagai dana investasi negara Tiongkok ditambah cadangan Bank Sentral Cina mewakili sekitar 3 triliun euro, atau kurang dari satu per dua puluh jumlah sebelumnya.<sup>73</sup>

Negara-negara kaya tentu akan menjadi kekhawatiran tersendiri jika melihat perkembangan negara berkembang saat ini dengan populasi yang besar seperti Cina dan India dan tentu dengan segala bentuk persaingannya akan lebih mudah menjadikan negaranya sebagai negara yang juga akan mencari jalan keluar bagaimana sumber kesulitan rumah

---

<sup>72</sup> Thomas Piketty, *Loc. Cit*

<sup>73</sup> *Ibid.* hal. 710

tangga dan publiknya dapat teratasi jika nilai perkembangan modal swasta mampu mengimbangi semua ketimpangan di negaranya.

Tentu dengan melihat grafik distribusi modal dunia yang dalam persentase pendapatan swasta dunia terlintas pertanyaan akankah Cina akan menguasai dunia, dimana mereka terlihat melakukan dominasi terhadap teknologi dan pertumbuhan kapitalnya tumbuh dengan sangat cepat hari ini, belum lagi dari sistem keamanan dunia, Cina pun berhasil mendamaikan ketegangan dunia di Timur Tengah, dengan konsesi perdamaian antara Irak dan Iran dan tentu yang terbaru adalah Cina mampu membuka keran bisnis dan perdamaian di Afganistan dan juga memfasilitasi pemerintahan Taliban setelah Amerika Serikat menyatakan mundur dari negara tersebut.

Kapitalisme adalah sifat dari suatu bentuk atau metode perubahan ekonomi yang tidak pernah bisa diam. Dan karakter evolusioner dari proses kapitalis ini tidak hanya tergantung pada fakta bahwa kehidupan ekonomi berjalan di dalam lingkungan sosial dan alam yang berubah, dan perubahan ini mengubah data dan tidakan ekonomi; fakta ini adalah penting dan perubahan-perubahan seperti perang, revolusi dan seterusnya seringkali mengondisikan perubahan industri.<sup>74</sup>

Mesin kapitalis bekerja dalam proses yang terus menerus yang dalam Bahasa Schumpeter adalah proses destruksi kreatif dimana prosesnya adalah menghancurkan struktur lama dengan penciptaan barang

---

<sup>74</sup> Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism & Democracy*, Terj. Teguh Wahyu Utama, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003) Hal. 133-134.

konsumen baru, metode baru produksi atau transportasi, pasar baru sampai dengan pembentukan dari organisasi industri baru yang diciptakan oleh perusahaan kapitalis. Terjadi pertumbuhan dan proses perubahan kualitatif, kita menyaksikan bangkitnya era digital, *artificial intelligence*, rel kereta api yang tadinya berpusat di pulau Jawa kini sudah bisa dinikmati diberbagai kota di luar pulau Jawa seperti Sulawesi-Selatan, produksi listrik dan lain lain.

Institusi politik dan ekonomi, yang tak lain adalah hasil pilihan masyarakat, bisa berwatak inklusif dan merangsang pertumbuhan ekonomi atau yang terjadi bisa juga sebaliknya, mereka menjadi ekstraktif dan menghambat pertumbuhan. Negara akan gagal kalau ditunggangi oleh institusi ekonomi ekstraktif yang didukung oleh institusi politik ekstraktif yang menghambat atau sama sekali menyumbat pertumbuhan ekonomi.

Berarti, pilihan-pilihan jenis institusi politik oleh masyarakat akan menjadi isu sentral dalam upaya kita memahami penyebab kesuksesan atau kegagalan suatu negara. Kita harus paham mengapa perpolitikan suatu bangsa bisa melahirkan institusi inklusif yang mendorong pertumbuhan, sementara perpolitikan sebagian bangsa lainnya dalam sejarah peradaban dunia sudah dan masih terus melahirkan berbagai institusi ekstraktif yang menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Daron Acemoglu, James A. Robinson, *Mengapa Negara Gagal; Why Nations Fail; Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan*, Terj. Arif Subiyanto, (Jakarta; Kompas Gramedia, 2003) Hal. 88.

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat jika ditopang oleh kebijakan yang memberi harapan dan kelanjutan hidup tentu juga diperkuat oleh institusi politik, seperti kebutuhan akan pangan dan produksi yang beriringan dengan peningkatan dan akses merata transportasi untuk meningkatkan hasil produksi maka dibangunlah jalan yang baik dan alur transportasi untuk itu sangat mendukung. Institusi politik dan ekonomi dalam hal ini diharapkan mampu secara logis dan jelas kiranya institusi yang dimaksud dapat mendatangkan kemakmuran.

Akan tetapi berbeda halnya jika institusi politik dan ekonomi ini dikelola oleh swasta atau sampai kemudian mengganggu jalannya dana dari negara yang biasa kita sebut dengan jebakan utang, seperti yang terjadi tahun dimana Indonesia mengalami kegagalan pembangunan ditengah pertumbuhan pembangunan yang demikian massif. *International Monetary Found (IMF)*, diwaktu yang bersamaan memuji sekaligus menjatuhkan saat Indonesia di tahun 1997 mengalami kegagalan untuk membayar utang. Hal inilah yang kemudian dimaksud oleh Daron dan James dalam temuannya "Mengapa Negara Gagal" kenapa begitu mudah ditunggangi oleh institusi ekonomi ekstraktif yang didukung oleh institusi politik ekstraktif dalam waktu yang bersamaan.

Institusi politik dan institusi ekonomi yang ekstraktif sekarang ini terjadi di mana-mana, baik diksi jebakan utang, menambah pokok dan bunga utang untuk membiayai proyek besar seperti kasus kereta api cepat dan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan di mana institusi ekonomi atau pihak swasta atau sebutan lainnya adalah investor menyatakan diri untuk mundur

dan belum bulum memperlihatkan komitmen yang jelas, begitupun juga dengan proyek besar kereta api cepat yang hingga kini bermasalah dan menjadi isu terhadap kondisi politik electoral dan kondisi politik identitas dengan membawa nama China sebagai biang dari jebakan utang yang bertambah.

Logis dan cukup jelas, bahwa semua orang menginginkan untuk membangun negara bangsa melalui negara, institutis politik dan ekonomi yang tentunya akan mendatangkan sebuah kesejahteraan, bahkan diktator, borjuis, konglomerat mempunyai keinginan yang sama untuk mencapai kemakmuran setinggi tingginya.

Akan tetapi banyak diantara institusi tersebut lebih cenderung berkonflik diantara sesama institusi. Lebih tepatnya mungkin, bagaimana mendistribusikan kemakmuran, siapa yang berwenang mengaturnya. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bagaimana ekonom Joseph Scumpeter memberikan tesis, bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan tekhnologi selalu disertai oleh penghancuran kreatif oleh institusi baru kepada institusi yang lama, perusahaan pendatang akan menggeser perusahaan yang baru.

Sejarah Eropa dengan dengan jelas menggambarkan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh penghancuran kreatif. Di ambang Revolusi Industri pada abad ke-18, mayoritas pemerintahan di Eropa dikendalikan oleh para bangsawan dan kelompok elite tradisional, yang kekayaannya berasal dari penguasaan tanah atau jual beli hak istimewa yang dihadiahkan oleh pihak kerajaan.

Sama dengan gelombang penghancuran pabrik-pabrik dan wilayah perkotaan pasti akan banyak memakan lahan, mengurangi pendapatan yang berasal dari ongkos sewa tanah dan melipatgandakan upah yang harus dibayar oleh para pemilik lahan kepada pekerjanya.<sup>76</sup> Para bangsawan dan kelompok elite tradisional adalah suatu entitas tersendiri dari kelompok yang juga ketika mereka berkuasa tak jarang bahwa mereka juga adalah penghambat kemajuan ekonomi dan merusak mesin-mesin kemakmuran.

Kemunculan pebisnis baru itu dengan telak akan mengikis hak-hak istimewa maupun monopoli yang semula dinikmati kelompok elite. Disini terlihat jelas bahwa kelompok elite akan terpuruk menjadi korban industrialisasi. Arus urbanisasi dan munculnya kelompok kelas menengah dan pekerja yang bersikap kritis jelas mengancam monopoli kekuasaan politik yang selama berabad-abad dicengkeram para bangsawan tuan tanah.

Jadi, Revolusi Industri bukan saja memojokkan para bangsawan secara ekonomi, tapi juga secara politis, sebab kelompok itu terancam kehilangan kekuatan politiknya. Oleh karena terancam akan kehilangan kekuatan ekonomi dan politik, kaum elite itu menggalang kekuatan untuk menangkal gelombang industrialisasi.<sup>77</sup> Alasan mengapa pihak yang berkuasa belum tentu memilih institusi ekonomi yang berpotensi menciptakan kemakmuran, bisa dilacak dari cara mereka memilih institusi

---

<sup>76</sup> Op.Cit. Hal. 90

<sup>77</sup> Daron Acemoglu, James A. Robinson. Loc.Cit.

politik. Dalam sebuah rezim diktator, ada beberapa kelompok elite yang berkuasa membangun berbagai institusi ekonomi sesuai dengan selera mereka.

Tidakkah mereka ingin mengubah struktur institusi politik menjadi lebih beragam? Pada umumnya tidak, sebab langkah ini bisa menjadi boomerang yang menerjang dan melemahkan kekuasaan politik mereka, dan pada gilirannya melanggengkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.<sup>78</sup> Di beberapa negara bangsa, ekonomi ekstraktif ini akan memunculkan konflik baru lantaran distribusi kekuasaan yang tidak bisa diharap oleh para penguasa untuk menunggu mereka mereformasi institusi politiknya dan membagi kekuasaan politik dengan rakyat.

Salah satunya cara untuk merombak berbagai institusi politik itu adalah memaksa para penguasa membangun institusi yang lebih beragam. Maksud dari Institusi politik beragam ini adalah suatu teori menciptakan politik klan, dinasti, orang kuat lokal, familisme, politik identitas, kelompok oligarki yang cenderung berusaha melakukan konsolidasi kekuasaan pemerintahan dan kemudian cenderung akan memonopoli kekuasaan.

#### **1.7.4. Teori Oligarki Jefferey Winters dan Robert Michels**

Penyebutan oligark sering dilakukan dalam kepustakaan negara-negara pasca kolonial dan pasca komunis. Sedangkan istilah itu lebih jarang ditemukan dalam konteks negara industri maju, sebagian besar karena oligarki biasa dianggap telah dikalahkan demokrasi elektoral.

---

<sup>78</sup> Ibid. Hal. 92.

Contohnya, pandangan dominan di antara ahli-ahli Amerika menganggap demokrasi pluralis, per definisi, hampir mustahil bersifat oligarkis.<sup>79</sup> Dalam demokrasi pluralis ini dikembangkan oleh Robert A Dahl yang menyimpan pertanyaan mengenai seberapa besar otonomi yang diserahkan kepada para pelaku demokrasi dan bagaimana negara melakukan kontrol terhadap otonomi tersebut.

Bentuk dari tipologi kekuasaan yang merujuk kepada oligarki memuat tentang pembahasan dari Aristoteles dan Michels, dua penggagas teori paling terkemuka yang banyak disebut dalam kepustakaan. Menyangkut tipologi Aristoteles yang mendefinisikan bentuk-bentuk kekuasaan berdasarkan pemegangnya: satu orang, sedikit orang atau banyak orang.

Begitu juga dalam pembahasan Michels yang terkenal tentang hukum besi oligarki yang menjelaskan tentang bagaimana kaum elite akhirnya mendominasi semua organisasi yang kompleks.<sup>80</sup> Michels dalam hal ini memberikan penekanan bahwa lumpuhnya demokrasi disebabkan oleh dominasi pemimpin atas masyarakat dan organisasi, oligarki menjadi pusat kendali masyarakat dan organisasi yang di mana mereka adalah bagian dari birokrasi atau organisasi besar. Individu hanya bisa menyerahkan kekuasaan yang efektif kepada mereka yang berada didalam lingkaran kekuasaan yang mereka anggap sebagai pimpinan dari lembaga tersebut.

---

<sup>79</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, Terj. Zia Anshor, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011) Hal.2

<sup>80</sup> Ibid. Hal. 3

Unsur kekayaan merupakan syarat utama dari oligarki. Kekayaan pribadi yang sangat besar merupakan pembeda yang paling mencolok dalam lingkungan sosial dan menciptakan jarak yang lebar di semua aspek wilayah dalam tubuh masyarakat kita. Hal ini merupakan perkara yang sejak dari dulu menciptakan gap atau jarak pemisahan bagaimana kekuasaan dari satu orang, sedikit orang atau banyak orang membuat pembatasan sosial dan sikap sosial terhadap perbudakan, diskriminasi ras dan etnis sampai dengan beberapa sikap yang sengaja mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat sosial. Sikap eksklusifitas inilah yang kemudian memperlebar jarak sosial dan menciptakan politik identitas dalam hubungan dan konstruksi sosial sehingga muncul namanya konflik antar ras, etnis dan juga kelompok lantaran perbedaan kekuasaan dan kekayaan pribadi.

Pengaruh dari kekuasaan minoritas tersebut diantaranya berbagai macam tokoh yang memiliki kekuasaan berlebihan, di dalam maupun di luar pemerintahan, telah disebut sebagai oligark. Terkesan minoritas kekuasaan tersebut mendominasi mayoritas di banyak konteks. Yang penting adalah bagaimana minoritas melakukannya dan melalui sumber daya kekuasaan apa. Pemahaman atas oligark dan oligarki bermula dengan pengamatan bahwa ketidaksetaraan material ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik ekstrem.

Ketidaksetaraan material di antara warga negara diakui secara luas sebagai isu politik penting, tapi bukan sebagai sumber utama kekuasaan

politik yang tak seimbang.<sup>81</sup> Oligark dan oligarki tentu berbeda posisi dan penafsiran dalam hal ini, oligar didefenisikan sebagai tokoh, orang, elite atau dalang dalam hal melaksanakan sumberdaya kekuasaan, pemerintahan sementara sumberdaya kekuasaan, bentuk pemerintahan dan sistemnya adalah oligarki yang dijalankan oleh orang, elite atau dalang yang minoritas.

Kenyataannya, kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi. Menyangkalnya berarti mengabaikan analisis politik berabad-abad yang menelusuri akrabnya hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Pada 1878, de Laveleye menulis bahwa para filsuf dan pembuat hukum zaman dulu tahu benar, berdasarkan pengalaman, bahwa kemerdekaan dan kesetaraan politik hanya bisa ada ketika didukung keseraraan kondisi.

Hubungan dasar yang sama antara kekuasaan material dan politik dinyatakan kembali lebih dekat dengan zaman kita oleh Robert Dahl (1985,4) yang merujuk kepada para “raja maling” (*robber baron*) kaya-raya di Amerika Serikat paruh kedua abad kesembilan belas sebagai “kumpulan warga negara yang punya sumber daya berlebihan untuk dilibatkan dalam kehidupan politik”. Klaim sederhananya adalah bahwa distribusi sumber daya material di antara anggota-anggota suatu komunitas politik, demokratis atau lainnya punya pengaruh besar pada kekuasaan relatif.

---

<sup>81</sup> Ibid. Hal. 6

Makin tak imbang distribusinya, makin besar kekuasaan dan pengaruh orang-orang kaya, dan makin kuat pula pengaruh kesenjangan material pada motif dan tujuan politik mereka.<sup>82</sup>

Hubungan antara oligark dan oligarki memberikan pengaruh yang terpusat pada kuasa kekayaan dan segala bentuk sistem politik dalam sebuah negara bangsa puserannya pada aktifitas kuasan tersebut. Kesenjangan material, ketidaksetaraan kondisi membuat konflik semakin melebar dan mempengaruhi jalannya sistem politik dan kekuasaan sehingga akan berdampak kepada semua bentuk kekuasaan dan langkah tersebut merupakan agenda dari sistemik minoritas oligarki misalnya turut serta dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan dari pusat sampai kekuasaan pemerintahan lokal. Hubungan antara kekuasaan dan kekayaan merupakan hubungan yang abadi dalam studi dan kajian ilmu politik.

Bahwasanya hubungan tersebut adalah sifat utama dalam hal mempertahankan kekayaan. Warga negara yang oligark tentu menginginkan adanya perlindungan sumber daya material mereka berupa harta kekayaan. Cara mendapatkan perlindungan adalah dengan bergaul, melingkar pada sistem kekuasaan apakah berada di dalam ataupun di luar sebagai pertahanan kekayaan, pertahanan harta dengan tujuan sebagai mengamankan klaim atas dasar kekayaan dan hak milik.

Elite dan oligark sama-sama menggunakan kekuasaan dan pengaruh minoritas. Namun kemampuan mereka melakukan itu berdasar pada jenis

---

<sup>82</sup> Ibid. Hal. 7

kekuasaan yang sangat berbeda. Kenyataan ini telah menimbulkan hasil politik yang berbeda-beda sekali. Salah satu perbedaan paling dasar adalah bahwa hampir semua bentuk pengaruh minoritas elite telah ditantang melalui pergulatan dan perubahan demokratis, sementara kekuasaan oligarkis, karena hakikatnya beda, belum.

Mengapa kekuasaan politik maha besar oligark sangat kebal terhadap semua tantangan dari demokrasi kecuali yang paling radikal yang justru sengaja dicegah oleh rancangan demokrasi yang ada. Oligark bisa punya bentuk kekuasaan elite di atas atau bercampur dengan dasar material. Jika demikian maka oligark bisa sekaligus menjadi elite, tetapi elite tak bisa menjadi oligark kalau tidak memiliki dan menggunakan sendiri kekuasaan material yang besar.<sup>83</sup>

Oligark tidak mesti sama dengan kapitalis, pemilik bisnis, atau CEO korporat. Dengan mengutamakan kepemilikan sarana produksi, teori Borjuis kapitalis Marx memusatkan perhatian kepada kekuasaan pelaku yang menggunakan sumber daya material di bidang ekonomi dengan efek sosial dan politik yang penting. Dalam teori oligarki, pusat perhatiannya pada kekuasaan pelaku yang menggunakan sumber daya material di bidang politik dengan efek ekonomi yang penting.

Kedua pendekatan sama-sama materialis, tapi beda cara. Baik oligark maupun oligarki tak didefinisikan melalui cara produksi atau penarikan surplus tertentu. Oligarki juga tak didefinisikan oleh kelembagaan tertentu;

---

<sup>83</sup> Ibid. Hal. 12-13

makanya oligarki kebal terhadap reformasi kelembagaan. Seorang bangsawan feodal dapat menjadi oligark tapi jelas bukan kapitalis. Seorang pemilik bisnis bisa menjadi kapitalis, namun mungkin kekuasaan materialnya masih kurang untuk menjadi oligark.<sup>84</sup>

Seorang CEO perusahaan besar boleh jadi mengerahkan banyak sumber daya material demi pemegang saham, tapi masih menerima gaji yang kurang daripada yang diperlukan supaya dia bisa memegang dan menggunakan kekuasaan oligarkis. Individu seperti itu ialah anggota elite korporat, tapi bukan oligark. Begitu juga pejabat tinggi pemerintah (elite juga) dapat menyalurkan miliaran dolar tiap hari melalui anggaran negara, namun secara pribadi mungkin hanya punya sumber daya setara warga negara kelas menengah atas.

Namun, jika pejabat itu korup dan mengumpulkan kekayaan pribadi (dengan cara apapun), maka kiranya dia menjadi elite pemerintahan sekaligus oligark yang mampu melibatkan diri dalam politik pertahanan kekayaan.<sup>85</sup> Kekuasaan material yang dimiliki oleh oligark tentu menjadi tangan besi seperti yang disebut oleh Michels, dikarenakan oligark tidak terpengaruh oleh reformasi kelembagaan politik walau dalam kenyataannya lembaga politik tersebut bisa mengatur, mengekang, menjinakkan dan merubah sifat oligark namun pada faktanya banyak terjadi kasus kekerasan dan pemaksaan hanya untuk mempertahankan kekayaan.

---

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ibid. Hal.14

Apa pun bentuk pemerintahannya jika ketidaksetaraan politik ekstrem selalu menjadi pembanding terhadap ketidaksetaraan kekuasaan material ekstrem. Oligark dan oligarki muncul lantaran beberapa aktor dan tokoh berhasil menumpuk sumber daya kekuasaan material untuk mereka jadikan alat mempertahankan kekayaan. Oligark dan oligarki pun tidak mampu dilenyapkan melalui prosedur demokratis akan tetapi jika distribusi sumber daya material tersebut yang sangat tidak seimbang dan tidak setara ditiadakan, pertanyaannya yang hadir; kenapa antara demokrasi dan oligarki tidak saling meniadakan.

Mengapa demokrasi dan oligarki tidak saling meniadakan, bahwasanya merekapun juga mempunyai distribusi jenis kekuasaan yang berbeda. Demokrasi merujuk kepada kekuasaan politik formal yang tersebar berdasarkan hak, prosedur, dan tingkat partisipasi rakyat. Sementara oligarki didefinisikan sebagai kekuasaan material terkonsentrasi berdasarkan penegakan klaim atau hak atas harta dan kekayaan.<sup>86</sup> Mengapa demokrasi dan oligarki saling cocok, ada kesan bahwa selama produksi dan *private property* tidak terganggu maka oligarki bersikap dingin-dingin saja atau kedua ranah kekuasaan mereka tidak saling bertabrakan lantaran sejak awal sumber daya material dari oligarki butuh perlindungan atas kekayaan dan harta dan itu melalui lembaga-lembaga negara dan politik yang berada dalam kekuasaan demokrasi.

---

<sup>86</sup> Ibid. Hal. 16.

Malah demokrasi dan oligarki bisa hidup berdampingan bersama secara terus menerus dan juga selama kelas bawah tidak menggunakan partisipasi politik mereka yang lebih luas untuk merebut kekuasaan dan hak istimewa kelas terkaya. Sebuah sistem politik seolah setara namun tidak setara yang berada dalam lingkungan demokrasi yang kapitalis.

Dalam profil kekuasaan individual yang paling berkuasa sampai yang paling tidak berkuasa adalah alat bantu yang memusatkan perhatian kepada posisi kekuasaan relatif pelaku individual, dalam kebiasaan kekuasaan itu dalam formasi sosial semua individu mempunyai satu kadar kekuasaan sekecil apa pun itu. Karena untuk memahami oligark dan oligarki pendekatan sumber daya kekuasaan mengutamakan kapasitas, alat, atau posisi tertentu yang dimiliki orang dalam berbagai kadar dan digunakan demi pengaruh sosial dan politik.<sup>87</sup> Kekuasaan dapat saja berubah sesuai dengan kondisi perubahan dalam waktu rezim tertentu dan untuk mengukur kekuasaan tersebut juga menggunakan beberapa pendekatan untuk menjelaskan bagaimana presiden, pemimpin gerakan massa, panglima tantara bersenjata atau oligark jauh lebih berpengaruh daripada rata-rata orang karena akumulasi atau distribusi relatif yang mereka punyai sangatlah besar baik yang tersembunyi atau yang nyata.

Sejauh ini hasil analitis terpenting pendekatan sumber daya kekuasaan adalah mempertajam perbedaan antara bentuk kekuasaan minoritas elite dan oligarki. Lima sumber daya kekuasaan individual

---

<sup>87</sup> Ibid. Hal. 17.

diantaranya kekuasaan berdasarkan hak politik, kekuasaan jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi, kekuasaan pemaksaan (*koersif*), kekuasaan mobilisasi dan akhirnya kekuasaan material. Ini belum daftar lengkap sumber daya kekuasaan, tapi sudah mencakup sebagian terbesar jenis kekuasaan yang bisa dimiliki individu dalam politik dan masyarakat.

Keempat sumber daya kekuasaan yang disebut pertama, ketika dipegang individu secara terkonsentrasi dan eksklusif, menghasilkan elite. Hanya yang terakhir, kekuasaan material yang menghasilkan oligark dan oligarki.<sup>88</sup> Jadi ada perbedaan yang melekat pada sumber daya kekuasaan antara elite dan oligark dan oligarki. Elite belum tentu adalah oligark karena bisa saja tokoh, aktor elite tidak mempunyai kekuasaan material, sementara oligark dan oligarki juga sudah tentu sebagai elite karena dengan kekuasaan material yang maha besar bisa mempengaruhi semua sumber daya kekuasaan seperti hak politik, kekuasaan jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi, kekuasaan pemaksaan, dan kekuasaan mobilisasi untuk mempertahankan harta dan kekayaan.

Oligarki yang timbul dari demokrasi terancam oleh dua macam bahaya, yaitu: pemberontakan massa dan (dalam hubungan erat dengan pemberontakan ini yang sering merupakan sumbernya) transisi ke arah kediktatoran waktu salah satu oligarki berhasil mencapai kekuasaan tertinggi. Dari kedua bahaya ini, satu datang dari bawah, sedangkan yang

---

<sup>88</sup> Ibid. Hal. 19.

lain muncul dari kalangan dalam oligarki tu sendiri: disatu pihak terdapat pemberontakan dan di pihak lain perebutan kekuasaan.

Konsekuensinya adalah, bahwa dalam semua partai kerakyatan modern semangat persaudaraan sangat jauh, tak terdapat saling percaya dan kejujuran; senantiasa terdapat pertarungan terpendam, suasana kejengkelan yang ditentukan oleh saling curiga para pemimpin, dan suasana demikian tela menjadi ciri khas yang paling hakiki dari setiap demokrasi.<sup>89</sup> Persaingan terhadap para oligarki dalam demokrasi juga memberikan bahaya yang tak lasim seperti pemberontakan massa pendukung dari para oligarki masing masing dan perebutan kekuasaan. Hal ini cukup menyita perhatian publik di Indonesia bagaimana karakter dari dinasti kekuasaan yang memunculkan citranya masing-masing.

Oligarki lokal dalam bahasa peneliti juga memberikan penekanan dan penanda bahwa yang terjadi pada tingkatan lokal adalah sebuah dominasi yang kemudian bersumber dari warisan jejaring politik yang kuat, tentu itu memproyeksikan bagaimana kekuasaan mempunyai defenisi lainnya seperti pemerintahan lokal, petahana yang mereka mempunyai sumber daya material. Keluarga politik atau familisme yang dihadapi oleh mereka sebagai orang kuat lokal menjadikan munculnya para bossism atau orang kuat lokal yang membentuk kekuatan familisme atau dinasti dari warisan

---

<sup>89</sup> Robert Michels, *Partai Politik; Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Terj. Mien Joebhaar dan disunting oleh Drs. Bhenyamin Hoessein, SH, (Jakarta; CV. Rajawali, 2011) Hal.188

yang dikatakan oleh Michels adalah pemberontakan massa atau perebutan kekuasaan.

Setiap oligarki dipenuhi oleh kecurigaan terhadap pribadi-pribadi yang berambisi hendak memasuki barisan mereka, dengan memandang mereka tidak hanya sebagai calon pewaris melainkan sebagai pengganti kedudukan mereka yang siap sedia menjatuhkan mereka tanpa menunggu kematian alamiah. Yang sudah sejak lama (dan ini berlaku baik bagi kepemilikan spiritual dan psikis maupun pemilikan material) memilikinya, sangat bangga akan masa lalu mereka dan oleh karena itu cenderung memandang rendah orang-orang yang baru memilikinya.

Persoalan konflik antara dua partai yang dalam istilah Italia mengejek dijuluki *i ricchi* dan *gli arrichi* (kelompok yang berada dan kelompok yang berusaha memperoleh kekayaan). Yang pertama mencakup kelompok bangsawan pedesaan lama, sedangkan yang termasuk kelompok kedua adalah orang kaya baru (*parvenu*), saudagar-saudagar, kontraktor pekerjaan umum, pengusaha pabrik, dan lain-lain.<sup>90</sup>

Dalam kasus partai politik, ormas (organisasi masyarakat) atau komunitas tak jarang kita temui pertikaian dan konflik antara kedua kubu hanya untuk mendapatkan suara, dukungan, partisipasi dari rakyat banyak dalam rangka demokrasi elektoral yang sampai membawa isu perpecahan seperti isu ideologi, *war religious*, isu SARA, pelanggaran HAM masa lalu,

---

<sup>90</sup> Ibid.

isu identitas dan warisan keturunan dimana hal tersebut demi merealisasi ambisi pribadi mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan kejatuhan dan kekalahan beberapa keluarga politik seperti keluarga Limpo dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018, keluarga Cornelis di Kalimantan Barat, keluarga Alex Noerdin di Sumatra Selatan dalam Pilkada 2018, keluarga Obar Sobarna di Pilkada Kabupaten Bandung 2020, keluarga Tb. Aat Syafaat di Kota Cilegon 2020, dan keluarga Irianto MS. Syaifuddin di Pilkada Kabupaten Indramayu 2020.

Hal ini dikonfirmasi dengan data tentang kandidat keluarga politik yang kalah dalam gelombang Pilkada serentak 2020; dari total 161 kandidat keluarga politik, 81 kandidat (50,3%) kalah (Nugroho dkk.,2021). Data ini menunjukkan semakin tingginya peluang kekalahan keluarga politik jika dibandingkan dengan gelombang Pilkada sebelumnya (2015-2018) di mana kekalahan kandidat keluarga politik diderita oleh 85 kandidat (42%) dari total 202 kandidat keluarga politik (Perludem, 2020).<sup>91</sup>

Era politik lokal pasca Orde Baru juga ditandai dengan banyaknya terjerat kasus hukum kepala daerah, dan dari mereka adalah orang kuat lokal yang sangat dikenal dan mempunyai basis legitimasi yang populer. Katakanlah Syamsul Arifin dan Abdillah di Sumatra Utara, Fuad Amin di Bangkalan, Ratu Atut Choisyah di Banten, Syaukani di Kutai Kertanegara,

---

<sup>91</sup> Lihat Inaya Rakhmani, Direktur ARC UI dalam Prolog Penerbitan Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme sebagai Praksis Politik Akademik dalam Vedi R. Hadis. *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2022) Hal. xxv- xxvi

dan di Sulawesi Selatan adalah Prof. Nurdin Abdullah, dimana mereka adalah contoh figure populer dengan basis legitimasi sosial yang kuat tetapi tidak mampu menghindarkan diri dari jeratan hukum nasional.<sup>92</sup> Praktik politik oligarkis dengan terjeratnya hukum nasional orang kuat lokal mengindikasikan bahwa regulasi politik elektoral dan kelembagaan negara juga mampu memberikan pukulan terhadap pusaran politik oligarki yang ada ditingkat lokal.

Tingginya tingkat kekalahan petahana dalam indeks ketergantungan petahana yang disebut *incumbent turn over rate* juga memberikan penekanan bahwa pergantian kekuasaan lama oleh kekuasaan baru memperlihatkan bahwa kekuasaan itu terkadang bersifat sama saja, kekuasaan yang berkuasa sekarang juga sedang dinantikan oleh kekuasaan yang ada diluar, begitu mereka berganti maka segala bentuk monopoli akan kembali terulang, ibarat kata orangnya berganti tapi dengan sistem yang sama.

Sekalipun partai partai yang ada dalam sistem demokrasi di bawah kendali oligarki, dalam batas-batas tertentu dapat bertindak secara demokrasi. Kasta politik masyarakat lama, dan terutama “negara” itu sendiri terpaksa menyesuaikan sekian banyak nilai baik yang ideal maupun yang praktis. Bobot nilai yang diberikan kepada massa kian bertambah besar, sekalipun para pemimpinnya adalah penghasut (*demagogue*). Badan

---

<sup>92</sup> Ibid.

legislatif dan eksekutif sudah biasa tunduk tidak saja kepada tuntutan dari atas tetapi juga kepada yang datang dari bawah.

Dalam praktek, hal ini bisa menimbulkan kesukaran, seperti yang kita pelajari dari sejarah negara-negara yang memiliki rezim parlementer; tetapi, dalam teori tata susunan baru ini merupakan kemajuan yang besar bagi hak-hak rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.<sup>93</sup> Oligark memang dianggap tidak dapat terpengaruh oleh perubahan kelembagaan politik jika itu terjadi, akan tetapi pada faktanya oligark ternyata mampu mengkonsolidasikan diri berbagai bentuk perubahan yang ada, istilahnya mampu menyesuaikan sekian banyak nilai yang menurutnya baik maupun yang praktis.

Dalam praktik sepanjang sejarah, kelas ekonomi berkuasa itu dapat juga menempel pada semua rezim kekuasaan, seperti di sekitar autarki *kingship*, di sekitar tirani, di sekitar aristokrasi dan oligarki politik, serta *polity* yang diidealkan, dan bahkan di zaman modern sekarang, para pengusaha kaya dapat juga menempel ketat di sela-sela kekuasaan demokrasi.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa faktor penentu soliditas internal oligarki itu tidak lain adalah (i) kekuasaan yang sudah ada di tangan atau di beberapa tangan; (ii) faktor kekayaan yang penting sebagai modal ekonomi kekuasaan; ditambah lagi dengan (iii) faktor warisan “darah biru”; (iv) faktor eksklusivitas rasial, etnisitas, agama, ataupun ibu yang dapat

---

<sup>93</sup> Robert Michels. Op. Cit. Hal 403.

dijadikan alasan pembenar bagi sikap eksklusif untuk soliditas di antara mereka sendiri.<sup>94</sup>

Kelima faktor tersebut ini selalu dikapitalisasikan oleh kelompok elite penguasa untuk terus bertahan dalam lingkaran dalam di puncak kekuasaan, sehingga setiap terjadi pergantian rezim, kelompok elite yang sama terus bertahan dan mengendalikan kekuasaan yang cenderung terus berusaha untuk menjadi permanen dengan menggunakan kelima faktor penentu tersebut di atas.

Semua bentuk pemerintahan dapat mengalami proses reduksi menjadi kekuasaan oleh segelintir orang saja atau oligarki yang dengan efektif akan mengendalikan otoritas formal, baik kekuasaan oleh rakyat, kekuasaan seorang raja/ratu, ataupun kekuasaan seorang diktator. Karena itu Karl Marx dan Frieddriech Engels menyatakan bahwa di sepanjang sejarah kapitalisme, para kapitalis kunci mengendalikan pemerintahan, menciptakan dictum, “negara adalah komite eksekutif kelas penghisap”. Dengan nada yang sama, Gaetano Mosca dalam bukunya *The Rulling Class* juga menyatakan bahwa “kelas penguasa” dengan efektif selalu menjadi pengendali oligarkis.<sup>95</sup>

Berbagai macam kendali atas oligarki mulai dari kendali ekonomi sampai politik tidak lain adalah untuk memulai kekuasaan dan untuk menyingkirkan kekuatan dan kekuasaan oligarki lain. Dan tentu jika kita

---

<sup>94</sup> Jimly Asshiddiqie, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*, (Cinere, Depok; Penerbit LP3ES, 2022) Hal.4-5.

<sup>95</sup> Ibid. Hal 5

bawa posisi ini ke dalam demokrasi elektoral tentu yang terjadi seperti yang dijelaskan di atas bahwa konsolidasi kekuatan dan terus terfragmentasi dalam bentuk pengambil alihan kekuasaan baru.

Bisa jadi pandangan kita terhadap demokrasi yang begitu ideal tentang adanya kesetaraan, pemberian hak sampai dengan partisipasi politik akan juga berujung pada atau tidak mampu menghindari daripada kekuatan oligarki yang terkonsolidasi melalui lembaga politik yang ada, bisa jadi melalui partai politik, melalui organisasi massa, bahkan melalui birokrasi, mengutip Michels dalam diksi “hukum besi oligarki” bahwa pemerintahan oleh elite atau oligarki juga tidak dapat menghindari hukum besi oligarki, sebaik apapun organisasi yang dikelola baik dari kebutuhan taktis dan teknisnya terlepas dari seberapa demokratisnya mereka Kelola akhirnya akan berkembang menjadi kekuasaan yang oligarkis.

#### **1.7.5. Teori Elite Pareto Mosca**

Golongan elite dalam perumusannya adalah setua sejarah; lainnya mengemukakan bahwa mereka adalah sebarut zaman mesin. Istilah elite di sini pertama-tama menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elite adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain temoat golongan elite ini memberikan tanggapannya.<sup>96</sup> Kelompok elite juga merupakan suatu kelompok kepemimpinan sosial,

---

<sup>96</sup> Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite; Peranan elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, Terj. Zahara D.Noer (Jakarta; CV. Rajawali, 1984) Hal.3.

dimana mereka mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan segala macam bentuk keinginan-keinginan sosial yang terorganisasi dan mempunyai batasan dan aturan untuk memenuhi segala macam bentuk kebutuhan materi dan rohani. Tanggung jawab tersebut berada pada posisi istimewa, penguasa dan atau elite istimewa.

Elite adalah bidang studi yang menarik dan pendapat-pendapat dari kajian elite ini banyak yang bermuara pada kajian Pareto dan Mosca mengenai bagaimana esensial elite itu digambarkan dan seperti apa hubungan antara golongan elite dan masalahnya dengan masyarakat. Para tokoh tersebut biasanya terbagi atas dua golongan utama: mereka yang memilih golongan elite tunggal biasanya elite politik yang membuat keputusan dalam masyarakat, dan ada juga seperti Aristoteles, Pareto dan Mosca yang muncul dan mempertahankan argument bahwa ada sejumlah kaum elite yang berkoeksistensi, berbagai kekuasaan, tanggung jawab, serta hak-hak atau imbalan-imbalan.<sup>97</sup> Kajian elite dalam porsi penelitian peneliti tentang kapitalisme adalah pilihan untuk memberikan penekanan bahwa, elite mempunyai peranan penentu dalam kelompok masyarakat modern karna sifatnya yang bersifat moral dan fungsional, mereka bertanggung jawab terhadap lapisan sosial kelompok dan mempengaruhi segala bentuk superioritas dalam kekuasaan.

---

<sup>97</sup> Ibid. Hal. 4. Kajian tentang teori elite yang banyak dikutip oleh para sarjana terlihat kebanyakan mengambil gagasan dari pemikir seperti Aristoteles, Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto. Dalam konteks elitee bahwasanya gagasan tentang pemikiran golongan elite tunggal yang didefinisikan sebagai elite yang bisa membuat keputusan dalam masyarakat, beberapa yang juga membahas tentang bagaimana elite itu mampu melakukan dalam mempengaruhi berbagai kekuasaan, tanggung jawab serta hak-hak dan imbalan-imbalan dalam lingkaran kekuasaan seperti pendapat Saint Simon, Karl Mannheim dan Raymond Aron.

Aristoteles menitik beratkan kepada sifat dan tujuan negara dan manusia yang terpilih untuk bertugas. Dalam pandangannya negara mempunyai suatu fungsi yang melampaui fungsi untuk pencegahan kejahatan atau mengatur tukar menukar. Seperti Plato, ia melihat negara itu sebagai alat yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan kolektif dan melayani kebutuhan bersama karena adanya negara, ia tekankan, bukanlah untuk kepentingan kehidupan pada umumnya saja, tetapi adalah untuk kehidupan yang baik.

Demi memenuhi misinya yang utama, ia membutuhkan manusia-manusia yang luar biasa, manusia dengan kebajikan dan keutamaan, yang menilai keadilan dan kepentingan umum melebihi keuntungan pribadi.<sup>98</sup> Dalam pandangan Aristoteles, manusia-manusia luar biasa tersebut mestilah orang yang kaya karena tanpa kekayaan manusia luar biasa atau pemimpin yang mempunyai kebajikan yang bisa menilai keadilan yang utama karena kebajikan akan diperuntukkan untuk memajukan kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai misi utama.

Pareto, yang menciptakan diksi “elite” sampai menjadi begitu populer, argumen Pareto menjelaskan bahwa pada prinsipnya jumlah kaum elite itu adalah sebanyak macamnya seperti dengan kelompok kerja atau komunitas, seperti dengan Mosca yang menitik beratkan kepada kaum elite politik dan pemerintah karena pentingnya dari segi sosial dan sejarah. Argumen elite Pareto dan Mosca ini merupakan hasil dari polemik dengan

---

<sup>98</sup> Ibid. Hal. 6

Marx. Bahwa elite politik harus ada, dan bagaimana mungkin elite didirikan pada suatu masyarakat tanpa kelas.

Seperti Aristoteles mereka mengharapkan bahwa elite politik selalu harus ditarik dari kelas-kelas yang lebih kaya, yang dengan demikian menekankan bahwa selama elite politik ada, niscaya harus juga ada kelas-kelas berdasar kekayaan.<sup>99</sup> Polemik pemikiran Pareto dan Mosca dan Marx memang sesuatu yang dialektik berbeda penafsiran dan dianggap bahwa dialektika Pareto dan Mosca bukanlah perjuangan gaya Marxist yang secara ekonomis dirampas dari para pemegang hak istimewa, yaitu konflik antara perjuangan dari wakil-wakil yang mempertahankan jabatan politik dan mereka yang menginginkan merebut jabatan politik itu, diandaikan mereka seperti kaum singa dan kaum serigala.

Pareto dan Mosca dianggap melupakan kekuatan-kekuatan tradisional dan tidak rasional yang berkembang dalam hidup masyarakat dan tentu tuduhan bahwa mereka adalah seorang Machiavelli lantaran berasal dari Italia. Koeksistensi kelas atau mereka yang hidup berdampingan atau mereka yang mengatur bisnis, elite politik yang mengatur urusan-urusan negara.

Baik Pareto dan Mosca merujuk kepada suatu elite yang memerintah yang menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting dan mewakili sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat yang seperti dengan pendapat Aristoteles. Penghisapan atas yang dikuasai oleh para penguasa dianggap tidak dapat

---

<sup>99</sup> Ibid Hal. 12

dihindarkan, sebagaimana juga “perputaran roda” para elite itu sendiri. Keduanya beranggapan bahwa elite yang ada terdiri dari orang-orang “terbaik”, yaitu dalam arti nilai-nilai masyarakat pada suatu waktu tertentu.<sup>100</sup>

Konflik pandangan elite ini mengelompokkan antara dua kelompok pemikiran yaitu kelompok Marxian dan kelompok Machiavelli dalam mendefinisikan bagaimana kajian elite itu berkembang bahwa suatu kelas penguasa atau elite adalah rupa masyarakat yang kompleks dan tidak dapat dihilangkan sebagaimana anggapan dari kaum Marxis yang menjelaskan suatu masyarakat tanpa kelas.

Dalam karyanya, *Man and Society in an Age of Reconstruction* (Manusia dan Masyarakat dalam Zaman Kebangunan Kembali, 1946) Karl Mannheim berkebangsaan Inggris juga seorang pengkaji filsafat struktural sosial dan perubahan sosial, mencatat bahwa para elite telah berlipat ganda, dan bukannya menurun dengan majunya masyarakat industri. Ia membedakan antara dua tipe elite yang berbeda secara fundamental: suatu elite yang integratif, yang terdiri dari pemimpin politik dan organisasi; dari suatu elite sublimatif, yang terdiri dari pemimpin moral-keagamaan, seni dan intelektual.

Fungsi pokok dari tipe elite yang pertama adalah mengintegrasikan sejumlah besar kehendak-kehendak perseorangan di mana mereka bekerja melalui organisasi-organisasi politik formal; tipe yang kedua adalah untuk

---

<sup>100</sup> Ibid. Hal. 15

mengadakan sublimasi tenaga kejiwaan manusia yang bekerja melalui saluran-saluran dan kelompok-kelompok kecil. Tujuannya adalah untuk mengembangkan jalan keluar yang produktif secara sosial untuk harapan-harapan, ketakutan-ketakutan dan keinginan yang terhambat dari para individu, dengan membentuk selera mereka.<sup>101</sup>

Bertentangan dengan kaum Marxist dan kaum Machiavelli, Mannheim yakin bahwa penggantian kekuasaan perseorangan dan sewenang-wenang dengan kekuasaan fungsional dan melembaga akan menjadi anutan sosial yang utama di zaman modern. Yaitu, walaupun kekuasaan dan pemerintahan oleh yang kuat tidak dapat tidak harus ada dan bahkan merupakan gambaran-gambaran yang perlu dari sesuatu masyarakat secara meningkat.

Mannheim sangat tegas berkata bahwa elite mempunyai fungsi-fungsi untuk berbuat untuk kolektifitas dan ini adalah sifat dari fungsi-fungsi dan bukannya motif-motif dari para individu yang lapar kekuasaan yang menentukan macam elite yang akan muncul. Pendeknya, Mannheim melihat para elite itu sebagai suatu sistem hubungan dan keperluan kolektif.<sup>102</sup>

Konsepsi ini memberikan suatu landasan teoritis untuk studi mengenai beberapa persoalan penting: Elite-elite mana yang terutama penting, dan mengapa, pada suatu jangka waktu tertentu dalam perkembangan suatu masyarakat? Berapa banyak elite yang ada pada jangka waktu ini dan

---

<sup>101</sup> Ibid. Hal. 17

<sup>102</sup> Ibid.

mengapa? Elite yang mana memegang lampu senter dalam jangka pendek, yang mana dalam jangka panjang dan mengapa?<sup>103</sup> Untuk memahami pertanyaan tersebut Mannheim memberikan konjungsi dasar atau kalimat penghubung bahwa elite terdiri dari bagian yang saling bergantung satu sama lain dan mereka masing-masing berpartisipasi dalam lembaga, dalam kelembagaan tersebut kita akan memahami bagaimana semua golongan dan penguasa/pemimpin akan memainkan perannya secara aktif dalam organisasi yang melibatkan masyarakat, bisa saja mereka adalah pengusaha, atau kelompok sosial dalam masyarakat seperti hakim-hakim yang terpilih sampai dengan para fungsionaris dari kelompok buruh, unsur politik yang terbaik dan mereka terkonsentrasi dari pekerjaan organisasi yang berada dalam kepemimpinannya.

Para elite penentu berbeda dari kelas penguasa dalam cara pembiaannya, organisasi internnya, serta tingkat spesialisasinya. Elite penentu telah ada dalam beberapa bentuk pada setiap masyarakat manusia yang teratur; kelas-kelas penguasa tidak demikian dan tidak perlu ada suatu masyarakat jadinya dapat mempunyai elite penentu tanpa mempunyai kelas penguasa.<sup>104</sup> Seperti pada pembeda dan perbandingan antara elite penentu dengan suatu kelas penguasa:

**Tabel 1.7.5.1**  
**Perbandingan antara elite Penentu dan Kelas Penguasa**

<i><b>Kriteria komparatif</b></i>	<i><b>Kelas penguasa</b></i>	<i><b>Elite penentu</b></i>
Jumlah	Satu	Beberapa

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ibid. Hal. 81

Ukuran	Besar	Kecil, berpusat
Tenggang waktu	Lebih lama hidupnya	Tidak lama
Cara masuk	Kelahiran dan kekayaan	Keahlian
Cara keluar	Hilangnya kekayaan	Ketidakmampuan
Ruang lingkup Otoritas	Menyebar dan meluas	Khusus dan terbatas
Ikatan-ikatan kebudayaan	Latar belakang Pendidikan dan sekolah	Tidak dikhususkan
Kesempatan	Relatif tertutup	Relatif terbuka

Hubungan antara kelas penguasa dan elite penentu dalam tabel di atas terus-menerus merupakan sebab-sebab secara historis, elite penentu sering dibina dari salah satu kelas sosial lainnya yang ditingkatkan sosialnya umumnya tinggi.

Melihat kepada kaitannya kepada nilai-nilai inti dari sistem sosial, elite penentu menduduki suatu status sosial yang tinggi dengan tidak memandang kekayaan materiil atau hasil usaha murni yang dicapai para anggotanya. Karena mereka sering dibina dari kalangan kelas atasan, maka keda tipe tingkat kedudukan ini mudah membingungkan dan dianggap dapat dipertukarkan.<sup>105</sup> Terlihat dalam tabel di atas bahwa elite penentu berlatar belakang kelas dimana cara mereka masuk melalui keahlian dan ukuran kelompok mereka adalah kecil namun terpusat, seperti lingkungan kecil yang eksklusif yang kemudian diikat oleh kedudukan dalam ekonomi dan kekerabatan, seperti kelompok bisnis yang di dalamnya mempunyai grup kecil yang eksklusif namun mereka mempunyai kemakmuran dan keuntungan pribadi.

---

<sup>105</sup> Ibid.

Sementara kelas penguasa lebih tersebar, lebih bertahan hidup lama untuk tidak mengatakannya permanen. Pada prinsipnya, dalam masyarakat sosial kita, terlihat bahwa hanya satu kelas penguasa dalam lingkaran sosial masyarakat, namun harus ada sejumlah elite penentu yang mempunyai otonomi struktural dan fungsional.

Watak atau sifat yang melekat pada diri elite di suatu masyarakat belum tentu sama dengan yang ada di masyarakat lainnya. Hal tersebut paling tidak ditentukan oleh tipe dari masyarakat di mana elite berada dan juga sifat kebudayannya. Pada masyarakat yang sudah mencapai taraf industrialisasi tentunya mempunyai elite yang wataknya berlainan dengan elite yang ada di masyarakat yang masih kental dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional.<sup>106</sup>

Elite yang berada di negara berkembang adalah masyarakatnya yang mulai meninggalkan kebiasaan lama dan sedang memperbaharui diri menuju masyarakat modern. Dalam proses modernisasi di negara berkembang tentu menjalankan praktek-praktek industrialisasi untuk mengejar segala bentuk ketertinggalannya, berbagai proyek pembangunan, industri dan segala macam kebutuhan material guna untuk menyambungkan segala macam struktur dan fungsional dan dituntut untuk memainkan peran agar negara berkembang secara bertahap.

Secara khusus, konsep elite pada tingkat lokal diperkenalkan oleh Koentjaraningrat (1984) dan Sunyoto Usman (1991). Menurut pandangan

---

<sup>106</sup> Haryanto, *Elite, Suatu Massa, Bahasa dan Pengantar Kekuasaan* (Yogyakarta; Penerbit PolGOV, 2017) Hal.28.

Koentjaraningrat, di tingkat lokal elite (pemimpin) terbagi dalam dua, yaitu elite dan pemimpin tradisional dan elite atau pemimpin masa kini (1984, 128-147). Elite tradisional adalah mereka yang dipandang mempunyai kekuasaan atas massa karena memiliki ciri-ciri tradisional yang dinilai tinggi oleh masyarakat lokal, seperti keturunan, berkekuatan sakti, karismatik, berkemampuan ekonomis untuk melakukan upacara-upacara keagamaan, berkemampuan menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang banyak atas dasar suatu sistem sanksi. Sedangkan elite masa kini adalah mereka yang dipandang mempunyai kekuasaan massa karena memiliki ciri-ciri masa kini, seperti kemampuan pilihan rasional untuk memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan, legitimasi berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>107</sup>

Sunyoto Usman (1991;27-37) mengelompokkan elite dalam dua tipologi yakni: elite institusional (*institutional elites*) yakni mereka yang berada pada puncak strata masyarakat karena jabatan formal terutama dalam pemerintahan, dan elite yang berada di luar garis birokrasi (*non legitimate elites*), mereka adalah individu-individu yang dikategorikan dalam kelompok elite karena garis keturunan yang terhormat dalam masyarakat.<sup>108</sup>

Antara Koentjaraningrat dan Sunyoto Usman beranggapan bahwa elite yang berasal dari individu merupakan elite yang diproduksi oleh lingkungan sosial dan mendapatkan massa atau pengikut karena faktor

---

<sup>107</sup> Gustiana Kambo, *Politik Identitas Etnik; Sebuah Kajian Konstruksi dalam Tradisi Interaksi Simbolik* (Makassar; Unhas Press, 2021) Hal.78-79.

<sup>108</sup> Ibid.

sejarah yang diyakini oleh masyarakat lokal sehingga dimensi kekuasaannya mampu mempengaruhi birokrasi tatkala menguasai wilayah dimana rezim itu berada, seperti yang terjadi di wilayah Bugis dan Makassar, pada umumnya kelompok elite yang berkuasa dalam budaya tertentu juga membawa kekuasaannya pada level birokrasi di mana mereka dan garis keturunannya berkuasa atau menjabat posisi penting dalam pemerintahan.

Upaya untuk memetakan tipologi elite yang sedang berkuasa di negara berkembang telah dilakukan oleh beberapa orang ilmuwan, seperti Clark Kerr.<sup>109</sup> Tipologi yang dikemukakan didasarkan pada penentuan orientasi sentral dari elite mengenai permasalahan utama yang dihadapinya. Tipologi tersebut membagi elite menjadi lima tipe menurut latar belakang sosial dan orientasi politiknya, yakni:

1. Elite kelas menengah yang berasal atau muncul dari kelompok-kelompok pedagang dan tukang. Pada umumnya, mereka terdiri dari golongan minoritas dalam bidang keagamaan ataupun kesukuan. Kelompok ini merupakan elite baru yang ternyata dalam perkembangannya dapat hidup berdampingan dengan elite lama. Elite yang tergolong tipe kelas menengah tidak mempunyai ideologi yang tegas. Sikap mereka pragmatis dengan mengutamakan individualism ekonomi dan egalitarianism politik. Elite tipe ini mementingkan mobilitas sosial yang

---

<sup>109</sup> Pembahasan Clark Kerr yang dikutip oleh Albert Wijaya dalam buku. "Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES 1982, Halaman 67-71, dalam Haryanto. Ibid. Hal 31-33.

harus segera dilaksanakan dengan cara mengecarkan kepentingan diri sendiri secara sehat.

2. Elite dinastik atau pemimpin dinastik berasal dari lingkungan aristokrat yang berlandaskan pada masyarakat agraris atau pedagang. Selain itu, pihak yang juga dipandang sebagai elite menurut tipe ini adalah mereka yang berasal dari kasta militer (seperti di Jepang) atau elite yang terdiri atas kepala-kepala suku. Elite menurut tipe ini selalu berupaya untuk tetap mempertahankan orde yang sudah ada dengan sangat berorientasi kepada tradisi. Tradisi ini digunakan para elite untuk membenarkan kewibawaan dan kekuasaan yang dibangunnya. Elite menurut tipe ini dibedakan menjadi dua, yakni mereka yang tergabung dalam kelompok yang "realis" dan mereka yang tergolong dalam kelompok "tradisionalis". Kelompok yang realis menyadari bahwa sebagian dari modernisasi itu sebagian tidak mungkin dihindari, khususnya yang berkaitan dengan industrialisasi. Biasanya, kelompok yang tradisionalis tetap menghendaki orde yang berlangsung untuk tetap bertahan dengan landasan tradisi. Struktur masyarakat dimana tipe elite dinastik ini ada, biasanya menunjukkan struktur yang sangat hirarkis.
3. Pejabat kolonial yang merupakan pejabat-pejabat yang berasal dari pemerintahan kolonial. Pada umumnya, mereka tidak terlalu berperan dalam melaksanakan modernisasi. Elite tipe ini mewakili dan bertanggung jawab kepada negara penjajah. Sebenarnya, mereka merupakan pemimpin asing dengan kebijakan yang berorientasi pada asing pula. Pejabat kolonial dapat menggelindingkan roda modernisasi,

seperti industrialisasi. Hal itu dapat dicapai melalui perangkat administrasi yang efektif atau pengenalan pendidikan modern. Akan tetapi upaya ini kurang dapat memberi dukungan secara langsung bagi terselenggaranya modernisasi dengan cepat. Pada umumnya, kepemimpinan elite tipe ini lebih banyak mengandalkan pada kekuatan fisik dan ancaman daripada bujukan dan kompromi. Mereka menekan kebebasan penduduk pribumi dan berupaya mengatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi dan keamanan sepenuhnya tergantung pada penguasa kolonial. Realitas memang menunjukkan bahwa dewasa ini, elite asing hampir tidak ada sama sekali. Akan tetapi, di negara berkembang lebih banyak muncul elite lokal yang mempunyai jiwa administrator kolonial. Elite lokal ini lebih sering meniru tingkah laku elite kolonial yang berkuasa sebelumnya. Mereka mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan golongannya sendiri sebagaimana halnya elite kolonial yang lebih mementingkan "*home country*"-nya. Walaupun secara retorik mereka menyatakan lebih mengutamakan kepentingan umum, tetapi pada realitasnya, orientasi terhadap kepentingan umum masih sangat lemah.

4. Kaum intelektual revolusioner merupakan kelompok baru yang terdiri dari para intelektual yang merupakan hasil sistem pendidikan yang ada. Mereka yang tergabung dalam elite ini mempunyai pandangan bahwa kebudayaan dan struktur masyarakat yang ada selama ini sudah dianggap tidak cocok lagi bagi suatu masyarakat modern. Ideologi mereka lebih menekankan pada gagasan seperti "panggilan historis"

daripada peran mereka. Elite tipe ini juga mempunyai kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan politik yang ada pada genggamannya. Gejala-gejala sosial yang muncul tidak akan dipecahkan melalui penyesuaian program dan administrasi pemerintahan, tetapi lebih sering diselesaikan melalui pembinaan ideologi. Apabila pembinaan ideologi yang dilakukan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka elite tipe ini mempunyai kecenderungan untuk memerintah dengan tangan besi.

5. Pemimpin nasional yang mempunyai latar belakang yang relatif beragam. Pada umumnya, mereka berasal dari berbagai Gerakan sosio-politik yang berusaha melawan penjajah. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kebanyakan di antara mereka merupakan pemimpin yang kharismatik dengan pengaruh pribadi yang relatif menonjol. Bagi mereka, nasionalisme yang ada di negara berkembang masih lebih merupakan sentimen daripada sebagai sistem pemikiran yang telah dijabarkan. Di negara yang sedang berkembang, elite tipe ini berperan di tengah-tengah masyarakat. Semangat nasionalisme merupakan motivasi yang kuat untuk melakukan modernisasi.
6. Kekuatan yang mengambang, elite yang tergabung dalam tipe ini adalah para intelektual dan jenderal. Para intelektual, termasuk di dalamnya mahasiswa sangat tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Para intelektual tersebut dapat dianggap sebagai sumber yang relatif membahayakan, tetapi sebaliknya, mereka adalah alat bagi terlaksananya modernisasi. Ke mana mereka akan bergerak tergantung dari perlakuan penguasa terhadap mereka, apakah

mereka dicurigai dan ditendang penguasa atautkah justru diajak berperan serta dalam pelaksanaan modernisasi. Para jenderal juga mempunyai kemampuan untuk menggerakkan massa. Namun, berbeda dengan para intelektual yang menggerakkan massa dengan gagasan-gagasannya, para jendral menggerakkan massa dengan kekuatan fisik (senjata). Pada umumnya, para jendral selalu siap untuk mempertahankan “*law and order*”, baik dilakukan dengan cara memberikan dukungan kepada pihak penguasa ataupun sebaliknya, dengan mengambil kekuasaan yang ada (kudeta).<sup>110</sup>

Tipologi elite di atas memberikan penanda bahwa elite yang menentukan orientasi dengan segala bentuk perannya di negara sedang berkembang telah memperlihatkan suatu perlakuan-perlakuan politik struktural dan fungsinya, menjadi lebih menarik karena penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana kuasa dan wilayah yang terjadi di Indonesia terkhusus kota Makassar yang mencoba menarik benang merah situasi sosial dan politik yang berkembang dan bersistem.

Dalam realitasnya negara berkembang, posisi intelektual dan militer pun juga sesuatu yang bisa kita lihat aspek historisnya di mana ketidak stabilan dan campur tangan militer dalam mengelola dan membantu mengendalikan pemerintahan walau membawa dampak negatif seperti terjadinya pelanggaran HAM dan tidak meratanya pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia. Sejarah konflik yang ada di Sulawesi-Selatan juga

---

<sup>110</sup> Ibid.

memberikan ingatan terhadap faktor sejarah yang masih tercatat dalam arsip wilayah, seperti konflik etnis, konflik pemerataan pembangunan sampai dengan konflik agama.

Keberadaan elite tersebut sesuai dengan kapasitas zaman telah memberikan peluang dan posisi yang menguntungkan secara politik untuk mengelola sumber daya yang ada seiring dengan komunikasi mereka pada tataran masyarakat yang menerima dan yang menolak. Dalam pandangan peneliti, elite merupakan tanda sekaligus penanda bahwa lingkaran mereka berada pada kekuasaan dan di masyarakat mana mereka membawa pengaruh untuk menjalankan hak dan kewajiban, apakah mereka berfungsi sebagai patron atau pelindung atau berfungsi sebagai klien dari penguasa untuk mengamankan sumber daya material mereka masing-masing.

#### **1.7.6. Teori Pertukaran Peter M. Blau**

Teori-teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer: orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan, interaksi sosial seperti ini mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan juga hal-hal yang nyata dan tidak nyata.

Dalam sebuah pabrik, misalnya, seorang pekerja yang berinteraksi dengan pembantunya dapat menjalin kerjasama yang intim dengan harapan memperoleh ganjaran nyata berupa jumlah bonus tahun baru.

Tetapi ganjaran dari persahabatan dan *goodwill* yang tidak nyata juga dapat melahirkan perilaku yang sama, bahkan di saat-saat dunia usaha mengalami masa sulit di mana bonus demikian itu merupakan hal yang mustahil.<sup>111</sup>

Perkembangan yang utuh dari teori sosiologis tentang pertukaran sosial pertama kali ditemukan oleh George C. Homans, sedang penyempurnaan selanjutnya dilakukan oleh Peter M. Blau. Yang di mana awalnya Homans mengawali karirnya sebagai penganut teori fungsionalisme strukturalis, namun setelah mendapatkan kelemahan dari teori tersebut yakni diabaikannya studi tentang individu dan fokus pandangan teori tersebut bertumpu pada organisasi atau struktur serta tujuan atau fungsi dari sistem yang besar atau kecil.

Individu hanya dianggap sebagai orang yang menempati status atau posisi tersebut. Kritik Homans tersebut menjadikan teori pertukaran sebagai jalan keluar usaha untuk menggerakkan atau anti tesa teori dari faham sosiologi ekstrim yang mengabaikan individu ke arah bagaimana peranan individu atau perilaku manusia menjadi bagian dalam sistem sosial.

Dalam contoh pertukaran sosial yang sederhana kita dapat menganggap bahwa hubungan-hubungan mesti bersifat simetris. Sebagai missal, bilamana seseorang berbelanja, maka barang yang dibeli dan jumlah uang yang dibayarkan dianggap bernilai sama.

---

<sup>111</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer. Terj*, Tim Penerjemah, Yasogama (Jakarta Utara; PT RajaGrafindo kerja sama Yayasan Solidaritas Gajah Mada/Yasogama, 1994) Hal.52-53

Hubungan-hubungan sosial lain juga sering bersifat simetris, seperti yang terlihat dalam pertukaran tanda mata di mana yang dipertukarkan kurang lebih bernilai serupa, dalam pola-pola persahabatan di antara orang yang secara sosial sama, atau dalam tenaga kerja yang tersedia dalam pertukaran hanya untuk memperoleh upah.<sup>112</sup> Dalam dunia sosial pertukaran sosial bisa jadi tidak semua bersifat simetris karena dalam lingkungan sosial terdapat stratifikasi berdasarkan kekuasaan dan distribusi sehingga Homans juga berprinsip bahwa asal mula kekuasaan dan wewenang sangat berkaitan dengan prinsip kepentingan minimum (*principle of least interest*).

Orang yang memiliki kepentingan paling sedikit untuk kelangsungan situasi sosial adalah yang paling bisa menentukan kondisi-kondisi asosiasi. Prinsip ini menghasilkan kekuasaan ditangan salah satu pihak yang berpartisipasi, “sebab dalam pertukaran seseorang memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memberi orang lain ganjaran ketimbang yang mampu diberikan orang itu kepadanya” (homans, 1974:74).<sup>113</sup>

Kepentingan yang seimbang ini dalam teori pertukaran memungkinkan bahwa segala sesuatu yang diberikan berupa hadiah dan ganjaran akan seimbang ketika objek dan subjeknya akan setara, jika tidak setara atau asimetris maka akan terjadi penolakan, karena posisi kekuasaan yang menentukan seseorang akan menghasilkan prestise hal tersebut berlaku hubungan berhadapan dan bagian dari asosiasi.

---

<sup>112</sup> Ibid. Hal. 67

<sup>113</sup> Ibid

Seseorang yang berstatus lebih tinggi akan menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk banyak memberi dan distribusi permintaan.

Kepentingan yang seimbang akan melahirkan kekuasaan yang simetris. Bahkan sebaliknya kepentingan yang asimetris akan melahirkan kekuasaan yang memaksa. Kekuasaan yang tidak seimbang tersebut merupakan kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam analogi Homans, paksaan tidak dibutuhkan bila hubungan itu berdasarkan kepada pertukaran yang *fair*. Jika terjadi pertukaran *unfair* maka kekuasaan yang memaksa itu akan terjadi, banyak hal kekuasaan yang memaksa itu berlaku dalam lingkungan sosial seperti kasus perbudakan terhadap kaelompok minoritas dan mashab, kolonialisme dan penjajahan negara Eropa terhadap Asia, pelanggaran hak buruh domestik yang terjadi di beberapa negara berkembang, perdagangan manusia, pekerja paksa, eksploitasi pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain yang juga masuk dalam definisi perbudakan modern, terlihat bahwa kasus tersebut merupakan pertukaran kekuasaan yang tidak seimbang atau *unfair*.

Homans percaya bahwa dalam hubungan bahwa dalam hubungan antar-manusia terdapat kecenderungan ke arah penyamaan kekuasaan, membuat paksaan itu menjadi suatu pengecualian daripada aturan. Dalam masyarakat hal ini dapat ditunjukkan oleh sistem stratifikasi yang membuat penjengjangan anggota-anggota kelompok berdasarkan atas pendapatan dan pekerjaan.

Seseorang yang berstatus lebih tinggi akan lebih banyak menyediakan barang-barang yang langka dalam hubungannya dengan

permintaan, tetapi dia juga akan menerima lebih banyak barang yang tersedia. Seringkali difrensiasi status dalam kelompok disetujui oleh anggota-anggota kelompok yang menyadari bahwa beberapa orang memiliki lebih banyak sumber-sumber langka yang dibutuhkan oleh kelompok. Dalam mempertukarkan sumber langka yang demikian itu si pemberi dianggap memperoleh status yang lebih tinggi oleh para anggota kelompok yang lain.<sup>114</sup>

Peter M. Blau (1964:117) memberi Batasan kekuasaan sesuai dengan pengertian Weberian, yaitu “kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Blau bermaksud menganalisis struktur sosial yang lebih kompleks, melebihi Homans yang memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk kehidupan sosial mendasar. Blau dan Homans tertarik pada proses yang sama.

Tetapi, konsep pertukaran sosial Blau terbatas pada Tindakan yang tergantung pada reaksi pemberian hadiah dari orang lain, Tindakan yang segera berhenti bila reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang.<sup>115</sup> Pertukaran sosial tersebut membuat individu untuk saling tertarik membangun kelompok sosial, yang dipertukarkan dalam kelompok sosial tersebut dapat berupa sesuatu yang intrinsik seperti cinta, kasih sayang, rasa hormat atau sesuatu yang bernilai ekstrinsik seperti uang dan tenaga

---

<sup>114</sup> Ibid. Hal. 69

<sup>115</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern ; Edisi Keenam. Terj.* Alimandan (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2007) Hal.369

kerja fisik. Bila terjadi ketimpangan dalam pertukaran hadiah dan kepentingan, maka akan timbul perbedaan kekuasaan dalam kelompok.

Difrensiasi tak terelakkan dalam kehidupan kelompok sehingga menjadi pemimpin dan pengikut menimbulkan kebutuhan baru akan integrasi. Segera setelah mereka mengakui status pemimpin, kebutuhan pengikut akan integrasi semakin besar. Mula-mula pengikut akan memamerkan kualitas mereka yang paling mengesankan. Kini untuk mencapai integrasi dengan anggota pengikut, pemimpin mempertontonkan kelemahannya. Dalam hal ini menyatakan kepada publik bahwa mereka tak ingin lagi menjadi pemimpin. Pencelaan diri sendiri ini menimbulkan simpati dan dukungan sosial dari pemimpin yang lain.<sup>116</sup> Untuk meraih simpati para pemimpin melakukan itu untuk meningkatkan integrasi kelompok dan simpati public secara menyeluruh untuk memenangkan persaingan politik sehingga yang terjadi adalah tawar menawar secara kolektif karena antara pertukaran dan persaingan yang terjadi pada organisasi sosial terlebih negara merupakan hal yang akan dicapai untuk keuntungan maksimal.

Dalam teori pertukaran tingkat makro Emerson, para aktornya dapat berupa individu maupun kolektivitas. Ia memusatkan perhatian pada hubungan pertukaran antar aktor. Sebuah jaringan pertukaran mempunyai komponen sebagai berikut (Cook, et al., 1983:277):

- a. Adanya sekumpulan aktor individu atau aktor kolektif
- b. Sumber yang bernilai terdistribusikan di kalangan aktor

---

<sup>116</sup> Ibid. 370

- c. Ada sekumpulan peluang pertukaran ada di antara aktor
- d. Hubungan pertukaran saling berkaitan dalam sebuah struktur jaringan tunggal.

Singkatnya, sebuah jaringan pertukaran adalah sebuah struktur sosial khusus yang dibentuk oleh dua aktor atau lebih yang menghubungkan hubungan pertukaran di antara aktor (Cook, et al.,1983:277). Kaitan antara hubungan pertukaran sangat penting artinya untuk menghubungkan antara dua aktor (*dyadic exchange*) dengan fenomena tingkat makro (Yamagishi, Gillmore dan Cook).<sup>117</sup> Pertukaran antara dua aktor memungkinkan adanya ketergantungan kekuasaan (*power dependence*). Emerson mendefinisikan kekuasaan sebagai “tingkat biaya potensial” yang menyebabkan seorang aktor dapat memaksa aktor lain “menerima”, sedangkan ketergantungan melibatkan “tingkat biaya potensial yang diterima seorang aktor dalam suatu relasi” (1972b:64).

Defenisi ini mengarah ke teori kekuasaan-ketergantungan Emerson yang dirangkum Cook: kekuasaan seseorang atas orang lain dalam hubungan pertukaran adalah kebalikan fungsi ketergantungan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan, tetapi melalui perjalanan waktu ketimpangan ini akan bergerak menuju hubungan kekuasaan ketergantungan yang makin seimbang.<sup>118</sup>

Ketergantungan merupakan konsep bahwa aktor satu sama lain melakukan proses interaksi kekuasaan untuk mencapai tujuan. Fungsi

---

<sup>117</sup> Ibid. Hal. 377

<sup>118</sup> Ibid. Hal. 378

ketergantungan tersebut berada pada kontrol pertukaran antar aktor yang sedang melakukan integrasi terhadap publik dan massa yang dikontrol, bahwa segala bentuk pencapaian, pemberian hadiah dan sanksi tergantung seberapa besar kekuasaan aktor tersebut mampu untuk memusatkan perhatian kepada perilaku sosial massa yang memandang struktur sosial untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam hal ini, teori pertukaran sosial akan berkembang mengarah kepada teori pertukaran jaringan yang mengkombinasikan teori pertukaran sosial dan analisis jaringan. Teori pertukaran sosial mempunyai keunggulan karena memiliki model aktor tunggal yang membuat pilihan berdasarkan manfaat yang mungkin diraih, namun mempunyai kekurangan karena ia melihat struktur sosial terutama sebagai hasil dari pilihan individu ketimbang sebagai suatu determinan pilihan-pilihan tersebut.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori jaringan mempunyai model struktur yang kuat (jaringan relasi), tetapi mempunyai model yang lemah mengenai unsur relasi, sementara teori pertukaran mempunyai model relasi antar aktor yang kuat (pertukaran), tetapi memiliki model struktur sosial yang lemah. Model teori pertukaran sosial dari pertukaran aktor untuk memperbesar keuntungan akan melengkapi isi yang kurang dipunyai analisis jaringan, dan analisis jaringan akan menyediakan model struktur sosial sebagai *variable independent* yang kurang dimiliki oleh teori pertukaran.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Ibid. Hal. 387

Teori pertukaran jaringan kemudian menjelaskan secara fundamental bahwa pertukaran sosial terjadi dalam bagian jaringan pertukaran sosial yang lebih luas. Teori pertukaran sosial lebih menitikberatkan pada isu kekuasaan seperti dalam bentuk kekuasaan, ukuran kekuasaan dan koneksi kekuasaan dimana jaringan pertukaran itu terjadi.

Bahwa semakin besar peluang aktor untuk melakukan pertukaran maka semakin besar pula kekuasaan si aktor. Kekuasaan tersebut terjadi untuk memperluas, mengontrol dan mengakumulasi segala macam bentuk kekuasaan dan kepentingan yang terjadi di dalam arena pertukaran sosial.

Yamagishi, Gillmore, dan Cook (1988) mengaitkan teori pertukaran dan teori jaringan. Mereka mengatakan bahwa kekuasaan adalah aspek sentral bagi teori pertukaran, tetapi kekuasaan tidak dapat dikaji dengan baik dalam hubungan dua pihak (*dyad*). Sebaliknya, kekuasaan secara fundamental adalah fenomena struktur sosial.<sup>120</sup> Pada dasarnya kedua teori pandangan aktor tersebut adalah sama, karena pada akhirnya semua teori pertukaran secara eksplisit mengasumsikan bahwa aktor secara rasional mengejar maksimalisasi kepentingan diri (*self-interest*) dalam bentuk apa pun, sedangkan kebanyakan teori analisis jaringan menganut asumsi yang sama meski secara lebih implisit. Seperti teori pertukaran jaringan hanya tertarik ada relasi pertukaran sementara teoritis jaringan tertarik pada banyak jenis relasi.

---

<sup>120</sup> Ibid. Hal. 388

### 1.7.7. Kapitalisme Semu Asia Tenggara Yoshihara Kunio

Di negara-negara maju, dengan kemajuan pembangunan ekonominya, pemilikan telah terpecah-pecah dan Revolusi Manajerial sudah terjadi; sebagai akibatnya, kaum kapitalis telah menjadi suatu spesies yang langka. Di negara-negara sedang berkembang, termasuk negara-negara Asia Tenggara, pemilikan dan manajemen umumnya tidak dipisahkan, dan istilah “kapitalis” sebagaimana dipahami di Eropa pada abad ke-19 sungguh relevan; tetapi karena konotasinya yang menghina, maka istilah seperti “elite bisnis”, “eksekutif bisnis”, dan “wirausahawan” sering dipakai sebagai penggantinya.<sup>121</sup>

Istilah kapitalis tersebut juga memberi makna terhadap munculnya para penyedia modal atau modal sehingga posisi mereka dianggap sebagai investor dalam institusionalisasi atau lembaga penyedia sehingga berpengaruh terhadap keberadaan mereka dan pengelolaan keuangan yang sifatnya manajerial pada perusahaan atau sampai pada mempengaruhi lembaga negara.

Karena istilah “kapitalis” telah menjadi sebuah kata yang berarti buruk, maka mereka yang memainkan peranan “kapitalis” biasanya tidak suka dipanggil dengan istilah ini, dan orang-orang yang menulis mengenai mereka sering menghindarkan pemakaiannya. Mengapa istilah ini sampai memperoleh konotasi yang bersifat menghina, tidaklah begitu jelas; tetapi barangkali serangan-serangan Karl Marx terhadap kapitalisme merupakan

---

<sup>121</sup> Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Terj. A. Setiawan Abadi, (Jakarta; LP3ES, 1990) Hal. 1

faktor penyebabnya yang terpenting.<sup>122</sup> Pengaruh karl Marx terhadap kajian kapitalisme membuat pengaruh yang begitu besar terhadap kapitalisme yang menurutnya kapitalisme tidak memberikan dampak keadilan pada suatu negara dan setiap orang lantaran kapitalisme dianggapnya sebagai paham yang ingin merampas harta benda dan kepemilikan banyak orang.

Kapitalisme dalam pengertian dan menurut hemat peneliti merupakan gambaran bagaimana paham kapitalisme mencoba menguasai sejumlah besar modal dan kemudian menjadikan perekonomian dimonopoli atau dikuasai oleh sekelompok orang, dimana Aristoteles juga menggunakan defenisi ini sebagai kekuasaan yang kemudian dimiliki oleh sekelompok orang.

Sekelompok orang ini menjadikan kapitalisme sebagai sebuah patron modernisasi perekonomian atau modernisasi ekonomi yang kemudian dikerjakan atau dilakukan oleh yang disebut sebelumnya sebagai elite bisnis, wirausahawan, eksekutif bisnis yang menguasai praktik-praktik modal yang berjumlah besar dengan segala bentuk manajerial dan manajemen yang bisa bersifat sebagai spekulator dan pemegang monopoli untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam operasi perekonomian pasar.

Pada titik ini, untuk memperkenalkan klasifikasi dari sejarawan Perancis, Fernand Braudel. Ia membagi perekonomian ke dalam tiga sektor: perekonomian subsisten, perekonomian pasar, dan kapitalisme.

---

<sup>122</sup> Ibid

Istilah yang digunakan untuk sektor yang pertama sudah jelas dengan sendirinya: barang-barang diproduksi untuk konsumsi si produsen sendiri.

Dalam perekonomian pasar maupun kapitalisme, kegiatan ekonomi berskala kecil dan hanya memakai modal dalam sejumlah kecil, sedangkan pada yang tersebut belakangan, sejumlah besar modal dipakai dan skala operasi besar.<sup>123</sup> Klasifikasi tersebut, peneliti kemudian memberikan batasan mengenai sampai sejauh mana perekonomian subsisten, perekonomian pasar dan kapitalisme itu sendiri akan memberikan pengaruh pada jenjang ekonomi politik dalam suatu wilayah yang menjadi objek studi bahwasanya sektor dalam peranan ekonomi yang menjadi modal atau modal adalah sebuah pengaruh yang nyata dalam sebuah negara atau wilayah.

Kapitalisme, dengan demikian, merupakan sektor yang didalamnya bagaimana modal yang bersumber pada modal dianggap sebagai perekonomian yang mencakup bisnis-bisnis besar, maka lembaga-lembaga kapitalis adalah badan-badan usaha ekonomi individual yang masuk pada sektor tersebut, dan kaum kapitalis adalah orang-orang yang mengepalari perusahaan-perusahaan semacam ini.<sup>124</sup>

Badan-badan usaha yang dianggap mengelola bisnis-bisnis besar sejak lama telah menjadi korporasi yang juga menguasai perekonomian Indonesia dari berbagai sektor sampai menguasai kerjasama dengan negara bahkan disebut sebagai kapitalisme konvensional secara defenisi karena dianggap bahwa yang konvensional tersebut terkonsentrasi dengan

---

<sup>123</sup> Ibid, Hal. 2

<sup>124</sup> Ibid

modal. Hal ini dikarenakan perlakuan dalam aktivitas perekonomian dalam kasus kapitalisme industri, dimana para pebisnis besar tersebut mengalokasikan modal investasi dalam asset yang tetap (*fixed assets*) dimana penekanannya merupakan pada harta milik pribadi dan usaha bebas.

Anggapan kapitalisme oleh Yoshihara Kunio yang memberikan definisi kapitalisme semu (*ersatz capitalism*) di wilayah Asia Tenggara karena menganggap kapitalisme jenis ini didominasi oleh modal asing. Sifat semu pada kapitalisme Asia Tenggara berasal dari fakta bahwa perkembangan kapital Asia Tenggara sebagai besar terbatas pada sektor tersier. Sektor tersier dalam pemahaman kita merupakan kebutuhan yang mewah yang mencakup barang-barang yang mewah. Sehingga kebutuhan tersebut seperti usaha untuk meningkatkan derajat harga diri.

Dalam pada itu, kebutuhan tersier telah bergeser definisinya, dimana saat Orde Baru atau Orde Lama, kebutuhan mewah seperti mobil dan motor oleh penduduk Indonesia dianggap sebagai kebutuhan yang mewah, namun saat Orde Reformasi kebutuhan seperti mobil dan motor merupakan alat untuk mobilitas kehidupan sehari hari.

Berbeda dengan jaman millennium sekarang, kebutuhan tersier tetap menjadi kebutuhan untuk menaikkan derajat harga diri seperti liburan ke luar negeri, perhiasan, menyewa kapal pesiar, membeli tas, sepatu, pakaian yang bermerk atau dikenal *branded* luar negeri yang harganya bahkan bisa membeli 1 buah rumah atau mobil mewah yang bahkan kelompok menengah dan miskin tidak mampu mencapainya.

Kapitalisme Asia Tenggara disebut semu karena alasan-alasan yang lain. Bagi kaum fundamentalis Islam dan kaum nasionalis yang chauvinis, ia disebut semu karena ia didominasi oleh kaum kapitalis Cina. Meskipun hal ini tidak begitu tepat di bawah berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mendorong kewirausahaan bumiputra, namun para kapitalis Cina masih tetap memegang kendali yang sesungguhnya atas kapitalisme Asia Tenggara (lebih tepat : porsi non asingnya).<sup>125</sup> Kapitalisme cina dalam pandangan ini, menjadi sebab bagaimana kendali dan dominasi memainkan peran yang sangat besar pada wilayah Asia Tenggara terutama pada perekonomian pasar yang memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak resiko.

Bagi para ekonom *laissez-faire*, kapitalisme Asia Tenggara disebut semu karena ia didominasi oleh para pemburu rente (*rent seekers*). Sebenarnya, terdapat jenis-jenis kapitalis yang janggal seperti kapitalis konco (*crony capitalism*) dan kapitalis birokrat. Di samping itu, ada pemimpin-pemimpin politik, anak-anak dan sanak keluarga mereka, dan keluarga keraton terlibat dalam bisnis.

Apa yang mereka buru bukan hanya proteksi terhadap kompetensi asing, tetapi juga konsesi, lisensi, hak monopoli, dan subsidi pemerintah (biasanya berupa pinjaman berbunga rendah dari lembaga-lembaga keuangan pemerintah). Sebagai akibatnya, telah tumbuh dengan subur segala macam penyelewengan.<sup>126</sup> Tumbuh suburnya penyelewengan merupakan hal yang paling negatif dari kapitalisme yang kemudian

---

<sup>125</sup> Ibid, Hal. 4.

<sup>126</sup> Ibid. Hal. 5.

menjadikan aktifitas mereka seperti mencari rente. Sejak Orde Baru, istilah rente ini sangat has sampai diberikan diksi Alibaba, kata Ali untuk sematan pencari rente dari kelompok pribumi sementara Baba adalah sematan pencari rente dari kalangan Tionghoa atau Cina.

Hubungan monopoli tersebut semakin berkembang di era sekarang. Bagaimana hubungan para kelompok pengusaha dan penguasa dalam memberikan lisensi dagang, menguasai dan memonopoli, diberikan hak istimewa bahkan menghalangi para pelaku pasar lain, dalam definisi sederhana Adam Smith menjelaskan bahwa rente tersebut adalah pemberian sewa-menyewa yang mendapatkan keuntungan.

Tentu keuntungan tersebut merupakan hasil dari negoisasi penguasa ke kelompok pengusaha dengan memperdagangkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bisnis, yang kita lihat hari ini banyaknya kelompok legislatif, eksekutif bahkan yudikatif terlibat korupsi anggaran keuangan proyek yang juga melibatkan beberapa pengusaha-pengusaha lokal, nasional sampai dengan pengusaha internasional.

Bagaimanapun juga kelompok pemburu rente semakin subur sampai hari ini. Inilah sebagian faktor mengapa kapitalisme Asia Tenggara khususnya di Indonesia dianggap kapitalisme semu lantaran para kelompok penguasa dan kelompok pengusaha melakukan aktifitas untuk mendapatkan keuntungan bisnis.

Para spekulasi atau *speculator* tersebut hampir ada disetiap lini kehidupan bernegara kita hari ini. Sehingga Indonesia merupakan tempat subur bagi kelompok ini untuk memperdagangkan kekuasaan dan semakin

berkembang bagaimana kapitalisme semu sampai hari ini menciptakan kondisi yang dinamis bagi kelompoknya.

Kondisi yang dinamis bagi kelompok pemburu rente merupakan implementasi yang kita baca dan rasakan hari ini sebagai aktifitas sosial politik yang dijalankan oleh kelompok ini dengan mempengaruhi sistem politik dimana-mana, dan mereka kemudian harus bertanggung jawab karena menciptakan keadaan yang timpang di mana-mana.

Bagaimapun juga mereka-mereka yang menjadikan negara ini dengan memperdagangkan kekuasaan adalah mereka yang juga menguasai negara, para pimpinan partai dan orang partai tidak lain dan tidak bukan adalah juga pemegang pusat perekonomian pasar dengan mulai dari perekonomian perusahaan yang sangat aktif mengelola sumber daya material di negara ini.

Walaupun kapitalisme di Asia Tenggara diciptakan oleh modal Barat dan didominasi olehnya selama sekitar satu abad, tetapi situasi ini telah berubah secara dramatis dalam beberapa dasawarsa yang lalu. Kelompok Asia kemudian menjadi ancaman terhadap dominasi negara Barat, banyak dari perusahaan Barat telah menarik diri ketika menghadapi kompetisi yang memuncak dari perusahaan-perusahaan Jepang yang muncul sebagai kekuatan yang paling dinamis dalam perekonomian dunia sesudah Perang Dunia Kedua.

Jelas bahwa masa supremasi Barat sudah berlalu, akan tetapi fenomena dominasi asing tetap mendominasi kapitalisme Asia

Tenggara.<sup>127</sup> Kemenangan dan deklarasi politik setelah Perang Pasifik telah banyak merubah posisi bagi lingkungan modal Asing. Pemerintah baru yang terbentuk tentu akan membatasi masuknya modal asing dan menciptakan perusahaan-perusahaan negara, baik baru ataupun dengan mengambil alih perusahaan asing dengan alasan menempuh Langkah-langkah nasionalisasi yang ekstrim.

Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia terjadi pada kurun waktu 1950-an pasca kemerdekaan dan revolusi Indonesia, kontroversi terhadap modal Asing. Dimana sikap pemerintah Indonesia terhadap modal asing sepanjang tahun 1950-an sangat kuat dipengaruhi pengalaman zaman colonial Hindia-Belanda. Pandangan yang berlaku terhadap modal asing, khususnya modal Belanda, secara umum melihat kehadiran mereka menjadi penghambat bagi terwujudnya kedaulatan di bidang ekonomi.

Hal ini tidak terlepas dari peranan modal asing yang sampai saat itu dijalankan hanya untuk menarik keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dari Indonesia, tanpa turut berpartisipasi dalam perbaikan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara umum.<sup>128</sup> Tekanan politik yang kuat saat itu jelas mempertegas posisi pemerintahan Indonesia yang baru untuk mewujudkan aspirasi ekonomi nasional terhadap dominasi perusahaan-perusahaan Belanda.

Sikap tidak peduli para pemilik modal asing pada akhirnya memunculkan sikap tidak suka dari kalangan orang-orang republik. Tidak

---

<sup>127</sup> Yoshihara Kunio, *Op.Cit.*, Hal.40.

<sup>128</sup> Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, (Jakarta; PT.Primacon Jaya Dinamika, 2001) Hal. 36

mengerankan pula jika sikap pemerintah Indonesia terhadap modal asing menjadi tidak terlalu bersahabat. Apalagi hampir sepanjang kurun 1950-an sektor-sektor modern ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam situasi demikian, secara bertahap mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dan sekaligus mendorong munculnya pengusaha-pengusaha pribumi di Indonesia.<sup>129</sup> Tentu ini adalah kesulitan tersendiri dari pemerintahan baru Indonesia, akan tetapi juga menjadi kekuatan baru untuk menghentikan banyaknya pendudukan liar di tanah perkebunan-perkebunan yang diklaim dan dikuasai oleh Belanda saat itu.

“Perusahaan Asing” didefinisikan sebagai perusahaan yang terhadapnya perusahaan yang berdomisili di luar negeri melakukan kontrol melalui pemilikan saham. Ia tidak mencakup perusahaan di mana perusahaan yang berdomisili di luar negeri menguasai saham minoritas, ataupun perusahaan di mana mereka mempunyai kontrol melalui lisensi tanpa partisipasi saham.

Pada sebuah perusahaan asing, meskipun pemilikan dibagi dengan para investor Asia Tenggara, namun para pemegang saham asing harus mempunyai kontrol manajemen. Dalam sejumlah kasus, manajemen pun dibagi (misalnya pihak lokal mengurus pemasaran, mitra asing menangani

---

<sup>129</sup> Ibid. Nasioanalisis perusahaan-perusahaan Belanda saat itu memang ditujukan untuk mengurangi dominasi perusahaan Belanda khususnya *The Big Five*, Jacobson & van den Berg, Internatio, Borneo-Sumatra Maatschappij (Borsumij), Lindeteves, dan Geo Wehry yang sangat dominan di jamannya.

produksi). Dalam kasus ini, walaupun ada resiko menilai terlalu tinggi pentingnya modal asing, perusahaan ini tetap dianggap asing.<sup>130</sup>

Dalam sejarahnya, segera sesudah pemerintahan Presiden Soeharto, modal Cina menjadi bagian daripada modal dalam negeri, dan diskriminasipun berakhir (paling tidak dalam bisnis). Sebagai hasilnya, mereka kembali menjadi unsur dinamis dari perekonomian Indonesia, yang berekspansi ke berbagai lapangan yang dibuka oleh kebijaksanaan ekonomi yang baru. Orang Cina sangat berhasil pada periode ini, sehingga perasaan anti Cina kembali memuncak di kalangan pribumi. Ditambah dengan faktor-faktor lain hal ini menimbulkan kerusuhan Malari (malapetidaka 15 Januari 1974) semasa kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka di bulan Januari 1974.<sup>131</sup> Kerusuhan ini merupakan pertanda bahwa kebijakan ekonomi pemerintah pada saat itu dipaksa untuk direvisi dan membuat kebijakan baru yang kemudian menguntungkan kelompok pengusaha pribumi untuk memperbaiki posisi jejaring bisnis pribumi yang dianggap sebagai kebijakan ekonomi yang baru.

Di Indonesia, konon Presiden Soeharto melakukan investasi di bisnis, khususnya pada perusahaan-perusahaan milik Liem Sioe Liong, tetapi tidak ada cara untuk mengecek kebenaran hal ini karena dia tidak melakukannya atas nama namanya sendiri. Akan tetapi keluarganya terlibat luas dalam bisnis.

Adik tirinya, Probosudtjo, memimpin kelompok perusahaan Merju Buana. Ia berbagi hak monopoli impor cengkeh dengan Liem Sioe Liong;

---

<sup>130</sup> Yoshihara Kunio, *Op.Cit.*, Hal. 42-43

<sup>131</sup> *Ibid.* Hal. 88.

merupakan kontraktor utama untuk proyek-proyek pemerintah; dan menjadi pemasok utama bagi perusahaan minyak Indonesia. Saudara angkat Soeharto, Sudwikatmono, sering bertindak sebagai wakil (*frontman*) perusahaan bagi Liem Sioe Liong, disamping juga memiliki grup perusahaan sendiri (grup Subentra).

Selanjutnya, saudara lelaki Nyonya Soeharto, Bernard Ibnu Hardjono, memiliki grup perusahaan Gunung Ngadeg Jaya, yang terjun dalam usaha kayu gelondongan, distribusi semen, perdagangan luar negeri dan pemasokan lepas pantai.<sup>132</sup> Dalam sejarah kekuasaan bisnis pemimpin Orde Baru ini pun, peneliti kemudian menjadikan suatu fase perbandingan politik bagaimana kapitalisme Cina tumbuh subur pada perodesasi ini, untuk memberikan gambaran asal usul bagaimana selayaknya para usahawan mendekati “raja” untuk memperoleh keuntungan berupa bantuan keuangan, kerjasama bisnis dengan para pelaku lingkaran dalam pemerintahan dan keluarga pemerintahan.

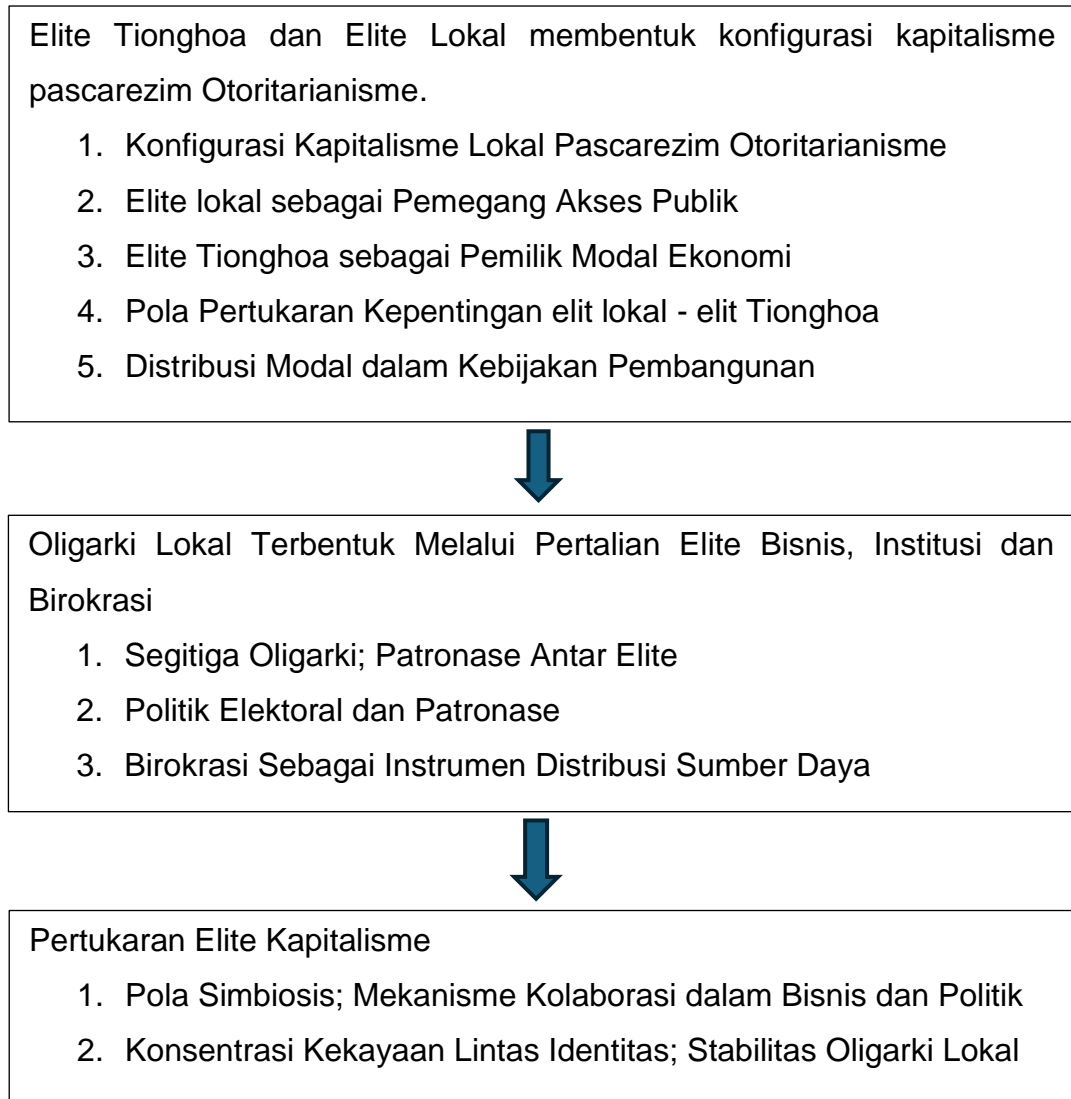
---

<sup>132</sup> Ibid., Hal. 94

## 1.8. Skema Kerangka Pikir

Adapun skema kerangka pikir adalah :

**Gambar 1.8.1.**  
**Skema Kerangka Pikir**



## **1.9. Metode Penelitian**

Bagian ini menguraikan metode yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian, mulai dari rancangan penelitian, subjek dan proses penetapannya, pengumpulan data, analisis data, konteks penelitian, dan keterbatasan penelitian. Aspek ini Akan diuraikan lebih lanjut.

### **1.9.1. Rancangan Penelitian**

Studi ini membahas tentang transfigurasi atau perubahan politik yang kemudian berfokus pada keterlibatan dan kuasa elite lokal dan kapitalis pasca otoritarianisme di kota Makassar. Merujuk dari perspektif teoritis yang peneliti gunakan dengan melihat pendekatan dalam teori Kapitalis dan Teori Oligarki bahwa kapitalisme dalam pengertian dan menurut hemat peneliti merupakan gambaran bagaimana paham kapitalisme mencoba menguasai sejumlah besar modal dan kemudian menjadikan perekonomian dimonopoli atau dikuasai oleh sekelompok orang, dimana Aristoteles juga menggunakan defenisi ini sebagai kekuasaan yang kemudian dimiliki oleh sekelompok orang.

Sekelompok orang ini menjadikan kapitalisme sebagai sebuah patron modernisasi perekonomian atau modernisasi ekonomi yang kemudian dikerjakan atau dilakukan oleh yang disebut sebelumnya sebagai elite bisnis, wirausahawan, eksekutif bisnis yang menguasai praktik-praktik modal yang berjumlah besar dengan segala bentuk manajerial dan manajemen yang bisa bersifat sebagai spekulator dan pemegang monopoli untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam operasi perekonomian pasar.

Teori kapitalisme yang peneliti jelaskan di atas mencoba untuk menguatkan dalam perspektif teori Oligarki yang merupakan jaminan dari unsur kekayaan merupakan syarat utama dari oligarki. Kekayaan pribadi yang sangat besar merupakan pembeda yang paling mencolok dalam lingkungan sosial dan menciptakan jarak yang lebar di semua aspek wilayah dalam tubuh masyarakat kita.

Hal ini merupakan perkara yang sejak dari dulu menciptakan gap atau jarak pemisahan bagaimana kekuasaan dari satu orang, sedikit orang atau banyak orang membuat pembatasan sosial dan sikap sosial terhadap perbudakan, diskriminasi ras dan etnis sampai dengan beberapa sikap yang sengaja mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat sosial. Sikap eksklusifitas inilah yang kemudian memperlebar jarak sosial dan menciptakan politik identitas dalam hubungan dan konstruksi sosial sehingga muncul yang namanya konflik antar ras, etnis dan juga kelompok lantaran perbedaan kekuasaan dan kekayaan pribadi.

Tentu dengan melihat grafik distribusi modal dunia yang dalam persentase pendapatan swasta dunia terlintas pertanyaan akankah Cina akan menguasai dunia, dimana mereka terlihat melakukan dominasi terhadap teknologi dan pertumbuhan kapitalnya tumbuh dengan sangat cepat hari ini, belum lagi dari sistem keamanan dunia, Tiongkok pun berhasil mendamaikan ketegangan dunia di Timur Tengah, dengan konsesi perdamaian antara Irak dan Iran dan tentu yang terbaru adalah Tiongkok mampu membuka keran bisnis dan perdamaian di Afganistan dan juga

memfasilitasi pemerintahan Taliban setelah Amerika Serikat menyatakan mundur dari negara tersebut.

Keberhasilan Tionghoa secara global turut mempengaruhi indeks kekhawatiran politik dimana warga negara Tionghoa yang ada dalam suatu negara sampai mendapat penekanan bahwasanya mereka adalah sebuah kesuksesan, mereka adalah sebuah dominasi dan hegemoni, seperti yang terjadi di Indonesia dimana etnis Tionghoa yang besar dan berkembang juga melakukan hal yang sama dengan menguasai pasar dan aktivitas ekonomi dan lahan kepemilikan yang tersebar di mana-mana.

Teori yang peneliti gunakan di atas adalah untuk melihat bagaimana pengaruh elite lokal dan kapitalis dalam hal ini kelompok elite pribumi dan elite Tionghoa berusaha untuk bersaing dan melakukan persentase kepemilikan di kota Makassar, Bagaimana elite Tionghoa dan elite lokal membangun kapitalisme pasca Otoritarian di Kota Makassar?

Bagaimana upaya kapitalisme elite Tionghoa dan elite Pribumi mempengaruhi dan berperan dalam perpolitikan di kota Makassar seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum dan Bagaimana pertukaran kepentingan antara kapitalisme elite Tionghoa dengan elite Lokal yang ada di kota Makassar.

Pertanyaan penelitian tersebut merupakan rancangan penelitian yang peneliti coba temukan aspek dari masalah dengan menggunakan metode studi kasus, bagaimana melakukan penyelidikan, wawancara mendalam

dan tentu juga dengan banyak memberikan penekanan terhadap kajian literatur untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Persaingan tersebut semakin meruncing setelah runtuhnya Orde Baru 1998 dimana dalam tesis Ricard Robinson timbulnya kelas kapitalis, kapital milik orang Cina. Tesis tersebut beranggapan bahwa kerasnya pertumbuhan kapital korporasi Cina di Bawah Orde Baru sehingga menganggap bahwa Soeharto adalah tanda yang membuat bangkitnya kapitalisme di Indonesia.

### **1.9.2. Subjek dan Proses Penetapannya**

Dalam studi ini memfokuskan bagaimana elite, aktor dan individu yang menurut peneliti adalah mereka yang terlibat aktif dan langsung berpengaruh terhadap kondisi ekonomi politik dan demokrasi di kota Makassar pasca otoritarianisme Orde Baru yang peneliti kategorikan sebagai pemerintahan yang bertangan besi, dan berkuasa melalui kekuatan partai politik, birokrasi dan militer.

Selepas runtuhnya Orde Baru peneliti memperhatikan banyaknya kelompok elite lokal yang terbentuk dan kekuatannya terkonsolidasi dengan matang, sehingga memunculkan narasi politik baru seperti dinasti politik, oligarki lokal, orang kuat lokal, familisme dan lain-lain. Namun peneliti memfokuskan banyaknya transfigurasi atau perubahan politik pasca otoritarianisme yang kemudian mengisi sistem politik reformasi diantaranya elite lokal baru yang berkuasa dan perkembangan ekonomi politik yang dimana etnis Tionghoa bersaing kembali dengan elite pribumi dalam

mengembangkan pengaruh dan kapitalisasinya dalam wilayah kota makassar sampai dengan pengaruh demokrasi elektoral.

Peneliti dalam menentukan subjek dan proses penetapannya dengan menggunakan metode studi kasus adalah dengan mengidentifikasi calon audiens atau informan yang kemudian peneliti identifikasi sebagai kelompok elite pribumi dan kelompok elite Cina, dan sebagaimana dijelaskan bahwa peneliti dalam pendekatan kualitatif haruslah telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman awal tentang calon audiesn maupun informan yang akan digunakan seperti elite pribumi dengan kekuasaan yang lama dan elite pribumi dengan kekuasaan yang baru, begitupun peneliti akan menitik beratkan pada elite Cina yang kemudian mempunyai korelasi dengan pemerintahan daerah dalam hal ini mereka sebagai pengusaha yang juga masuk dalam aktifisme sosial, anggota legislatif dan beberapa juga dari perhimpunan organisasi keagamaan.

Peneliti tentu mengharapkan bagaimana realitas dari calon audiensi dan calon informan yang peneliti rencanakan untuk bisa menjawab permasalahan yang peneliti telah tentukan dan rumuskan pada kontribusi permasalahan. Peneliti juga akan lebh menggali dan mencari informasi berupa bukti dokumen tertulis selain daripada wawancara mendalam untuk melakukan konfirmasi terkait dokumen tertulis tersebut, sehingga peneliti mampu bekerja sama yang baik dengan para subjek penelitian yang telah peneliti tentukan.

Peneliti sadari bahwa tema dalam penelitian ini cukup menantang pemahaman dan pengalaman peneliti dalam rangka mencari tahu sampai

dimana kajian kapitalisme dan studi tentang oligarki ini bisa mempengaruhi realitas politik kita hari ini, dimana teori ini selalu memberikan banyak pertimbangan dalam melihat studi tentang aktor, kelompok, komunitas yang berkuasa dan berpengaruh terhadap demokrasi elektoral sehingga kajian tersebut semakin hari semakin berkembang, mulai dari demokrasi dan kuasa uang, politik kartel, dimana kajian tersebut merupakan pembaharuan dari kajian tentang kapitalisme dan oligarki walau menurut hemat peneliti segala macam bentuk diksi-diksi baru adalah muara dari pusran persoalan politik yang terjadi sampai hari ini.

Pemilihan subjek penelitian telah jauh hari peneliti identifikasi, dan melakukan observasi awal untuk menjelaskan bagaimana literatur riview dengan keberadaan landasan teori yang peneliti akan gunakan nantinya. Dalam bagian dua proposal penelitian ini, yaitu mengenali konseptual teoritik dan kajian peneliti hanya memasukkan dua landasan teori yaitu studi tentang kapitalisme dan studi tentang oligarki. untuk awal sebagai literatur review peneliti mencoba menggunakan kedua teori ini untuk mengidentifikasi siapa aktor kapitalis, siapa aktor oligarki dalam kontek perubahan politik tersebut pasca rezim otoritarianisme.

Setelah itu jika berkembang bagaimana mereka mencoba mencari patron atau perlindungan terhadap sumber daya material mereka atau harta dan kekayaan yang mereka gunakan untuk memodali “pemerintahan” atau demokrasi dalam hasil penelitian nanti peneliti akan mencoba memasukkan teori patron dan klien untuk menguatkan hasil temuan di lapangan nantinya.

Tentu landasan teori ini akan membantu peneliti untuk memberikan dan menjawab kontribusi permasalahan yang peneliti sudah tentukan dari awal, sehingga mampu memberikan kedalaman, kekayaan dan kompleksitas dari sebuah kosntruksi sosial yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat lokal, ekonomi dan masyarakat perkotaan di mana kelompok oligarki dan kapitalis tersebut juga mempunyai pengaruh dalam demokrasi elektoral termasuk bagaimana pembangunan politik berlajalan untuk lebih menguatkan dan menambah data yang telah diperoleh nantinya di lapangan.

### **1.9.3. Pengumpulan Data**

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang ditelitei, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melakukan evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang ditelitei, serta kesiapan dan bekal

memasuki lapangan.<sup>133</sup> Disebutkan di awal bahwa peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, karena berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih audiens atau informan penelitian, menilai kualitas data, analisis data, membuat penafsiran sampai membuat kesimpulan terhadap penelitian atas temuannya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi

---

<sup>133</sup> Prof. Dr. Sugiyono. Op.Cit. Hal. 222

(pengamatan) interview (wawancara) kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ke empatnya (triangulasi).<sup>134</sup> Peneliti dalam hal mengumpulkan data dan memperoleh informasi sebagai observasi awal telah mencoba masuk dan bergabung dan menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh para elite dan aktor tersebut misalnya dalam seminar nasional di mana elite dan aktornya berperan sebagai nara sumber kegiatan.

Pengumpulan data dengan dokumen juga peneliti telah kumpulkan berupa majalah, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan kajian kapitalisme, oligarki, dan beberapa studi tentang politik dan demokrasi elektoral. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara nantinya peneliti harapkan mampu untuk lebih kredibel/dapat dipercaya dengan dukungan sejarah ataupun dokumen yang peneliti akan kumpulkan seperti biografi, beragam tulisan, peraturan, kebijakan, foto, sketsa dan lain-lain.

#### **1.9.4. Analisis Data**

Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif untuk dapat memahami dan menjawab kontribusi permasalahan besar seperti bagaimana kelompok elite Pribumi dan elite Tionghoa membangun kapitalisme pasca Otoritarianisme Orde Baru, bagaimana mereka berpengaruh terhadap demokrasi elektoral di kota Makassar sehingga peneliti mencoba mengurai fenomena politik ini dengan mendiskripsikan di latar belakang, landasan teori dengan kompleksitas yang beragam.

---

<sup>134</sup> Ibid. Hal. 224

Dalam penelitian kualitatif data tentunya diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data gabungan atau bermacam-macam (triangulasi), dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data yang diharapkan mendukung kesimpulan, hasil dan pembahasan sampai dengan penguatan landasan teori.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian hasil penelitian.<sup>135</sup> Analisis data merupakan pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu sesuai dengan tahapan masa penelitian. Peneliti dalam hal ini tetap menggunakan data dan sumber data untuk melengkapi obeservasi dan sampai pada penelitian di lapangan nanti.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

---

<sup>135</sup> Ibid Hal. 245

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>136</sup> Implikasi atas metode dan pendekatan penelitian ini adalah juga sebagai proses produksi informasi dan analisis yang peneliti butuhkan untuk mencermati pertanyaan dan implikasi penelitian sehingga apa yang ada dalam analisis dan pemikiran peneliti mampu untuk disajikan, direduksi sampai penarikan kesimpulan untuk melibatkan segala bentuk proses pencarian pengetahuan terhadap subjek yang terpilih untuk menjelaskan kajian dan posisi ilmu politik terhadap studi yang diharapkan mempunyai perkembangan baru atau temuan dan gagasan baru.

Penelitian kualitatif sebelum memasuki lapangan dipastikan telah melakukan proses analisis data, dimana segala macam bentuk temuan, perspektif merupakan hasil dari studi pendahuluan yang berupa data sekunder hal tersebut digunakan oleh peneliti untuk menentukan fokus penelitian, rumusan masalah dan menentukan kajian teoritik untuk menjelaskan permasalahan sementara. Hal tersebut merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menjelaskan keterkaitan sebagian dengan keseluruhan

#### **1.9.5. Konteks Penelitian**

Setiap komunitas tertentu memiliki budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Oleh karena itu sistem kebudayaan terdiri dari sub-sub sistem budaya yang saling berhubungan satu sama lain dan

---

<sup>136</sup> Ibid.

pengaruh mempengaruhi serta secara keseluruhan membentuk satu kesatuan yang utuh<sup>137</sup>. Budaya yang hidup di masyarakat merupakan pengejawantahan dari sikap dan perilaku sosial dan ekonomi yang akan menjadi cerminan kebudayaan dan peradaban mereka.

Sejalan dengan itu Clifford Geertz berpendapat bahwa kebudayaan adalah pola pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsep-konsep yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan.<sup>138</sup>

Kebudayaan merupakan pedoman bagi seseorang untuk bersikap dan berinteraksi dengan sesamanya. Secara lebih operasional Parsudi Suparlan berpendapat bahwa kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif digunakan oleh para pendukung/pelakunya untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Armin, Disertasi yang meneliti tentang Hubungan Pusat Daerah: Konflik di Bidang Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (2001-2002), (Universitas Indonesia, 2003), hal.55

<sup>138</sup> Ibid.

<sup>139</sup> Parsudi Suparlan dalam Armin tentang Hubungan Pusat Daerah: Konflik di Bidang Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Hal. 55

Pandangan Clifford Geertz tentang kebudayaan bukan sekedar adat, upacara ataupun benda-benda tradisional akan tetapi jaringan makna yang tersusun dalam simbol-simbol yang diwariskan kepada generasi. Simbol tersebut bisa berupa bahasa, ritual, nilai kerja, penghormatan terhadap leluhur, tradisi berdagang hingga sikap dan perilaku terhadap praktik kekuasaan. Melalui simbol tersebut manusia mencari tahu, belajar bagaimana bersikap, membaca situasi dan bagaimana menempatkan diri dalam kehidupan sosial sehari-hari. Bagaimana suatu kelompok membaca petunjuk, world view yang melahirkan pengalaman sejarah. Seperti cara berdagang orang Tionghoa, "*Siri' na Pacce* orang Bugis-Makassar dan lain-lain.

Jika pandangan Geertz dimaknai pada budaya politik komunitas Tionghoa di Makassar, gambaran ini terlihat dari pandangan kebudayaan dalam relasi mereka dengan kekuasaan dan masyarakat lokal, semisal praktik berdagang, jaringan kekerabatan, peran klinteng, perkumpulan marga hingga kebiasaan menjaga kedekatan dengan penguasa yang bukan saja terlihat sebagai praktik sosial biasa. Akan tetapi simbol-simbol yang mengandung cara pandang tertentu terhadap risiko, keamanan dan stabilitas.

Di tingkat politik lokal, budaya untuk menjalin kedekatan dengan penguasa berperan sebagai perantara ekonomi atau cenderung memilih jalur di belakang layar dalam urusan politik formal, sehingga hal tersebut merupakan pengalaman panjang komunitas Tionghoa sebagai minoritas yang pernah mengalami diskriminasi namun tetap mempunyai pengaruh

yang besar dalam perkembangan pasar dan perekonomian perkotaan. Terlihat bahwa praktik kebudayaan komunitas Tionghoa yang terjalin dalam simbol, praktik usaha, jaringan sosial dan strategi mereka dalam berhubungan dengan negara dan elit lokal.

Sementara itu untuk konteks penelitian peneliti mencoba memberikan gambaran tentang budaya politik di Kota Makassar yang tidak dapat dilepaskan dari akar historis masyarakatnya, khususnya pada bagian kesukuan Bugis-Makassar. Nilai siri'na pacce yang merupakan perilaku kebudayaan dan menjadi fondasi kehidupan sosial bermasyarakat turut membentuk pola interaksi politik.

Nilai siri' menekankan pentingnya harga diri dan kehormatan sementara pacce menegaskan solidaritas dan empati sosial. Dalam praktik politiknya kedua nilai tersebut juga berpengaruh dalam menghadirkan budaya patronase yang begitu kuat di mana pemimpin dipandang sebagai pelindung sedangkan pengikut menunjukkan kesetiaan dalam memberikan dukungan politik maupun ekonomi. Pola hubungan seperti ini merupakan praktik patron dan klien yang terus berlanjut hingga pada praktik demokrasi elektoral seperti terjadinya politik uang, dukungan berbasis kekerabatan dan familisme hingga loyalitas birokrasi terhadap elite yang lahir dari kelompok kekuasaan kebudayaan.

Sementara itu, kelompok Tionghoa di kota Makassar juga tak lepas dari budaya politik identitas seperti orientasi yang lebih besar dari praktik perdagangan atau dunia perekonomian ketimbang politik formal sejak masa kolonial hingga era Orde Baru. Kelompok Tionghoa seringkali menempati

posisi penting dalam perdagangan, distribusi dan jaringan modal, akan tetapi mereka mendapatkan pembatasan terhadap keterlibatannya dalam ranah politik bernegara.

Dalam sejarah, perlakuan terhadap etnis Tionghoa berupa diskriminasi semakin memperkuat kecenderungan untuk menjaga jarak dari politik formal dan lebih memilih untuk memperkuat kekuatan utamanya pada sektor ekonomi. Namun pascarezim otoritarianisme, pola dan kekuatan etnis Tionghoa mulai membuka ruang partisipasi politik seperti representasi di legislatif maupun dukungan pada calon kepala daerah.

Dalam ruang arena ekonomi politik, interaksi antara elit lokal dan Tionghoa melahirkan bentuk relasi yang lebih bersifat simbiosis mutualisme sehingga elite lokal memiliki akses yang luas terhadap politik dan birokrasi sementara elite Tionghoa menguasai jaringan modal dan sumber daya ekonomi.

Pertukaran kepentingan itu kemudian menghasilkan bentuk kapitalisme lokal bercorak rentier yang berarti segala macam proyek pembangunan, perizinan usaha, ekspansi properti bahkan distribusi program sosial kerap ditentukan melalui aliansi strategis antara kedua kelompok elite tersebut.

Namun, relasi tersebut tidak begitu saja lepas dari kepentingan dan konflik mengingat sejarah yang panjang diskriminasi dan stereotipe membuat anggapan publik masih memandang dominasi ekonomi Tionghoa dengan curiga sementara kelompok Tionghoa juga menyimpan

kekhawatiran terhadap berbagai macam bentuk eksklusi politik yang bisa muncul sewaktu-waktu mengingat konflik identitas yang menguat sejalan dengan politik elektoral selalu muncul dan dimunculkan.

Hal tersebut melahirkan sebuah rasa ketidakpercayaan penuh sehingga membentuk dinamika kebudayaan politik sehari-hari sehingga memungkinkan aliansi tersebut berdasarkan kepentingan pragmatis dan rentan karena faktor identitas.

Aliansi politik dan ekonomi yang terbentuk di kota Makassar sejak reformasi hingga masa kontemporer bukanlah sekedar hasil kalkulasi politik sesaat melainkan dipengaruhi oleh nilai, identitas dan pengalaman historis masing-masing kelompok sehingga dalam konteks penelitian ini menyoroti budaya politik lokal dan Tionghoa menjadi sangat penting.

Rezim pemerintahan berganti dari keluarga Syahrul Yasin Limpo ke keluarga Amran Sulaiman, menurut hemat peneliti merupakan pola dasar kapitalisme berbasis patronase dan rente tetap bertahan. Demokrasi lokal di kota Makassar pada akhirnya harus dibaca tidak hanya sebagai proses institusional, namun juga sebagai produk dari budaya politik yang mengakar kuat pada relasi kekuasaan dan kepentingan para elite yang sedang berkontestasi.

Beberapa perspektif atau kajian yang menjelaskan tentang kapitalisme, oligarki dan elite yang selanjutnya menjadi bahan perbandingan dan penelusuran bagaimana studi tersebut bisa memberikan pemantik yang lebih lanjut dan mempertegas batas bagaimana teori dalam

penelitian ini kemudian nantinya bisa digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan dalam temuan-temuan di lapangan nantinya. Perubahan besar dalam konfigurasi politik dan ekonomi Indonesia setelah runtuhnya rezim otoritarianisme menjadi latar belakang dalam penelitian ini.

Sejak tahun 1998, demokratisasi berlangsung tidak hanya memperlebar ruang partisipasi politik, akan tetapi memunculkan dinamika baru dalam praktik kapitalisme lokal. Terkhusus di kota Makassar, berbagai macam fenomena menjadi tampak nyata karena di kota Makassar sendiri sejak lama kita kenal merupakan pusat perdagangan dan basis kekuasaan penting di kawasan timur Indonesia.

Sebagai perbandingan tradisi niaga dan patronase yang kuat di Bone, Soppeng, dan Wajo serta posisi Makassar-Gowa sebagai sirkulasi politik dan ekonomi yang menjadikan daerah kota Makassar sebagai laboratorium penting untuk membaca ulang transfigurasi kapitalisme pascarezim otoritarianisme. Praktik kapitalisme di kota Makassar tidak bisa dilepaskan dari peran elite lokal maupun Tionghoa, yang melahirkan model aliansi kekuasaan yang baru dari hasil perjalanan panjang sejarah.

Pilkada tak pernah berbiaya murah dan cenderung berbiaya tinggi dan mahal yang justru mendorong kelahiran aktor yang bertabiat patronase politik dengan dukungan modal ekonomi, sementara ekspansi strategis seperti pelabuhan, properti, ritel modern dan perkebunan memperlihatkan wajah kapitalisme rentier yang lebih menekankan rente daripada inovasi produksi. Relasi ini akhirnya membuat pola dan struktur oligarki lokal yang memadukan kepentingan politik dan bisnis dalam satu jaringan kekuasaan.

**Tabel 1.9.5.1**  
**Dimensi dan Penjelasan Konteks Penelitian**

Dimensi	Penjelasan
Latar Historis	Kota Makassar sejak abad XVII menjadi pusat perdagangan rempah dan basis patronase. Tradisi niaga ini berlanjut hingga era kolonial dan Orde Baru.
Kondisi Kontemporer	Pascareformasi, demokrasi elektoral berbiaya tinggi mendorong patronase politik ekonomi. Kapitalisme lokal berkembang melalui rente tanah, properti, ritel, dan izin tambang, bukan inovasi produksi.
Posisi Teori	Menggunakan Teori Marxian ekonomi politik untuk membaca relasi kelas. Dibandingkan dengan kapitalisme <i>ersatz</i> (Kunio) dan <i>rentier</i> (Piketty) untuk menjelaskan praktik kapitalisme lokal.
Gap Penelitian Terdahulu	1) Kajian ekonomi politik Indonesia dominan Jawa-sentris. (2) Penelitian Sulsel lebih banyak bersifat historis (Gowa, Tallo, Bugis perantau) daripada kontemporer. (3) Kajian oligarki umumnya nasional, bukan lokal. (4) Belum ada yang menautkan teori Yoshihara Kunio & Thomas Piketty untuk membaca kasus Makassar
Posisi Penelitian	Mengisi ruang kosong dengan meneliti konfigurasi kuasa, praktik kapitalisme, dan aliansi elite lokal dan Tionghoa, serta bentuk hegemoni dalam struktur ekonomi politik lokal Kota Makassar.

Sumber : Olah data peneliti

Tinjauan akademik, penelitian ini menempatkan diri dalam perdebatan mengenai bentuk kapitalisme. Yoshihara Kunio menekankan kapitalisme *ersatz* sebagai kapitalisme semu yang lahir dari patronase negara, sementara Thomas Piketty memperlihatkan kapitalisme *rentier* sebagai pola akumulasi berbasis aset dan rente. Peneliti mencoba menautkan dua konsep tersebut pada kerangka teori ekonomi politik, penelitian ini mencoba melihat praktik kapitalisme lokal di kota Makassar yang berkembang dalam kondisi demokrasi elektoral yang sarat patronase.

### **1.9.6. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian disertasi ini menyadari sejumlah keterbatasan yang mempengaruhi ruang lingkup dan pendekatan, kedalaman dan hasil

temuan. Dalam studi ini masih ada keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti. Setidaknya ada 5 keterbatasan dalam studi ini. Pertama, secara geografis penelitian ini berfokus pada konteks lokal di kota Makassar, sementara informan utama yang peneliti pilih terpilih kepala daerah saat pilkada serentak 2024 yang sebelumnya menjabat sebagai anggota legislatif, seperti Bupati Soppeng, sehingga peneliti mendatangi ke lokasi tinggal mereka saat yaitu Kabupaten Soppeng. Sehingga butuh manajemen waktu dan wilayah yang membuat peneliti mesti datang beberapa kali menemui informan utama atau elite strategis yang dimaksud sejak awal penelitian ini.

Kedua, keterbatasan biaya dari peneliti karena peneliti sendiri tidak dalam mahasiswa penerima beasiswa atau biaya mandiri, bukan sebagai penerima tugas belajar hanya mendapatkan izin belajar sehingga tetap mengerjakan tugas pokok dan segala konsekuensi keuangan memerlukan perhitungan yang matang dan terukur untuk segala biaya akomodasi dan transportasi selama dalam penelitian ini berlangsung hingga proses sampai dengan finalisasi.

Ketiga, secara metodologis penelitian ini mendapatkan tantangan dalam mengakses data primer, tentang jaringan kekuasaan dan kepemilikan kapital dan tidak selalu terdokumentasi secara terbuka, beberapa informasi strategis hanya bisa diperoleh dari wawancara mendalam dengan aktor atau elite yang dalam beberapa kasus ada yang menolak untuk ditemui, beberapa informan utama juga tidak memberikan data yang akurat dan mendalam dikarenakan sensitivitas isu lokal nasional

sekaitan dengan isu ekonomi politik sesuai dengan tema peneliti sehingga mengakibatkan ada ketidakstabilan data, ketidakseimbangan data dan narasi yang peneliti susun.

Keempat, keterbatasan peneliti sendiri. Karena tidak semua realitas dapat diungkapkan melalui wawancara dan pengamatan. Dalam melakukan wawancara mendalam terhadap informan disadari tidak semua informasi yang diharapkan dapat diperoleh. Hal ini disebabkan oleh daya serap peneliti ketika wawancara dilakukan. Demikian juga dalam melakukan pengamatan juga disadari keterbatasan peneliti dalam mencatat setiap penjelasan dari para aktor dan interaksi.

Penelitian ini mengambil irisan waktu secara temporal pasca reformasi antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sebagai analisis yang tentunya bersifat dinamis. Struktur kuasa lokal dan aliansi modal ekonomi politik yang diamati dalam penelitian ini bisa berubah dengan cepat lantaran perubahan dinamika politik lokal, nasional dan global sangat berpengaruh.

Peneliti dalam fase ini menyadari betul keterbatasan ini dan berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada kajian dan keilmuan studi politik, ekonomi politik lokal berikut studi kekuasaan di Kota Makassar serta menjadi pijakan bagi penelitian yang lebih berkembang, memuat wacana perbandingan dan lebih substansial ke depannya.



## **BAB II**

### **GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

Bagian ini akan menjelaskan gambaran umum daerah penelitian. Gambaran umum itu meliputi 3 aspek. Pertama, profil wilayah, Kedua, sejarah keberadaan kota Makassar. Ketiga, Gowa-Tallo; Kuasa Maritim dan Resistensi Kapitalisme awal. Ketiga aspek ini akan diuraikan lebih lanjut.

#### **2.1. Profil Wilayah**

Kota Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan ditengarai sebagai kota yang ramai dan terpadat di Indonesia Bagian timur yang berada di luar pulau Jawa. Sebagai bagian dari pusat perekonomian Indonesia, kota Makassar turut berubah seiring desentralisasi. Meskipun desentralisasi memiliki sejumlah kelemahan (Nordholt, 2007), desentralisasi menimbulkan dampak yang besar bagi perkembangan kota-kota di Indonesia<sup>140</sup>. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencapai 2,11 juta unit pada April 2025.<sup>141</sup> Dampak tersebut memberikan gambaran bahwa pertumbuhan perekonomian terlihat jelas dengan populasi kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat usaha dan transportasi.

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Makassar adalah Kecamatan Biring Kanaya dengan luas 48,22 km persegi atau mencakup 27,43 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan luas 1,54 km persegi

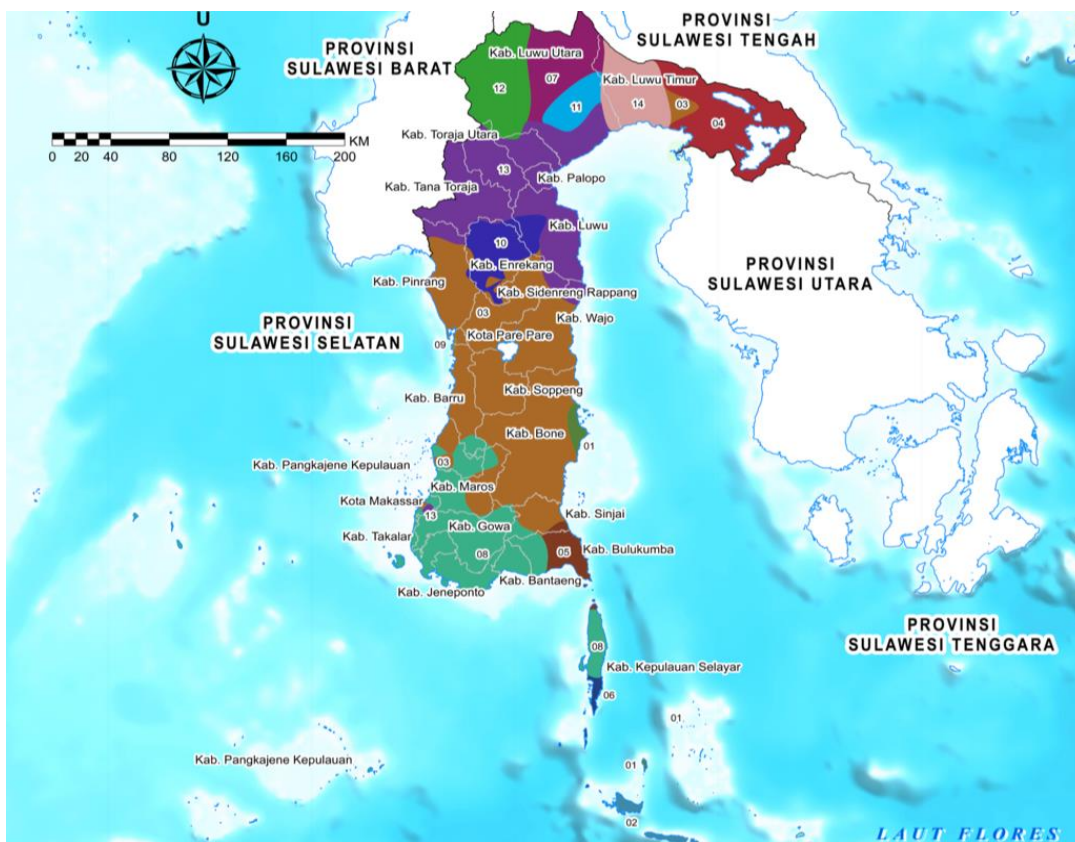
---

<sup>140</sup> Muhammad Nurkhourun, *Identitas Urban, Migrasi, dan Perjuangan Ekonomi Politik di Makassar*, (Depok; Yayasan Desantara, 2012) Hal. 7

<sup>141</sup> Irfan Fadhlurahman, "Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Makassar", databooks, 26 April 2025, <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/44282d98e3b87c5/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-makassarhari-ini> (diakses pada 26 November 2025).

atau hanya sebesar 0,88 persen dari luas Kota Makassar. Jarak antara Kota Makassar ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 5 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Makassar bervariasi, berkisar antara 1 - 21 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Biring Kanaya dengan jarak tercatat sekitar 21 km.<sup>142</sup>

**Gambar 2.1.1**  
**Peta Lokasi Penelitian**



Sumber : Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 2.1.1 di atas, merupakan peta lokasi penelitian yang menjadi rujukan peneliti yang berada di kawasan provinsi Sulawesi Selatan namun yang menjadi objek lokasi peneliti dalam mengambil sampel penelitian untuk melakukan wawancara mendalam adalah Kota Makassar selanjutnya sebagai data pembandingan dan

<sup>142</sup> Badan Pusat Statistik, “Kota Makassar Dalam Angka”, BPS Kota Makassar, 28 Februari 2025, <https://makassarkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/81dcab96ca7120218f7f5fb3/kota-makassar-dalam-angka-2025.html> (diakses 26 November 2025)

pelengkap peneliti mencoba menemui informan strategis yang kebetulan berada di Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo karena telah menjadi kepala daerah terpilih pada pilkada serentak 2024 lalu, menurut hemat peneliti, kabupaten kota tersebut memenuhi syarat bagaimana wajah kekuasaan dan kapitalisme berpengaruh pada perkembangan industri dan politik di Kota Makassar melalui perwakilan dan ketokohan masing-masing daerah yang peneliti telah jumpai untuk dikembangkan dan dianalisis selanjutnya.

Penduduk Kota Makassar tahun 2024 tercatat sebanyak 1.477.861 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 734.008 jiwa laki-laki dan 743.853 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 98,68 , angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 98 - 99 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu 8.408 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Makassar dengan 32.530 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Tamalanrea yaitu 3.353 per kilometer persegi.<sup>143</sup>

Dari komposisi di atas terlihat bahwa kepadatan populasi berada di daerah Kecamatan Makassar dan menjadi area yang paling padat dan sesak karena dihuni sekitar 32.530 jiwa per kilometer persegi sehingga menunjukkan karakter urban yang ramai. Sebaliknya, Kecamatan Tamalanrea memiliki kepadatan populasi yang rendah karena dihuni sekitar 3.353 jiwa per kilometer persegi yang memperlihatkan kepadatan paling rendah sehingga kawasan itu relatif lebih longgar dan bisa jadi memiliki area tempat berkembang dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2.1.1 berikut:

---

<sup>143</sup> Ibid. Hal. 57

**Tabel 2.1.2**  
**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk,**  
**Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2024**

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024 (%)
(1)	(2)	(3)
Mariso	58.797	-0,95
Mamajang	58.075	-1,08
Tamalate	189.222	0,34
Rappocini	150.869	-0,09
Makassar	81.976	-1,67
Ujung Pandang	24.876	-1,92
Wajo	29.391	-3,87
Bontoala	55.244	-2,83
Ujung Tanah	36.721	-0,43
Kepulauan Sangkarrang	15.007	0,71
Tallo	148.008	-0,68
Panakkukang	144.376	-0,07
Manggala	161.827	1,34
Biring Kanaya	216.704	0,69
Tamalanrea	106.768	0,69
<b>Makassar</b>	<b>1.477.861</b>	<b>-0,16</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2025 Volume 26

Tabel 2.1.2 di atas menunjukkan bahwa Kota Makassar menggambarkan sebaran penduduk di berbagai kecamatan dan kecenderungan jumlah penduduknya yang bertambah dan berkurang. Ada beberapa kecamatan yang menjadi kantong penduduk besar seperti Kecamatan Biring Kanaya, Tamalate, Manggala, Panakkukang, Rappocini dan Tallo. Tapi di sisi lain, ada kecamatan yang jumlah penduduknya relatif sedikit, misalnya Kepulauan Sangkarrang, Ujung Pandang dan Wajo. Tidak semua kecamatan perkembangannya sama. Dinamika pertumbuhan penduduk tampak tidak merata antarwilayah.

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Setiap kecamatan memiliki antara 3-15 kelurahan. Pusat pemerintahan Kota Makassar berada di Kecamatan Ujung Pandang. Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga

legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar sebanyak 50 orang, dengan komposisi 42 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Secara organisasi, anggota DPRD terdiri dari 9 partai yaitu partai Nasdem, PDI-P, Golkar, Gerindra, PPP, PKS, PKB, MULIA (Demokrat & Hanura), dan API (PAN & Perindo). Partai Nasdem memiliki wakil terbanyak dalam keanggotaan DPRD Kota Makassar yaitu 16 persen dari total anggota DPRD.<sup>144</sup>

Anggota DPRD Kota Makassar mengkonsolidasikan kursi yang relatif sedikit agar tetap mempunyai daya tawar politik dalam proses pembahasan kebijakan di DPRD sehingga terlihat partai politik seperti Demokrat dan Hanura dengan nama MULIA, PAN dan Perindo dengan nama API terlihat menyatukan kekuatan menjadi satu fraksi agar tetap mempunyai posisi lebih jelas dalam alat kelengkapan dewan yang sering dianggap partai baru oleh masyarakat kota Makassar.

Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi kota Makassar dijalankan dengan membuka akses bagi masuknya investasi, baik asing maupun domestik. Bagi pembangunan kota, pemihakan terhadap investasi dan penanaman modal dibentuk melalui rencana tata kota. Rencana tata ruang dan tata kota sebaiknya dijadikan naskah bersama mengenai tata ruang perkotaan yang merepresentasikan aspirasi warga yang beragam. Namun dalam faktanya, rencana tata kota dikondisikan untuk meningkatkan masuknya investasi dan memudahkan kepentingan pemodal sehingga tampak bahwa kota Makassar memperlihatkan ekspansi modal yang menggurita.<sup>145</sup>

Arah pembangunan perekonomian kota Makassar begitu bergantung pada masuknya investasi, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Rencana tata ruang dan tata kota adalah instrumen utamanya yang mencerminkan bagaimana

---

<sup>144</sup> Ibid. Hal. 24

<sup>145</sup> Muhammad Nurkhairun, *Op. Cit.* Hal. 9

kelompok pemodal begitu berpengaruh sehingga mempermudah perizinan, terbukanya kawasan baru untuk bisnis dan memberi berbagai kemudahan bagi pemilik modal.

Hal itu berakibat pada kota yang berkembang mengikuti logika kepentingan investor dan bukan merupakan kebutuhan sosial budaya warganya sehingga Makassar tampak sebagai ruang tempat ekspansi modal yang padat gedung, padat transportasi yang mengarah kepada kota industri, walaupun pemerintahan Kota memberi slogan “Menuju Kota Dunia” oleh Walikota Dani Pomanto yang penafsirannya terlihat seperti memperlebar ruang konsumsi berselera dengan visi merestorasi perkotaan. Terlihat pembangunan dan perluasan Mall dan pembangunan pusat ritel dan perbelanjaan modern dengan membenteng tol perkotaan di pusat kota.

Dari Menuju Kota Dunia simbolis politik Walikota Dani Pomanto, Menjadi kota megapolitan oleh Walikota terpilih 2024 Munafri Arifuddin dengan menekankan pada pembangunan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan, bandar dan jalur transportasi umum. Kebijakan yang berbeda tersebut tetap memberikan dampak terhadap masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih berdampak seperti kesejahteraan dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya.

Pergeseran gaya dan fokus politik para aktor kota Makassar tetap menunjukkan poros pada kota sebagai ruang ekspansi modal yang melalui penekanan kuat pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, terminal, pelabuhan, bandara dan jalur transportasi umum memang berpotensi memperbaiki konektivitas, menurunkan biaya logistik dan membuka peluang ekonomi bagi warga, namun disaat yang bersamaan orientasi pembangunan yang sangat bertumpu pada infrastruktur fisik seringkali mematenkan logika politik pembangunan sebagai mesin pertumbuhan yang ramah bagi investor namun ada yang tertinggal dan belum tentu mendapat prioritas pada

kelompok rentan seperti pekerja informal, masyarakat berpenghasilan rendah dan warga kawasan pinggiran.

Kebijakan yang terdampak terhadap kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi warga akan sangat ditentukan sampai sejauh mana berbagai macam proyek yang disertai kebijakan redistribusi, perlindungan terhadap pengusuran, mekanisme partisipasi warga sehingga masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari berkembangnya kota yang semata-mata tidak hanya membawa keuntungan pemilik modal namun kesejahteraan yang merata dapat dirasakan secara lebih adil dan bijaksana.

Perkembangan kota dengan memperlihatkan kekerasan publik seperti pengusuran, demonstrasi, dan perusakan karena ketimpangan dan pengambil alihan lahan tentu merupakan bayang-bayang kekerasan perkotaan terhadap warga kota dan warga pinggiran yang tidak mendapatkan keberpihakan dan semakin terkunci ke dalam logika kota yang dibentuk oleh kelompok investor atau pemilik modal.

## **2.2. Sejarah Keberadaan Makassar**

Sampai pada abad X, sejarah negeri ini masih gelap dan sangat kurang tanda-tanda yang dapat memberikan harapan akan terungkapnya masa gelap abad-abad lalu itu, untuk diketahui dengan jelas oleh generasi sekarang. Gowa ataupun Makassar belum ditemukan jejak-jejaknya pada abad XI dan bahkan sampai abad XII. Barulah kemudian, sebuah buku dari peradaban di Pula Jawa, *Negarakertagama* yang ditulis Prapanca pada masa Gajah Mada (1364), ditemukan perkataan Makassar. Dalam buku itu disebutkan, bahwa daerah taklukan Kerajaan Majapahit juga meliputi

makassar.<sup>146</sup> Jejak-jejak tersebut merupakan simpul dari sejarah yang akan menjelaskan kronologi yang akan memberikan pengetahuan dan informasi tentang Makassar sebagai sebuah negeri dan wilayah.

Beberapa petikan kalimat yang menyebut tentang negeri-negeri di Sulawesi Selatan yang menjadi daerah taklukan Kerajaan Majapahit sebagai berikut :

*muwah tanah I Bantayan pramuka Bantayan len Luwuk  
tentang udamakatradyadhi nikanang sanusaspupul  
Ikangsakasanusanusa Makassar Butun Banggawi  
Kuni Craliya nwangi (ng) Selaya Sumba Soto Muar, dsb*

Maksudnya ialah seluruh Sulawesi Selatan menjadi daerah keempat kerajaan Majapahit yaitu: Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Talaud), Makassar (Makassar), Butun (Buton), Banggawai (Banggai), Kunir (Pulau Kunyit), Selaya (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya (Yamin, 1945:56). Apakah yang dimaksud Makassar dalam *Negarakertagama* itu adalah sebuah negeri, seperti yang dipahami dengan tempat, yang disebut kota Makassar sekarang? Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut. Tetapi bila yang dimaksud Makassar sebagai sebuah negeri adalah jelas, seperti halnya Bantayan (Bantaeng), Butun (Buton) dan sebagainya, niscaya letaknya di Sulawesi Selatan.<sup>147</sup>

Penjelasan dalam kitab *Negarakertagama* bahwa wilayah Sulawesi Selatan sudah disebut sebagai bagian dari daerah kekuasaan Mahapahit, dan Makassar muncul sebagai salah satu nama seperti Bantayan, Butun. Maksud penulis menegaskan bahwa tidak ada keterangan yang rinci dan pasti apakah Makassar yang tersebut adalah berbentuk sebuah kota atau negeri seperti yang kita kenal sekarang. Namun bisa dipastikan jika istilah Makassar dalam letak wilayah tersebut hampir pasti

---

<sup>146</sup> Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, (Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2011) Hal. 2

<sup>147</sup> Ibid. Hal. 3.

berada di kawasan Sulawesi Selatan, Negarakertagama dengan ini memberikan jejak awal tentang nama Makassar.

Kehidupan Kota Makassar, sebagai kota pelabuhan yang dikenal oleh dunia internasional sangat erat hubungannya dengan tumbuhnya kerajaan maritim Gowa terutama dalam abad XVI. Sebuah sumber portugis yang dapat digunakan untuk mengungkapkan bagian-bagian gelap dari sejarah ini diterbitkan pada 1944 oleh Armando Cartesao, yaitu terjemahan ke dalam bahasa Inggris, Catatan Perjalanan Tome Pires, *Suma Orientale* (1513). Sumber tersebut menyajikan tentang orang Makassar yang telah melakukan perdagangan dengan Malaka, Jawa, Borneo, Siam, dan semua negeri-negeri Pahan dan Siam; orang Makassar itu lebih menyerupai orang Siam. Mereka adalah bajak-bajak laut yang ulung dengan perahu-perahunya yang banyak.<sup>148</sup>

Menurut Mattulada (1969) *Suma Orientale* merupakan sumber Eropa yang tertua mengenai orang Makassar. Meskipun sumber berita ini mempunyai kelemahan-kelemahan, namun merupakan sumber yang menarik karena memberi kesan tentang luasnya wilayah pelayaran orang Makassar dan mengalami satu tingkat peradaban tertentu. Pertumbuhan itu niscaya telah lama, jauh sebelum Tome Pires mencatatnya dalam *Suma Orientale*.<sup>149</sup>

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pada abad ke-16, Makassar berperan sebagai kota pelabuhan internasional yang tumbuh seiring berkembang dan menguatnya Kerajaan Gowa sebagai kekuatan maritim. Catatan Tomi Pires menjadi bukti awal bahwa orang Makassar pernah terlibat dalam jejaring perdagangan global Asia. Akan tetapi, penyebutan orang Makassar sebagai “bajak laut yang ulung” perlu

---

<sup>148</sup> Ibid. Hal 4.

<sup>149</sup> Ibid.

dibaca ulang secara kritis sebagai sudut pandang seorang penulis Portugis yang mewakili kepentingan kolonial Eropa yang saat itu menguat. Istilah tersebut lebih mencerminkan cara kolonial memberi label pada pelaut dan saudagar lokal yang tidak tunduk pada kontrol dagang kolonialis Eropa.

Ketika Gowa telah berkembang menjadi satu kerajaan yang melindungi semua negeri orang Makassar, sebagai sebuah kerajaan maritim, ia mengembangkan pangkalan armada niaga di Macini Sombala muara Sungai Jeneberang sampai ke utara antara Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Di situlah terletak Kota Makassar sekarang, yang kemudian dikenal sebagai pelabuhan bebas Kerajaan Gowa-Tallo (Kerajaan Makassar). Seiring tumbuhnya kerajaan ini menjadi yang terutama di perdagangan dari seputar Nusantara, orang Eropa dan Cina.<sup>150</sup>

Pada awal abad XVI, bertakhta Raja Gowa IX, Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna. Raja Gowa IX berusaha dan berhasil memperluas daerah kerajaannya ke daratan Sulawesi Selatan, menaklukkan Garassi, katingang, Parigi, Siang (Pangkajene), Sidenreng, Lembangan, Bulukumba, Selayar, Panaikang, Madollo, Cempaka, Marusu, Polombangkeng, dan lain-lain.<sup>151</sup>

Raja Gowa IX membuat peraturan-peraturan, mengangkat, pejabat-pejabat kerajaan untuk perbendaharaan kerajaan. Juga mengangkat Tumarilalang Kerajaan Daeng Pamatte, merangkap syahbandar mengurus bandar/pelabuhan Kerajaan Makasar. Syahbandar inilah yang menciptakan aksara (huruf Bugis-Makassar). Sejak itu orang Makassar/Bugis mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam Kerajaan Gowa-Tallo. Itulah yang disebut buku harian Raja-raja Gowa-Tallo. Ia meletakkan dasar-dasar pembangunan Kasteel (benteng Somba Opu) di daerah

---

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Ibid.

pelabuhan, mendirikan dawela sekelilingnya dengan tanah liat. Membangun istana kerajaan di dalam benteng, menurut catatan Lontara, Somba Opu itulah yang menjadi ibu kota kerajaan Gowa dan di dalam benteng itulah raja menyelenggarakan pemerintahannya (Dg. Patunru, 1967:18-19)<sup>152</sup>

Karena raja inilah yang mula-mula menetapkan istananya dan menjadikan Somba Opu sebagai ibu kota kerajaan yang ditinggalkannya, dapat disebut bahwa bagindalah peletak dasar kota pelabuhan Makassar, yang kita kenal dengan Kota Makassar pada waktu itu. Oleh karena itu, sedikit banyak artinya dalam rangka mencari determinasi kelahiran Kota Makasar.<sup>153</sup>

Penggambaran Raja Gowa IX sebagai penguasa yang memulai dengan menata pemerintahan Kerajaan Gowa secara lebih terstruktur dan membuat berbagai peraturan selain itu dengan mengangkat pejabat khusus untuk mengurus berbagai hal perbendaharaan kerajaan waktu itu. Cara tersebut merupakan langkah yang menunjukkan kerajaan mulai memperhatikan pengelolaan sumber daya dengan konsep yang matang dan terencana. Dengan penunjukan dan diangkatnya tokoh penting seperti Daeng Pamatte yang dilantik sebagai Tumarilalang sekaligus syahbandar yang bertanggung jawab mengurus bandar atau pelabuhan Kerajaan Makassar yang menjadi pusat daripada aktivitas perekonomian.

Peran Daeng Pamatte dalam tradisi lokal pada saat itu bukan hanya terbatas pada urusan lalu lintas pelabuhan akan tetapi juga mengembangkan tradisi literasi dengan penciptaan aksara Bugis-Makassar yang sejak saat itu, orang Bugis-Makassar terbiasa memulai mencatat peristiwa, kejadian, aktivitas relasi yang terjadi di Kerajaan Gowa-Tallo dengan berbagai catatan tersebut dikenal sebagai buku

---

<sup>152</sup> Ibid.

<sup>153</sup> Ibid.

harian raja-raja Gowa-Tallo yang menjadi sumber penting untuk memahami perjalanan sejarah politik, sosial, dan kebudayaan pada masa itu. Dengan adanya tradisi tulis ini sejarah kerajaan bukan hanya terwariskan melalui cerita lisan akan tetapi juga melalui naskah, dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh para pembaca, akademisi, peneliti untuk bisa ditelusuri kembali berbagai jejak dan peristiwa.

Raja Gowa IX yang juga meletakkan pembangunan Kasteel atau yang dikenal dengan Benteng Somba Opu di kawasan pelabuhan dalam catatan Lontara, Somba Opu ditetapkan sebagai ibu kota Kerajaan Gowa di mana dalam benteng tersebut raja menjalankan segala aktivitas pemerintahan yang artinya pusat kekuasaan politik dan aktivitas pelabuhan berada dalam satu kawasan yang berdekatan dan juga sebagai simpul penting antara kekuatan militer, pengelolaan administrasi dan sebagai pusat perdagangan.

Dikarenakan Raja Gowa IX merupakan pertama kali yang menetapkan aktivitas pemerintahannya di Somba Opu dan menjadikannya sebagai pusat ibu kota kerajaan maka ia dipandang sebagai peletak dasar terbentuknya kota pelabuhan Makassar dari pusat pemerintahan inilah kemudian tumbuh pemukiman, aktivitas ekonomu dan dinamika sosial yang kelak berkembang menjadi Kota Makassar yang dikenal sampai sekarang. Pada akhirnya kebijakan penataan ibu kota, pembangunan benteng Somba Opu dan pengelolaan pelabuhan pada masa Raja Gowa IX memiliki arti penting untuk menelusuri determinasi awal kelahiran Makassar sebagai kota pelabuhan yang strategis.

Dalam penelusuran kembali jejak-jejak kehadiran Makassar sebagai istilah dalam lintasan sejarah yang dimulai pada abad *Negarakertagama*, zaman Patih Gajah Mada dari Majapahit, atau sedikit menjangkau ke depannya ketika tenggelamnya Kerajaan Sriwijaya, Singosari dibawah Raja Kartanegara (1254-1292),

maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa konsepsi Makassar atau *Mangkasara* mengandung sekurang-kurangnya tiga pengertian:

Pertama, Makassar sebagai kelompok etnis (suku bangsa Indonesia) yang berdiam di sepanjang pesisir setelah jazirah Sulawesi Selatan, yang mempunyai bahasa dan peradaban sendiri yang hidup sampai sekarang. Kedua, Makassar sebagai kerajaan kembang (Gowa-Tallo) dengan nama kerajaan atau Kesultanan Makassar, sebuah kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi atau Bagian Timur Indonesia dalam abad XVI-XVII. Ketiga, Makassar sebagai ibu kota kerajaan, bandar niaga yang tumbuh setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan dijadikannya pusat terdepan kerajaan Makassar yang mewadahi benteng-benteng Somba Opu, Panakkukang dan Ujung Pandang.<sup>154</sup>

Istilah Makassar, dalam berbagai sumber sejarah menunjukkan “Makassar” atau “Mangkasara” adalah nama kota yang bukan sekedar kita kenal seperti saat ini, akan tetapi sebuah konsep imajinasi komunitas yang mempunyai beberapa makna yang berlapis. Seperti Makassar merujuk pada sebuah kelompok etnis yang mendiami pesisir jazirah Sulawesi Selatan yang mereka memiliki bahasa, adat dan peradabannya sendiri yang bertahan sampai hari ini, identitas suku bangsa bukan sekedar wilayah administratif atau daerah kekuasaan.

Makna Makassar dari etnis ke ranah politik dan ruang kota, sebagai kerajaan yang dianggap kembar yaitu Gowa-Tallo, Makassar merupakan kekuatan besar di kawasan timur Nusantara pada abad ke 16-17 sehingga disebut sebagai Kerajaan Makassar. Dalam bagian ini, Makassar bisa dipahami sebagai entitas politik yang mempunyai pengaruh yang besar dan luas. Sehingga bukan hanya sebagai ibu kota

---

<sup>154</sup> Ibid. Hal. 11

kerajaan dan pusat ekonomi yang berkembang pesat setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis akan tetap menjadi kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan pertahanan yang ditandai dengan kehadiran benteng/kastil seperti Somba Opu, Panakkukang, dan Ujung Pandang. Istilah Makassar mencakup pengertian sebagai suku, kerajaan dan sekaligus pelabuhan strategis.

Memahami Makassar dari lapisan makna tersebut, memberi pengertian bahwa Makassar tidak lahir dan terbentuk begitu saja sebagai kota modern akan tetapi merupakan hasil dari proses panjang perjalanan sejarah yang melibatkan pembentukan identitas etnis, konsolidasi kekuasaan politik dan perkembangan jaringan perdagangan maritim. Identitas orang Makassar sebagai pelaut dan pedagang, kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai pusat kekuasaan dan berkembangnya bandar niaga sebagai simpul perdagangan internasional merupakan satu rangkaian episode sejarah.

Perkembangan Makassar kontemporer merupakan makna lapisan yang penting karena kini menjadi pusat industri di Indonesia Timur yang tetap membawa bayang-bayang masa lalu sebagai kota pelabuhan dan pusat kekuasaan di Sulawesi Selatan. Cara kota ini membuka diri terhadap arus modal dan investasi tidak bisa dilepaskan dari jejak sejarah Makassar sebagai etnis, kerajaan dan pusat ekonomi.

Untuk konteks penelitian ini yaitu evolusi dari kapitalisme ersatz ke rentier, kota yang kini dikemasi sebagai ruang investasi, megapolitan dan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur sebenarnya berdiri di atas tradisi lama sebagai simpul perdagangan dan kekuasaan maritim. Perubahan bentuk kapital dari komoditas, kontrol jalur laut hingga kepemilikan tanah, properti dan infrastruktur dapat dibaca sebagai kelanjutan sekaligus pembelokan dari logika lama jaringan niaga Makassar. Dengan menautkan Makassar sebagai etnis, kerajaan dan bandar niaga dengan

Makassar sebagai kota Kapitalisme urban kontemporer kita dapat melihat bagaimana warisan sejarah digunakan, dinegosiasikan, atau bahkan dipinggirkan dalam proses pembentukan tata ruang dan relasi kuasa ekonomi kita hari ini.

### **2.3. Gowa-Tallo; Kuasa Maritim dan Resistensi Kapitalisme Awal**

Peristiwa sejarah lokal abad ke-17 merupakan periode luar biasa dalam sejarah Sulawesi Selatan. Perubahan serempak terjadi dalam skala luas, banyak penguasa lokal dan pengikutnya yang dalam waktu singkat beralih memeluk agama Islam. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan Islam pada dua dekade pertama abad ke-17 itu terutama disebabkan oleh Raja Gowa pertama yang memeluk Islam.

Dia berkeyakinan bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk menyebarkan agama Islam kepada para tetangganya, bila perlu dengan menaklukkan mereka. Setelah menaklukkan Kerajaan Bone, saingan terberatnya, Gowa pun menjadi kekuatan terbesar di Sulawesi Selatan.<sup>155</sup> Dalam periode ini begitu banyak strategi tentang perkembangan Gowa sebagai kota yang menguasai perniagaan dan sebagai salah satu pusat perdagangan maritim yang sangat berkembang dan terpenting di Nusantara lantaran Makassar sebagai pelabuhan internasional tempat bertemunya pada pedagang besar dari Maluku, Jawa, Cina, India, Arab hingga Eropa.

Sebuah peristiwa perdana dalam sejarah Sulawesi Selatan, tercatat adanya suatu negara yang dapat menyatakan diri sebagai penguasa seluruh wilayah semenanjung tersebut. Meski demikian, Gowa tidak pernah menaklukkan Luwu, kerajaan yang pernah mendominasi Sulawesi Selatan, yang pertama kali memeluk islam, dan yang mula pertama mendukung niat Gowa untuk menyebarkan agama

---

<sup>155</sup> Leonard Y. Andaya. Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17, diterjemahkan dari *Heritage of Arung Palakka A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*, The Hague, Martinus Nijho (Verhandelingen KITLV,91) Terj. Nurhady Sirimorok (Panakkukang Makassar, Penerbit Innawa, cetakan V, 2021) Hal.1

islam ke wilayah lain.<sup>156</sup> Terlihat bahwa hubungan antara kerajaan Gowa dan Kerajaan Luwu pada abad 17 tersebut terkesan lebih kepada hubungan strategis dan diplomatis daripada hubungan invasi ataupun penaklukan. Dalam catatan sejarah bahwa kerajaan Luwu dikenal sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan sementara kerajaan Gowa merupakan kerajaan kuat dan memiliki kekuatan militer yang digdaya di masa abad ke 17.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu wilayah penting dalam sejarah kekuasaan di Sulawesi Selatan. Sebagai bekas pusat Kerajaan Gowa-Tallo, Gowa menyimpan jejak historis feodalisme yang masih berpengaruh dalam pembentukan struktur sosial politik dalam dinamika sejarah dan perkembangan kontemporer. Penjelasan dalam riset dan konteks penelitian ini, Gowa Tallo peneliti tempatkan sebagai arena fabrikasi kekuasaan di mana elite lokal bertransformasi menjadi bangsawan, birokrat, hingga pengusaha dan politisi.

Gowa menjadi salah satu Kerajaan terkuat dan terbesar dalam Sejarah Nusantara. Begitu tersohnya kekuatan dan kekayaan Gowa hingga orang-orang di Indonesia Timur sulit percaya bahwa VOC berani menantang kekuasaan Gowa. Namun, berkat kerjasama tak terduga antara Kompeni dengan orang Bugis, musuh Gowa, masa kejayaan tersebut berakhir dengan sangat mendadak dan mengenaskan. Tahun 1669, Somba Opu, benteng ibukota kerajaan yang sangat kuat dan menjadi simbol kejayaan Gowa, jatuh ke tangan musuh.

Bahkan sebelum penjarahan terhadap Gowa berakhir, berita kemenangan tersebut dengan cepat menyebar ke Kerajaan sekitar, dan mengabarkan munculnya seorang pemimpin baru, Arung Palakka, yang ditakdirkan mewarisi Kerajaan Gowa.

---

<sup>156</sup> Ibid.

Maka, sepanjang abad ke-17 orang-orang Bugis Bone-Soppeng sebagai pemenang mendominasi peta kekuasaan di Sulawesi.<sup>157</sup> Setelah Arung Palakka memenangkan perang makassar, Arung Palakka kembali ke Bone dan tidak menduduki Kerajaan Gowa.

Masa antara permulaan abad ke-16 hingga awal pertengahan paruh kedua abad ke-17, Kerajaan Gowa dapat dikatakan sebagai pusat kekuasaan di Sulawesi Selatan dan pusat perdagangan dari jalur perdagangan di Nusantara pada bagian utara. Keunggulan kekuasaan dan keterlibatan Kerajaan Gowa dalam bidang perdagangan menempatkan Kerajaan Gowa sebagai satu kekuatan yang kuat dan saingan yang besar dalam percaturan perdagangan waktu itu.<sup>158</sup>

Ketenaran Makassar dalam dunia perdagangan telah mempengaruhi Armada Dagang Belanda untuk menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Gowa. Keinginan itu didorong oleh-di samping kedudukan Makassar sebagai pusat perdagangan rempah-rempah danya berita bahwa orang-orang Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark dan Prancis membeli pala dan bunga pala di Makassar dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan dibeli oleh Armada Dagang Belanda di Maluku.<sup>159</sup> Lalu lintas perdagangan ini merupakan jejak sejarah bahwa kejayaan Kerajaan Gowa dengan mengelola niaga sebagai pusat kelola bisnis sumber daya alam merupakan keberhasilan pangan yang besar dan bersejarah menjadikan karakter usaha yang membesarkan peradaban niaga Gowa.

Berbagai kegiatan persaingan antara armada dagang Kerajaan Makassar dan Belanda, tidak jarang terjadi pertikaian, perselisihan bahkan peperangan antara

---

<sup>157</sup> Ibid.

<sup>158</sup> Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik&Hubungan Kekuasaan; Makassar 1906-1942.* (Yogyakarta; Ombak, 2004) Hal. 32.

<sup>159</sup> Ibid.

mereka. Sebab utama yang sering dinyatakan adalah keinginan pelaut dan pedagang Belanda (pada tahun 1602 membentuk Perkumpulan Perseroan Hindia Timur-*Verenigde van het Oost-indische Compagnie* disingkat VOC) menguasai sendiri (*monopolie*) pelayaran perdagangan yang ada di Nusantara.

Dalam beberapa perang kecil yang terjadi, pihak VOC (umum disebut Kompeni) selalu menuntut agar raja melarang pelaut dan perdagangan di Maluku, sebagai syarat dicapainya perjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan itu. Jawabab terhadap tuntutan itu jelas terungkap dalam pernyataan raja Gowa, I Mangarrangi Daeng manrabia Sultan Alauddin (1593-1639) yang berbunyi:

Tuhan telah menciptakan bumi dan lautan, bumi telah dibagi-bagikan di antara manusia dan lautan diberikan secara umum. Tidak pernah terdengar bahwa pelayaran di lautan dilarang bagi setiap orang. Apabila engkau ingin melakukan itu, maka berarti engkau merampas roti dari mulut. Saya seorang raja yang miskin.<sup>160</sup>

Pernyataan ini bukan hanya mengandung penolakan terhadap tuntutan VOC dan keinginannya untuk menguasai sendiri pelayaran dan perdagangan, tetapi juga keinginan Kerajaan Makassar akan pelayaran dan perdagangan bebas dan ketergantungan pada kegiatan itu.<sup>161</sup> Pada abad ini, abad ke 17 kapitalisme di Gowa belum berkembang seperti industri modern namun fondasinya telah mulai terbentuk melalui apa yang disebut sebagai kapitalisme komersial atau yang paling kasar dari aktivitas kapitalisme Eropa yaitu ekspansi dagang yang menjai cikal bakal kolonialisme di Gowa sebagai praktik kapitalis global.

---

<sup>160</sup> Pada episode ini kutipan dalam Edward Polinggomang menjelaskan tentang buku yang berbicara khusus dan membahas Perang Makassar adalah seri disertasi dari F.W Stapel yang berjudul *Het Bongaais Verdrag*. Penjelasan tambahan juga berasal dari karangan N.Mac Lord, "De Onderwirping vab Makassar door Speelman 1666-1669", IG (1900), bgn II, hlm.1269-1297; Buku dari Leonard d Andaya yang berjudul *Thi Heritage of Arung Palakka* juga menjelaskan 1 episode khusus perang Makassar.

<sup>161</sup> Ibid

Mereka tidak hanya mengakumulasi modal, mengontrol keuntungan atas jalur rempah-rempah dari pedagang lokal dari Maluku namun wajah VOC adalah paket lengkap kolonialisme yang mempunyai kekuasaan militer, politik dan kekuasaan hukum yang dia gunakan dalam simbol kuasa pelayaran dan perdagangan.

Perselisihan dan pertikaian yang senantiasa terjadi antara kedua belah pihak akhirnya menjerumuskan ke arena perang yang besar yang dikenal dengan Perang Makassar. Perang ini berawal dari 21 Desember 1666, Ketika Cornelis Speelman memaklumkan perang kepada Kerajaan Makassar dan baru berakhir pada 18 Nopember 1667, disaat dicapainya perjanjian Bungaya. Perjanjian ini pada dasarnya tidak dapat diterima sepenuhnya karena merugikan Kerajaan Makassar dan membunyikan tanda bahaya bagi kekuasaannya. Itulah sebabnya beberapa bangsawan tetap tidak bersedia menerima perjanjian itu dan tetap berusaha mengobarkan perlawanan terhadap VOC.<sup>162</sup> Perang Makassar adalah salah satu bentuk intervensi kapital dan intervensi militer dan proyek kolonialisme VOC untuk menghancurkan ekonomi Kerajaan Makassar yang dianggap menghalangi akumulasi dan hegemoni dagang VOC. Kekuatan militer yang dimiliki VOC bukan hanya sekedar alat penjajahan namun juga merupakan instrumen kapitalisme untuk mengamankan jalur logistik, alur komoditas, dan tegaknya Perusahaan dagang VOC.

Sebelum terjadi Perang Makassar, suasana dalam pelayaran ekspedisi Kompeni ke Makassar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Janszoon Speelman membawa dua puluh kapal yang berawak sekitar 1.870 orang, di antara mereka terdapat 818 pelaut Belanda, 578 tentara Belanda dan 395 pasukan pribumi utama yang berasal dari Ambon di bawah pimpinan Kapten Joncker dan dari Bugis di bawah pimpinan

---

<sup>162</sup> Ibid.

Arung Palakka serta Arung Belo Tosa'deng (Stapel 1922; 97-9 dalam Leonard D. Andaya).<sup>163</sup>

Armada ini tiba di Tana Keke pada 17 Desember 1966, dan muncul di Pantai Makassar dua hari kemudian. Keesokan harinya, Spellman, seperti yang tertulis dalam Instruction, mengirim surat yang dibungkus kain satin putih dan diikat dengan tali sutera merah, kepada Karaeng Gowa di Makassar. Surat itu memuat permintaan Kompeni untuk “perbaiki dan pemuasan terhadap tuntutan dengan segera” serta menyatakan maksudnya bahwa “dengan kasih Tuhan akan membalas dendam dengan kekerasan” jika permintaan mereka ditolak.<sup>164</sup> Ketegangan antara kapitalisme dan kawasan menjelang Perang Makassar mencerminkan benturan antara ekspansi sistem ekonomi pasar global VOC dengan struktur kekuasaan lokal yang berakar pada tatanan feodal maritim.

Dalam ketegangan ini saat pihak Belanda melihat kapal membawa bendera gencatan senjata datang mendekat, hingga mereka berbalik untuk melihat pesan yang dibawa Bajau, selain itu juga membawa 1.056 mas emas sebagai pembayaran atas terbunuhnya orang Belanda di Pulau Don Duango dan 1.435 *coprijksdaalders* yang diambil dari bangkai kapai Leeuwin, sementara reaksi Speelman berkata bahwa darah orang Belanda hanya dapat dibayar dengan darah dan bukan dengan uang.

Pertemuan itu membuat Bajau ketakutan saat melihat Arung Palakka dan pamannya Daeng Matoana serta Arung Belo saat memasuki kabin, karena Bajau percaya bahwa Arung Malakka telah terbunuh di Sumatera (Stapel 1922:101,n.2 dalam Andaya 2021, 97) namun Arung Palakka masih hidup, dia Bagai bangkit dari

---

<sup>163</sup> Leonard D. Andaya menjelaskan dalam sumber-sumber Belanda, Arung belo ini disebut sebagai ‘de Radja van Soping’, atau Raja Soppeng. Dia adalah putra Datu Soppeng La Tenribali Matinroe ri Datunna yang diasungkan di Sanrangang dalam Buku Warisan Arung Palakka, 2021; Innawa, hal. 96.

<sup>164</sup> Ibid.

kubur “membawa serta” armada besar Belanda untuk membalas dendam kepada Gowa.<sup>165</sup> Kerajaan Gowa berusaha mempertahankan otonomi ekonominya dari monopoli Belanda, sementara Kerajaan Bugis seperti Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka ingin lepas dari dominasi dan jajahan dari Kerajaan Gowa.

Jadi ada perang dalam perang ada instrument politik dan medan kontestasi ekonomi politik yang membentuk ulang struktur sosial di Sulawesi Selatan pada masa itu. Arung Palakka tidak hanya menjadi instrument militer, namun juga mejadi figur transisi sebagai artikulasi kekuasaan lokal dan berakhirnya dominasi Kerajaan Gowa yang berakibat terhapusnya kedaulatan maritim sekaligus membuka jalan bagi penetrasi kapitalisme kolonial ke dalam struktur sosial politik Sulawesi-Selatan.

Dampak yang paling besar setelah Gowa kehilangan kedaulatan maritim adalah reposisi corak masyarakat dan bangsawan Gowa yang beralih ke sektor agraris untuk menunjang kehidupan utama. Banyak dari mereka bekas pelaut, pedagang dan petarung kerajaan yang membuka lahan, memperluas pangan dan sektor agraris lainnya. Wilayah Gowa secara bertahap menjadi basis produksi pangan, bukan lagi sebagai pusat niaga dan kebesaran bisnis. Perang Makassar menjadi tanda historis runtuhnya peradaban Maritim Gowa dan lahirnya masyarakat agraris yang lebih domestik dan terkonsolidasi.

Ketika Sulawesi Selatan benar-benar berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah kolonial, model kekuasaan tradisional dan Islam tidak hilang dengan sendirinya. Menurut Gibson (2005), mereka hidup berdampingan hingga sekarang. Pola kekuasaan baru di Bugis dan Makassar diawali dengan hadirnya Muhammadiyah

---

<sup>165</sup> Ibid.

(1937). Pada awal 1937, Muhammadiyah telah mempunyai enam belas cabang di Sulawesi Selatan. Tahun 1941.

Ketika invasi Jepang dimulai di Nusantara, Muhammadiyah menyatakan telah mempunyai 7000 anggota dan 30.000 simpatisan di Sulawesi Selatan. Inilah organ Islam paling besar di Sulawesi Selatan pada masa itu. Kehadiran organisasi Islam ini, menurut Gibson (2005), relative memengaruhi perubahan peta kekuasaan di Sul-Sel. Ini dibuktikan dengan mulainya sejumlah orang biasa (bukan bangsawan) bisa mendapatkan posisi tinggi secara politik maupun ekonomi.<sup>166</sup> Kemunculan dan konsolidasi organisasi berperan penting untuk mempengaruhi lanskap kekuasaan lokal yang sebelumnya didominasi oleh bangsawan, tentu ini menjadikan transformasi dari struktur kekuasaan feodal ke arah yang lebih rasional.

Dalam konteksnya peneliti menggunakan aspek historis untuk melihat geografi politik masa lalu lantaran transfigurasi atau perubahan politik masa lalu mempengaruhi interaksi dengan ekonomi kolonial masa dan tak lepas pula dari jaringan dagang internasional sehingga wajah kekuasaan dan wajah ekonomi politik kota Makassar hingga hari ini menurut hemat peneliti selalu melibatkan ekspansi kapital dan resistensi lokalitas.

Sulawesi Selatan hari ini adalah cerminan dari konfigurasi konflik dan kekuasaan abad 16 yang ditandai dari hegemoni dan dominasi kerajaan yang tentunya republik belum hadir sehingga Gowa-Tallo menjadi ciri khas kajian ekonomi politik yang terekam dalam ingatan para pegiat literasi politik lokal dan kebudayaan juga sejarah yang menjadi simbol kebudayaan yang di dalamnya memuat pengetahuan tentang distribusi kapital, elitee kekuasaan, relasi ekonomi hingga kebesaran simbol sebagai

---

<sup>166</sup> Imam Mujahid Fahmid, *Identitas dalam Kekuasaan. Makassar, (Ininnawa; 2012) Hal.11.*

kota maritim dikarenakan konflik besar berubah menjadi kota agraris. Tentu, Sulawesi Selatan hari ini metupakan gambaran kontemporer masih mencerminkan “ketegangan” lama antara pusat dan pinggiran, antara kelompok elite lama dan elite baru, antara narasi geografi politik yang masih juga menyisakan pola konflik terselubung dalam pentas demokrasi elektoral pada hari ini.

Kabupaten Gowa dan Kota Makassar merupakan wilayah bekas kerajaan Gowa dan tallo kini menjadi episentrum konsolidasi kekuasaan politik dan ekonomi di Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan pusat pemerintahan sekaligus Ibu Kota yang merupakan representasi dari transformasi kerajaan maritim ke dalam bentuk kapitalisme perkotaan, dimana para elite politik lokal bertumbuh, peran pengusaha dan politisi Tionghoa juga mempunyai peran besar di mana mereka semua menjaga distribusi ekonomi dan geliat usaha melalui proyek pembangunan sampai dengan jaringan politik elektoral.

Obyek penelitian yang peneliti dalami merupakan hasil dari kajian yang mendalam sehingga peneliti memilih untuk jalan melingkar menyusuri jejak sejarah sampai jejak penelitian lapangan untuk menapaki bagaimana kapitalisme di Kota Makassar yang merupakan hasil dari negosiasi terus menerus, antara kajian kerajaan masa lalu, sturuktur sosial yang kental dengan pengaruh patronase, sampai dengan demokrasi elektoral modern. Ada yang menarik. Membincang Gowa-Tallo-Makassar sampai hari ini menurut peneliti masih menjadi pusat politik jika dilihat dari seberapa besar dan jauh mereka menghasilkan para tokoh dan elite politik lokal maupun nasional. Sementara wajah daerah lain di Sulawesi Selatan menjadi ruang ekspansi kapital dan elite baru. Tentu ini adalah amatan lapangan dari sumber penelitian peneliti yang akan dikaji lebih jauh dan representatif.